Sudah banyak telaah-kasus ditulis orang mengenai gerakan-gerakan Islam di berbagai belahan dunia Islam, termasuk Ikhwan al-Muslimun, Jama'at-i Islami, dan lain-lain. Tapi, sedikit sekali di antaranya yang mengemukakan analisis mendalam dan akurat tentang masalah ini. Padahal, pembahasan semacam itu terasa makin perlu dan *muhim*, terlebih karena orang merasa berkepentingan untuk menelusuri perjalanan-panjang gerakan-gerakan tersebut.

Kenyataan bahwa pada umumnya gerakan-gerakan tersebut tidak berhasil mewujudkan konsepnya, tak ayal mengundang perhatian banyak ilmuwan Islam – yang, barangkali, juga beranjak dari suatu keprihatinan. Sementara analis berpendapat – dan bisa jadi merupakan pandangan yang mutakhir – bahwa kegagalan tersebut sangat boleh jadi disebabkan karena pijakan atau konsep gerakan-gerakan tersebut yang tidak mengakar kepada Islam.

Seakan menjawab tantangan itu, buku ini, *Gerakan Islam: Sebuah Analisis,* mencoba mengajukan konsep-konsep Islam tentangnya. Dimulai dengan mendefinisikan gerakan Islam itu sendiri, ia kemudian menyajikan analisis tentang sumber-sumber politik Islam, hubungannya dengan konsep ibadah, konsep ummah, ijtihad, dan diakhiri dengan konsep kepemimpinan dalam Islam. Karenanya, buku ini menjadi yang pertama, yang mengajukan analisis paling lengkap dan mendalam tentang gerakan Islam.

Pustaka Hidayah

GERAKAN ISLAM A. EZZATTI

Pustaka Hidayah

GERAKAN ISLAM

Sebuah Analisis

A. EZZATTI

GERAKAN ISLAM

Sebuah Analisis

A. EZZATTI

DAFTAR ISI

BAB 1
DASAR POLITIK ISLAM

Di lingkungan akademis tradisional Barat, sudah lumrah orang nembicarakan masalah sosial, politik, sejarah dan berbagai per-;oalan teoritis lainnya untuk menelusuri sumber konsep dan isti-ah-istilah, yakni bahasa Yunani dan Romawi. Karena, bagi Barat ;egala sesuatunya berasal dari budaya dan sejarah Barat. Studi nengenai Islam tidak bebas dari aturan umum ini. Sesungguhnya, ›ara sarjana Barat mempelajari Islam dalam kerangka Barat. /lereka tidak melakukan pendekatan Islami dalam mempelajari slam. Ini sebagian penyebab — selain salah tafsir karena dendam ›ara misioneris kepada Islam — salah faham terhadap Islam di ;arat selama empat belas abad. Namun, istilah dan konsep evolusi dan evolusi di masyarakat Barat mempunyai sejarahnya endiri. Beberapa penulis klasik mempunyai gagasan mengenai onsep Revolusi dan evolusi, walau mereka tidak tahu pasti kata-ata yang mesti mereka gunakan. Sebabnya, boleh jadi, karena ara penulis klasik tidak mempunyai satu konsep pun atau satu ata bagi "Revolusi", yakni karena tidak ada revolusi yang iembuka zaman baru atau revolusi klasik dalam sejarah mereka, eperti Revolusi Perancis tahun 1789.[1] Thucydides dan Plato ienggunakan kata Metabole (sebagaimana kata lainnya), pe-ıbahan, bagi revolusi. Polybius dengan menyempurnakan siklus lato dari "keadaan ideal merosot ke timokrasi, timokrasi menjadi ligarki dan seterusnya melalui demokrasi menjadi tirani" dengan

membuat tirani beralih menjadi negara ideal lagi, dan denga demikian memperkenalkan revolusi dan perubahan sebagai suat proses lingkaran penuh. Siklus Polybius membuat kita sanga dekat dengan konsep revolusi Renaissance, induk langsung da istilah Barat modern. Aristoteles mengemukakan perubaha dengan kekerasan dan perubahan tanpa kekerasan *(Metabol Kai Stasis, Metabole).* Tampaknya, sekarang Evolusi digunaka untuk perubahan dalam waktu, baik secara relatif cepat ata lambat, sedang Revolusi untuk perubahan yang cepat dan tiba tiba, yang disebabkan oleh perubahan dalam pikiran orang-oran revolusioner. Namun, revolusi berbeda dengan pemberontakan perang saudara, anarki, reformasi dan sekedar perubahan peme rintahan saja. Konsep Islam tentang revolusi tidaklah sepahan dengan konsep otoritas dan kedaulatan berputar, karena kekua saan dan otoritas tetap semata-mata bagi Allah sedang bag manusia adalah, selalu, tanggung jawab. Lagi, sejarah dalam Islam dipahami sebagai gerakan, sebab-akibat yang berkesinam bungan untuk memberi kesempatan kepada manusia menggunakan potensinya sebagai khalifah Allah dan untuk mela ksanakan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah. Ia memper oleh otoritasnya dengan model yang diberikan oleh Nabi dan perintah-perintah yang diberikan oleh Al-Qur'an tetapi dengan memandang ke depan. Sasarannya adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi, tidak memerlukan suatu gerakan berputar *(cyclical movement).* Tetapi, ia revolusioner dalam istilah perubahan dalam pikiran dan materi. Namun, dapat dianggap berputar dalam hal bahwa otoritas harus kembali kepada sumber yang haq — Allah — kapan pun ia mengubah perjalanannya.

Tetapi, Revolusi Islam tidak bergerak dalam lingkaran yang berakhir tepat di mana ia mulai. Dengan kata lain, sejarah dan revolusi dalam Islam tidaklah mengulang. Konsep sejarah dan revolusi dalam Islam mengambil bentuk gerakan siklus berkembang. Dengan demikian ia dapat mengikuti suatu gerak siklus tetapi mempunyai suatu tujuan untuk dicapai, dan dengan demikian berkembang dan bergerak terus menuju tegaknya keadilan kedamaian, ketenangan, persamaan secara penuh, Kerajaan Allah dan kerajaan orang-orang yang berhak menerimanya dan telah menerimanya dengan sungguh-sungguh (adil, zuhud, shaleh: *Theo-Meritokrasi).*

Haruslah diperhatikan bahwa dadakan dan kekerasan sebagai dua ciri utama segala revolusi, sebagaimana disarankan oleh beberapa orang, tampaknya bukanlah suatu hal penting dalam Islam, walaupun Revolusi Islam di Iran, bagi orang luar, mendadak. Revolusi Islam Iran itu juga mengalami kekerasan, karena rezim Shah yang bersenjata lengkap dengan polisi rahasianya — Savak — tidak mengecualikan segala tindak kekerasan untuk menghentikan revolusi dan menggunakan segala bentuk penyiksaan serta penganiyaan terhadap massa yang tidak bersenjata. Jadi, pantaslah bila disarankan bahwa Islam mengajukan konsep dan revolusinya sendiri, istilah revolusi tidak sepenuhnya sesuai dengan istilah Islam *Inqilab* dan bahwa Revolusi Islam adalah suatu revolusi yang berorientasi pada tujuan, masa depan dan progresif.

Istilah Qur'ani bagi perubahan (revolusi) adalah *Taghyiir.* Ayat Qur'an menyarankan istilah *Taghyiir,* yang sangat dekat dengan konsep revolusi modern berbunyi sebagai berikut: "Allah tidak merubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan mereka sendiri."[2] Ayat ini telah dikutip oleh para ulama revolusioner Muslim tradisional seperti Sayyid Jamaluddin, Abduh, Rasyid Ridha;[3] untuk mendorong massa Muslim mengambil langkah-langkah revolusioner. Kalangan pemimpin dan ulama Muslim kontemporer biasa mengutip ayat ini untuk mengajak ummat agar merevolusi keadaan dan masyarakat mereka. Arti dasar dari akar kata Gh-Y-R adalah merubah, mengubah. Atas dasar ayat Qur'an ini dan ayat-ayat yang serupa serta atas dasar prinsip tanggung jawab manusia dan tangung jawab setiap individu dan masyarakat Muslim, Allah hanya merubah keadaan suatu kaum jika mereka memutuskan untuk merubah keadaan mereka sendiri. Jadi, al-Qur'an mengajukan perubahan dan revolusi dipandang dari sudut hukum kausalitas serta mengajukan determinisme sejarah dalam istilah sebab dan akibat, dan dengan demikian memperkenalkan Manusia sebagai Penggerak dan pengubah sejarah. Ini berbeda, misalnya, dari dialektika determinisme sejarah Materialis dan fatalisme Kristen di mana Manusia tidak memiliki peranan. Dalam masyarakat feodal Kristen, revolusi bukan hanya tidak mungkin tetapi tak terpikirkan. Orang-orang yang mengenal Tuhan (ala Kristen) mengetahui bahwa Tuhan sama sekali tidak menghendakinya. Dia telah puas dengan revolusi politik "sebelum" revolusi

kosmik yang sebanding mengenai penciptaan.[4] Sementara literatur klasik Yunani mengajukan perubahan, revolusi dan sejarah sebagai suatu proses berputar, al-Qur'an mengajukan perubahan dengan istilah sebab dan akibat. Mungkin belakangan teori-teori politik melingkar dan fatalisme dari para muallaf Muslim seperti Persia dan India membantu menjelaskan perubahan dengan istilah perputaran dan fatalistis, tetapi al-Qur'an tetap teguh dengan mengajukan perubahan pikiran ummat sebagai sebab utama perubahan-perubahan keluar. Namun, tidaklah benar untuk membahas konsep revolusi secara murni dalam istilah-istilah semantik. Theologi, etika, politik, dan prinsip-prinsip Islam, seperti tanggung jawab dan kebebasan Manusia, tradisi-tradisi revolusioner Islam seperti Syahadah, Mahdiisme, konsep-konsep ibadah Islam, sejarah dan lainnya dapat menjernihkan konsep revolusi dalam Islam dan dengan benarnya memperkenalkan Islam sebagai agama revolusioner. Orang-orang yang berusaha membahas ini semata-mata dalam istilah-istilah semantik yang kabur dan menerangkannya berdasarkan kutipan-kutipan yang disalahpahami, harus lebih memperhatikan prinsip-prinsip yang lebih mendasar dalam Islam.[5]

Istilah *Taghyiir,* sebagai suatu istilah revolusioner, telah digunakan dalam al-Qur'an lebih dari sekali. Yakni, "Perubahan keadaan suatu kaum bergantung pada perubahan keadaan pikiran mereka."[6] Istilah Arab lainnya yang digunakan dalam bahasa Persia untuk mendefinisikan Revolusi Islam di Iran adalah istilah *Inqilab.* Kata *Inqilab,* yang digunakan dalam terminologi Islam untuk mengartikan perubahan dalam substansi sesuatu,[7] misalnya ketika anggur memasam dan berubah menjadi cuka, bersumber dari akar *q-l-b,* berarti pengembalian, pengubahan dan transmutasi. Kata *Inqilab* telah digunakan dalam al-Qur'an dalam hal revolusioner ini: "Orang-orang yang telah berbuat tirani *(Zhulm)* dan penindasan akan menyadari betapa perubahan-perubahan urusan mereka akan mereka terima dan mengetahui bagaimana akhir mereka kembali."[8] Penggunaan kata benda Inqilab sebagai padanan kata dari istilah revolusi sangat lazim dalam bahasa Turki dan Persia dan digunakan pada Revolusi Konstitusi tahun 1905-1911 *(Inqilab Masyrutiyyat)* dan digunakan untuk perubahan-perubahan politis revolusioner. Kata Tsaurah digunakan dalam percakapan negara-negara Arab untuk mendefinisikan Revolusi

Perancis dan revolusi-revolusi lokal di Dunia Arab. Walau penggunaan kata tsaurah untuk mengartikan "mengocok" dan "keresahan" memiliki sejarah agak panjang, penggunaannya dalam pengertian modernnya "Revolusi" agak baru. (lihat Ali Syariati, *Tsaar).*

Sejarah Islam dan mazhab Syi'ah juga merupakan sumber lain yang memberikan materi yang cukup untuk memungkinkan kita memahami konsep Islam tentang revolusi. Revolusi melawan eksploitasi terhadap Islam yang dipimpin oleh para sahabat Nabi seperti Abu Dzar, kemudian Revolusi melawan kekuasaan monarki Ummayah yang dipimpin oleh Imam Husain dan kemudian Revolusi Islam Syi'ah melawan rezim Abbasiyah segera setelah ia menggantikan bani Ummayah. Orang-orang Syi'ah memprakarsai dan memimpin Revolusi melawan keduanya, bani Ummayah maupun Abbasiyah, karena mereka bermaksud mengubahnya dengan Imam Syi'ah dan pemerintahan yang hak dari Ahlul Bait. Sebuah analisa sejarah Islam menunjukkan bahwa Islam sendiri muncul sebagai agama revolusioner dan sejak itu telah bekerja sebagai suatu gerakan revolusioner yang berkesinambungan. Bahkan ini lebih tepat bagi mazhab Syi'ah.

Dalam sebuah khotbah yang disampaikan oleh 'Ali (as), Imam dan Khalifah, beliau meninjau kembali dan menganalisa semangat revolusioner pemerintahannya: "Demi Allah yang mengutus Nabi dengan risalah dan kebenarannya, harusnya anda ketahui bahwa anda akan diperlakukan dengan adil, anda akan diperingatkan dengan keras, diguncang dengan sengit, seperti dalam pemayang. Anda akan disatukan sepenuhnya, dicampur dan diaduk, seperti periuk mendidih diaduk, hingga yang di bawah bergerak ke atas (Bagian masyarakat yang tertindas), dan yang di atas turun ke bawah dan orang-orang yang tertinggal di belakang dan tertekan maju ke depan dan mencapai kedudukan mereka yang benar. Orang-orang yang berada di depan tanpa alasan, akan mundur ke posisi mereka. Saya bersumpah demi Allah bahwa saya tidak pernah menyembunyikan kebenaran apa pun, tidak pula saya mendustakan apa pun. Yang berbuat salah akan dihukum tanpa menghiraukan kedudukan mereka, dan yang berbuat benar akan diberi ganjaran... Kedua ekstrim — kanan dan kiri — menjurus kepada kehancuran. Jalan kepada keselamatan

adalah jalan yang lurus, tak kanan dan tak kiri.[9]

Oleh karena itu, lebih tepat menyerahkan seluruh konsep dan definisi Islam revolusioner dan Revolusi Islam kepada para pembaca setelah membaca buku ini. Namun ini tidak boleh digunakan sebagai dalih. Secara singkat di sini akan kita bahas konsep dan definisi.

Definisi Gerakan Islam

Gerakan Islam dalam suatu pengertian adalah juga bermakna disertai dengan unsur-unsur Islam tertentu tetapi hanya meliputi aspek tertentu atau aspek-aspek spiritual Islam atau kehidupan duniawi dari individu-individu atau masyarakat. Jadi, gerakan Islam meliputi gerakan yang disebabkan oleh Islam dalam bidang-bidang ideologi, misalnya Mu'tazilah, Asy'ariyah, tradisionalis, Wahhabi, Akhbari, gerakan-gerakan puritanis dan fundamentalis Islam. Ia dapat berupa suatu Gerakan Islam dalam bidang politik, misalnya Gerakan Konstitusi Iran (1905-1911) dan sebagainya. Ia dapat berupa Gerakan Islam dalam bidang Ekonomi, misalnya Gerakan Antimonopoli Tembakau dan gerakan Islam dalam nasionalisasi minyak di Iran 1948-1950. Gerakan Islam dapat berupa suatu gerakan pembebasan, seperti gerakan-gerakan rakyat Afganistan, Aljazair, Pattani, Eritria, Moro, Kashmir. Semua itu dipandang sebagai gerakan-gerakan Islam yang disebabkan atau dipengaruhi oleh Islam dan merupakan bagian-bagian dari seluruh gerakan berkesinambungan. Tetapi Revolusi Islam merupakan suatu revolusi yang komprehensif, objektif, berkesinambungan dinamis, padat, besar, intensif, antiimperialis, antieksploitasi, antipenindasan, antikediktatoran, universal, berawal dari revolusi ilahiah, bersemangat, berbobot, bertujuan, berkepemimpinan, yang pendekatannya, cara dan orang-orangnya adalah eksklusif Islami. Jadi, benarlah apabila dikatakan bahwa semua revolusi Islam dapat dipandang sebagai bagian dari Gerakan Islam universal, tetapi tidak mesti berarti sebaliknya. yakni, katakanlah tidak semua gerakan Islam yang terisolasi dapat dipandang sebagai revolusi Islam, karena gerakan-gerakan Islam tidak mesti menghendaki kegiatan revolusioner. Semua gerakan yang sebagiannya Islami dapat dipandang sebagai Islami, tetapi suatu revolusi Islam ialah yang seluruhnya dan sepenuhnya Islami

serta tidak lain kecuali Islam; contohnya, Revolusi Islam di Iran, Revolusi Islam di Iran, Revolusi Islam empat belas abad yang lalu oleh Nabi.

Revolusi Islam juga berbeda dengan gerakan-gerakan reformasi Islam yang mungkin memiliki dimensi ideologis dan bahkan dimensi politik tetapi tanpa dimensi revolusioner (militer). Islam itu sendiri merupakan suatu gerakan yang mencoba menggerakkan manusia menuju kepada Allah. Islam itu sendiri memandang dirinya sebagai kelanjutan dari agama-agama ilahiah lainnya, dan Muhammad adalah yang terakhir dari (suatu rangkaian dari 124.000) nabi yang diutus oleh Allah untuk menggerakkan manusia menuju Allah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gerakan Islam bahkan tidak terbatas pada gerakan Ummah, tetapi meliputi seluruh gerakan ilahiah yang berkesinambungan dari umat manusia, yakni Adam sampai pada akhir zaman. Islam menegaskan bahwa agama ilahi adalah Islam (pasrah kepada Allah) dan semua Rasul Allah dan semua massa rakyat yang netral serta alami, adalah Muslimin. (Orang-orang yang tunduk dan menyerah diri kepada Allah). Gerakan manusia menuju Allah merupakan gerakan Islam dari seluruh umat manusia.

Lagi, tidaklah gerakan Muslim, tidak pula revolusi Muslim mesti gerakan dan revolusi Islam. Muslim revolusioner sejati adalah pribadi yang memanfaatkan potensi Islam untuk melancarkan Revolusi Islam bagi perwujudan Islam yang sebenarnya sebagai satu-satunya sasaran akhir dan bukan orang yang memiliki al-Qur'an dan Islam di tangannya untuk mencapai sasaran duniawi, materialis atau tidak Islami walaupun dihadirkan dalam tradisi-tradisi Islam. Perwujudan sepenuhnya dari Islam yang sebenarnya harus selalu menjadi satu-satunya sasaran. Jadi, kita dapat menekankan bahwa sementara ada sosialisme dan demokrasi Islam, tidak mungkin ada materialisme Islam, sekularisme Islam, rasialisme Islam, sebagaimana tidak mungkin ada politeisme Islam atau marxisme Islam, karena faham-faham ini tidak dapat bersesuaian. Orang-orang marxis atau sekularis atau materialis yang memegang al-Qur'an dengan satu tangan sebagai alat, tidak dapat dipandang sebagai Muslim.

Kami telah menunjukkan bahwa ciri pertama dari revolusi ialah

harus mengikuti revolusidan perubahan dalam pikiran. Islam telah sepenuhnya melainkan kenyataan ini dengan menyatakan secara tegas bahwa "Allah tidak merubah keadaan suatu kaum melainkan jika mereka merubah pikiran mereka sendiri."[11] Keistimewaan revolusi yang kedua terpenting ialah harus *padat*, populer dan perubahan mentalitas kehidupan massa. serta massa sebagai revolusi. Dalam mengaanalisa tradisi dan aktivisme Islam revolusioner Dr. Ali Syariati, yang ikut berpartisipasi dalam memahami Islam dan mengambil bagian dalam revolusi[11] mendukung rancangan berikut: Apakah faktor utama yang menyebabkan suatu masyarakat untuk berubah dengan tiba-tiba: mengubah secara total, wataknya, semangatnya, tujuannya dan bentuknya, dan berubah secara sempurna? Apakah penggerak sejarah itu? Berbagai mazhab sosiologi berlainan pendapat mengenai hal ini. Mazhab-mazhab tertentu sama sekali tidak mempercayai sejarah dan menganggap faktor kebetulan sebagai faktor utama. Mereka menghubungkan aktivitas-aktivitas revolusi dengan kebetulan *(accidentalists)*. Kelompok lain terdiri dari para materialis dan orang-orang yang percaya akan determinisme sejarah. Menurut kepercayaan ini, individu-individu tidak punya pengaruh atas nasib masyarakat mereka, dan masyarakat merupakan fenomena alami yang berkembang menurut faktor-faktor dan hukum alam *(Marxist Communists)*.

Kelompok ketiga terdiri dari orang-orang pemuja pahlawan dan mengagungkan tokoh-tokoh sebagai motor perubah dan revolusi. Mereka percaya bahwa hukum tidak lebih dari alat di tangan tokoh-tokoh yang berkuasa dan tidak punya pengaruh sendiri dalam masyarakat. Mereka percaya bahwa orang kebanyakan (massa rakyat) tidak bersaham dalam perubahan masyarakat. Faktor utama satu-satunya bagi mereka adalah tokoh-tokoh yang berkuasa *(Fascists)*

Ada juga pendapat bahwa rakyat umum dari masyarakat (tetapi bukan massa) memainkan suatu peran dalam menentukan nasib mereka. Tetapi tiada mazhab pemikiran, tidak juga demokrasi dengan bentuk kuno atau modernnya, mengklaim bahwa massa merupakan faktor mendasar dalam perubahan dan revolusi. Mazhab-pemikiran demokrasi percaya bahwa bentuk peme-

rintahan yang terbaik ialah di mana rakyat berpartisipasi; tetapi sejak masa demokrasi Athena sampai sekarang tidak ada di antara mazhab-mazhab ini yang telah menyarankan bahwa massa rakyat yang besar merupakan faktor yang menentukan dalam perubahan sosial (revolusi). Dengan demikian, para sosiolog demokrat tidak menganggap rakyat (massa) sebagai faktor utama perubahan sosial. Jadi, berbagai mazhab menganggap faktor kebetulan, determinisme, tokoh-tokoh besar, elite, hanya untung-untungan atau kehendak ilahi sebagai faktor-faktor yang menentukan perubahan *(revolusi).*

Dalam Islam dan al-Qur'an, tidak ditemukan satu pun dari teori-teori itu. Sekarang, dari sudut pandangan Islam, bahkan Nabi Muhammad saw, orang terbesar di antara para tokoh, tidak dipandang sebagai faktor Islam yang mendasar. Beliau adalah rasul yang bertanggung jawab, pemberi petunjuk dan peringatan. Umat sendiri merupakan faktor yang bertanggung jawab atas perubahan. Dalam Islam dan al-Qur'an, nabi merupakan pandu untuk menunjukkan manusia garis pedoman dan jalan kebenaran. Manusia bebas untuk memilih atau menolaknya. Faktor-faktor kebetulan juga tidak punya tempat dalam pandangan dunia Islam dan tidak punya peran yang menentukan dalam Islam dan perubahan. Demikian pula dengan determinisme sejarah materialis, karena Islam mengakui manusia sebagai faktor yang bertanggung jawab atas perubahan. Jadi, kita simpulkan dari *nas* al-Quran, bahwa Islam tidak memandang faktor yang terpenting dalam perubahan sosial adalah pribadi, atau kebetulan, atau ketentuan hukum yang tak dapat diganggu gugat.

Umumnya, dalam Islam, ummat (massa) merupakan faktor yang terpenting dan efektif atas perubahan sosial. Karena alasan ini maka kita melihat di dalam al-Quran seruan di tujukan kepada al-nas yakni manusia (massa). *Nas* adalah faktor utama dalam perubahan; perkembangan atau kemunduran. Seluruh tanggung jawab bagi masyarakat dan sejarah terletak pada *al-nas.*

Kata *al-nas* bernilai luar biasa, yang untuk itu ada sejumlah padanan kata dan sinonim. Tetapi satu-satunya kata yang menyerupainya, secara struktural dan fonetis adalah kata 'massa', kepada siapa al-Qur'an mengalamatkan.

Dalam sosiologi, massa terdiri dari orang-orang yang keseluruhannya merupakan entitas tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan kelas yang ada di antara mereka atau sifat yang memisah-misahkannya. Oleh karena itu, 'massa' berarti manusia sebagai manusia, tanpa memandang kelas atau bentuk sosial tertentu. *Al-nas* memiliki arti yang benar-benar sama, yakni *massa manusia;* ia tidak memiliki arti tambahan. Kata *insan* dan *basyar* juga merujuk kepada manusia, tetapi secara berturut-turut mereka merujuk kepada sifat etis dan hewani.

Kini kita menarik kesimpulkan berikut: Islam merupakan mazhab pemikiran sosial pertama yang mengakui massa sebagai basis, faktor yang mendasar dan sadar dalam menentukan sejarah dan masyarakat — bukan orang pilihan seperti pandapat Nietzche, bukan aristokrat dan bangsawan seperti yang diklaim Plato, bukan tokoh-tokoh besar, bukan orang-orang berdarah murni, bukan para pendeta atau intelektual, tetapi massa.

Jadi, Islam muncul untuk mendekati teori determinisme dalam sejarah dan masyarakat; tetapi lebih jauh, ia mengatakan sesuatu lagi tentang subjek itu, yang memodifikasi hukum yang telah ditegakkan. Dalam Islam masyarakat manusia *(al-nas)* yang bertanggung jawab terhadap nasibnya dan juga individu-individu yang membentuk masyarakat itu bertanggung jawab bagi nasib mereka. Ayat Qur'an, *'bagi mereka apa yang patut mereka peroleh dan bagimu apa yang patut kamu peroleh'*[12] dan ayat, *'Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah keadaan mereka sendiri'*[13] mengandung arti tanggung jawab sosial. Dengan membandingkan ayat *'Setiap diri bertanggung jawab bagi apa yang telah dikerjakan'*[14] menyatakan tanggung jawab individual. Oleh karenanya, masyarakat maupun individu dapat dituntut pertanggungjawaban dan merupakan faktor utama perubahan. Jadi, Islam menyarankan bahwa perubahan dan revolusi massa adalah melalui perubahan dan revolusi individu dan dengan demikian menolak gagasan impor revolusi.

Islam sebagai suatu mazhab sosiologi ilmiah, percaya bahwa perubahan sosial (termasuk revolusi) dan perkembangan tidak dapat didasarkan pada kebetulan, karena masyarakat merupakan organisme yang hidup, memiliki norma-norma yang kekal dan norma-norma yang tak tergugat dan dapat diperagakan secara ilmiah. Selanjutnya, manusia memiliki kebebasan dan kehendak

bebas, sehingga dengan campur tangannya dalam menjalankan norma-norma masyarakat, setelah mempelajarinya, dan dengan menggunakannya, dia dapat berencana dan meletakkan dasar-dasar bagi masa depan yang lebih baik untuk individu maupun masyarakat. Mungkin ini merupakan salah satu arti, dari sudut pandang sosiologi, dari ucapan terkenal Imam Ja'far as-Shadiq, 'Tak ada determinisme, tiada pula kehendak bebas mutlak, di antara keduanya' *(La jabra wa la tafweed bal amrun bain al-amrain)*[15] kutub-kutub yang berlawanan antara determinisme utlak dan kehendak bebas mutlak, dapat didamaikan oleh kebenaran yang terletak antara keduanya.[16] Singkatnya, dalam Islam, empat faktor mempengaruhi nasib masyarakat: tokoh, kebetulan, norma dan massa *(al-nas)*. Di antara mereka dua yang paling penting adahal al-nas dan norma, karena al-nas mewakili kehendak massa manusia, dan norma, hukum-hukum yang secara ilmiah dapat diperagakan dalam masyarakat. Perlu ditegaskan bahwa massa atau al-nas sebagai faktor perubahan adalah massa dengan pikiran revolusioner, bukan massa yang jahil.

Dasar Politik dan Gerakan Islam

Pertama-tama harus dijelaskan bahwa suatu revolusi Islam menurut wataknya didasarkan pada ideologi Islam dan oleh karenanya membawa identitas khasnya sendiri, ciri-ciri dan wataknya sendiri yang menjadikannya secara total dan sempurna berbeda dari segala revolusi materialistis, pembebasan dan kemerdekaan yang telah disaksikan dunia. Sebenarnya revolusi Islam tidaklah dapat dibandingkan dengan revolusi mana pun lainnya. Ini bukanlah berarti bahwa suatu revolusi Islam tidak mempertimbangkan dan memperhitungkan kebebasan, kemerdekaan, kesejahteraan material masyarakat dan kebebasan. Sebaliknya, semua itu tercakup sepenuhnya, tetapi sebagai sasaran sekunder dan sebagai hasil sampingan dari konsep-konsep komprehensif tentang kebebasan, persamaan, keadilan, perkembangan dan seterusnya, karena Islam, bukan seperti agama-agama lainnya, tidak membatasi dirinya pada ritual-ritual suci, tetapi adalah akidah pikir, jalan hidup yang meliputi semua dan memiliki pandangan-dunianya sendiri yang mempertimbangkan seluruh kemanusiaan dan aktivitas manusia.

Dasar Gerakan dan konstitusi Islam

Singkatnya, semangat revolusi, politik dan konstitusinya adalah Islam itu sendiri. Doktrin-doktrin dasar Islam dan, sebagai konsekuensinya, Revolusi Islam serta politik Islam adalah sebagai berikut:

(1) Kekuasaan, otoritas dan kedaulatan adalah milik Allah semata (Tauhid). Manusia bebas dan tidak boleh menjadi subjek dari segala kekuasaan atau penindasan. Dalam Islam, kekuasaan dan otoritas milik Allah dan bukan milik manusia (Tauhid).

(2) Individu-individu dan masyarakat Muslim bertanggung jawab terhadap Allah, terhadap sesamanya, terhadap diri mereka sendiri, umat manusia dan alam semesta. Agama-agama telah diturunkan, para nabi telah diutus dan kitab-kitab suci telah diturunkan oleh Allah untuk menjelaskan tangung jawab ini *(Risalat)*. Islam adalah agama yang paling inklusif dan komprehensif yang di dalamnya pesan abadi Allah dan tanggung jawab manusia serta pelaksanaannya dijelaskan sepenuhnya. *(Risalat)*.

(3) Individu-individu Muslim, masyarakat dan manusia, harus berlaku baik terhadap sesamanya, terhadap non-Muslim, umat manusia, Alam semesta dan alam serta sumber-sumbernya, harus diperlakukan dengan adil, tak berlebih-lebihan dan dengan pertimbangan tenggang rasa.

(4) Umat manusia adalah wakil Allah *(Khalifatullah)* dan yang termulia dari segala makhluk. Semua manusia diciptakan sama dan diperlakukan secara sama dalam pandangan Allah dan sebagai anggota mayarakat manusia. Sebagai khalifah Allah, manusia harus mengadakan pemerintahan Allah bagi Allah. Kaum Muslimin dibimbing oleh Islam untuk menuntun manusia supaya pemahaman dan mewujudkan tugas ini *(Imamat wa Khalafat)*.

(5) Tanggung jawab pelaksanaan kedaulatan Allah dan tegaknya keadilan diletakkan secara langsung pada umat manusia

secara kolektif dan didelegasikan kepada wakil-wakil melalui pilihan bebas mereka (Islam adalah pemerintahan Allah oleh masyarakat Islam untuk Allah). Kebebasan memilih dan tanggung jawab langsung manusia menuntun manusia untuk diberi ganjaran karena melaksanakan tanggung jawabnya dan hukuman karena tidak melaksanakannya, dan karena itu perlu adanya Kebangkitan *(Ma'ad).*

Dalam pandangan-dunia Tauhid, rasa takut manusia hanya pada satu Kekuasaan, dan dapat dipertanggungjawabkan hanya di hadapan satu Hakim. Dia mengarahkan harapan-harapan dan hasratnya hanya kepada satu sumber. Dan segala yang selainnya adalah palsu dan tidak berarti—segala macam ragam kecenderungan, ketakutan, hasrat dan keinginan manusia selainnya adalah hampa dan sia-sia.

Tauhid menganugerahkan kepada manusia kemerdekaan dan kemuliaan yang sesungguhnya. Ketaatan kepada-Nya dan ketergantungan kepada-Nya semata-mata — norma tertinggi kehidupan — mendorong manusia untuk memberontak melawan segala kekuasaan dusta, segala kehinaan rasa takut dan kerakusan. Satu lagi konsekuensi dari pandangan-dunia Tauhid adalah penyangkalan terhadap ketergantungan manusia pada segala kekuatan sosial dan politik: Sumber dan sebab kemerdekaan dan kebebasan yang sebenarnya.[17] Tauhid meletakkan garis pedoman bagi banyak prinsip Islam yang meliputi kemerdekaan dan kebebasan: kemerdekaan Islami dan Tauhidi.

Walaupun kapitalisme juga mengakui kebebasan individu, namun tidak ada kendali ruhani atas kebebasan ini. Berbagai kekangan yang ada ditentukan terutama oleh tekanan persaingan atau kekuasaan negara yang memaksa dan secara sekunder oleh norma-norma sosial yang berubah-ubah tanpa adanya kesucian ruhani. Namun, dalam sistem Islam, individu tunduk kepada nilai-nilai ruhani yang tak terlihat, dalam segala aspek kehidupan, termasuk perolehan, pengeluaran dan distribusi kekayaan. Islam secara normal mengakui, seperti kapitalisme, kebebasan berusaha dengan lembaga pemilikan pribadi, sistem pemasaran dan keuntungan, tetapi ia berbeda dari kapitalisme, karena hak milik dalam Islam merupakan suatu amanat dari Allah, dan manusia sebagai pengemban amanat dan khalifah Allah bertanggung

jawab kepada-Nya dan tunduk kepada prinsip-prinsip petunjuk-Nya.[18] Jadi, Tauhid meletakkan garis pedoman bagi prinsip-prinsip sosial, politik, ekonomi dan keruhanian sekaligus.

CIRI-CIRI GERAKAN ISLAM

Jadi, revolusi Islam itu memikat, dinamis, militan, ulet, teguh, menyebar, deterministis, mendorong, keras kepala, menantang dan menuju kemajuan.[19] Ini menuntun kita kepada kesimpulan berikut:

1. Revolusi Islam, pertama dan terutama, adalah Islami. Ia mengikuti jalan deterministisnya sendiri. Kegagalannya pada suatu wilayah, bangsa atau lingkungan tidak harus berarti kegagalan total.

2. Ia tidak harus diekspor dari sebuah negeri Muslim ke negeri Muslim lainnya, karena ia mengikuti Islam ke mana pun perginya. Misalnya, bukan Revolusi Islam di Iran yang diekspor ke negeri-negeri Muslim lainnya. Revolusi tersebut, misalnya, juga tidak diekspor ke Iran dari tempat yang pertama.

3. Karena wataknya yang antipenindasan dan karena merupakan tugas keagamaan kaum Muslimin untuk menolong orang-orang yang tertindas dan karena watak deterministisnya, ia meninggalkan pengaruhnya yang kuat kepada orang-orang non-Muslim. Sebenarnya ia merupakan suatu revolusi universal yang antipenindasan. Kemenangan universalnya sudah dijanjikan.

4. Ia adalah Islami dan oleh karenanya tidak dapat menyesuaikan diri dengan rasisme, *nasionalisme,* sistem kelas, sekularisme, materialisme dan semua "isme-isme" asing.

5. Gerakan Islam adalah suatu gerakan global, dan oleh karenanya suatu perang lokal melawan Islam dan gerakan Islam tidaklah mungkin. Demikian pula, serangan terhadap Islam dan Revolusi Islam pada suatu persimpangan sejarah yang spesifik adalah tidak mungkin, karena secara otomatis ia memperbaharui diri dan muncul pada saat yang lain. Islam tidak terikat kepada

waktu dan ruang. Ia adalah suatu revolusi Ummah yang merupakan lembaga tiga dimensi. Ia melebihi waktu, ruang dan relativitas.

6. Gerakan Islam adalah revolusi massa, ia tidak akan terkalahkan oleh perang melawan partai yang berkuasa, kelompok, keluarga dan sebagainya. Ini salah satu ciri utama gerakan Islam di dunia dan terutama di negeri-negeri Muslim. Dua revolusi utama dalam sejarah modern, yang dinamakan revolusi Rusia tahun 1917 dan revolusi China tahun 1949, adalah Marxis, yang didasarkan pada idelogi yang asing bagi orang-orang Rusia dan China, karena itu terjadi penganiyaan dan pemusnahan massa gaya Stalin dan penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi gerakan Islam adalah gerakan orang-orang yang tertindas yang dimobilisasi oleh semangat Islam, karenanya asli dan populer. Sementara hampir semua revolusi zaman modern didasarkan pada ideologi asing serta dipaksakan pada rakyat, Revolusi Islam, disebabkan watak Islamnya yang bebas, didasarkan pada sistem nilai Islam yang dari dalam, agama ummat Islam dan negeri-negri Muslim sejak berabad-abad.

7. Gerakan Islam adalah suatu gerakan positif yang berporos pada diri sendiri. Oleh karena itu, ia dapat menyatakan dirinya menentang kekuasaan yang ada. Ini dapat dilihat dengan jelas pada Revolusi Islam di Iran yang tidak hanya menantang suatu monarki berumur 2.500 tahun, tetapi ia juga menantang para penguasa dan adi kuasa (Amerika, Rusia dan Cina). Kedua revolusi besar dunia terjadi setelah Perang Dunia Pertama dan Kedua dalam situasi keruntuhan otoritas dalam negeri, Mereka berhasil karena merupakan satu-satunya alternatif, karena tidak ada ancaman dari luar maupun dari dalam, alternatif atau tantangan. Tetapi,Revolusi Islam Iran berhasil karena nilai-nilai dan kekuatan positifnya sendiri, meskipun seluruh kekuatan imperialisme semesta terpadu, Zionis, komunis, ancaman-ancaman reksioner. Islam di Iran sebagai bagian dari dunia Muslim bangkit dan bertahan hidup menentang imperialisme dalam negeri (Syahinsyah) yang didukung oleh berbagai macam bentuk imperialisme internasional. Ia merupakan salah satu pilihan dari berbagai alternatif dan bukan satu-satunya alternatif.

8. Gerakan Islam sedunia didasarkan pada suatu ideologi revolusioner dan pada suatu peradaban, budaya; hukum dan sistem nilai. Oleh karena itu, ia dapat memodifikasi resiko-resiko revolusi dan berhasil dengan sangat sedikit rintangan dan kesulitan pada pasca revolusi.

9. Karena gerakan Islam merupakan suatu gerakan Ummah semesta, maka musuh-musuh revolusi Islam tidak hanya bersifat lokal dan nasional, tetapi dari kapitalisme internasional, komunisme, Zionisme, reaksionerisme, feodalisme, materialisme, rasialisme, dan atheisme; singkatnya, segala unsur dunia yang tidak Islami dan anti-Islam, karena "al-kufro ummatun wahidah", orang-orang kafir itu satu umat. Dengan kata lain, revolusi Islam semesta sedang menantang musuh-musuhnya yang anti-Islam sedunia — kebudayaan Barat dan sistem imperialis. Musuh-musuhnya adalah musuh-musuh Islam sedunia. Inilah, mengapa semua kaum Muslimin di seluruh dunia mengidentifikasi diri mereka dengannya, apa pun kebangsaannya, sehingga semua orang kafir mendapatkan diri menentangnya. •

BAB 2
SUMBER-SUMBER POLITIK ISLAM

Revolusi Islam sebagai suatu episode dalam Gerakan Islam yang berkesinambungan, mencari pengabsahannya melalui:

(a) Islam itu sendiri, dalam tradisi-tradisi revolusioner Islam dan dalam semangat Islam, dan dalam Gerakan Islam yang berkesinambungan.

(b) Warisan budaya rakyat yang bersangkutan. Identitas kebudayaan kaum Muslimin secara kuat terjalin dengan budaya dan identitas Islam mereka.

(c) Persetujuan Massa. Ini terutama di negara yang penduduknya mayoritas Muslim, karena fitrahnya sebagai Muslim berhasrat mendirikan negara, masyarakat dan tatanan Islam. Jika mereka tak dapat menyuarakan hasrat dan harapan mereka, mayoritas yang membisu selalu menginginkan mimpi-mimpi mereka terlaksana. Kasus Turki menjelaskan hal ini. Sekularisme yang dipaksakan di Turki tidak sanggup mencabut impian massa kaum Muslimin Turki untuk memperoleh kembali budaya Islam mereka, identitas Islam mereka dan aspirasi mereka yang benar bagi kemerdekaan yang sejati. Gerakan protes dan pawai massa berjuta-juta rakyat dari semua bagian rakyat Iran dan demonstrasi yang berulang kali oleh jutaan rakyat Iran di seluruh negeri selama rezim Syah dan setelah keruntuhannya, menjelaskan pengabsahan Revolusi Islam dan kesinambungannya.

(d) Kegiatan-kegiatan sosial, politik dan agama umat Islam di bawah perlindungan umum Gerakan Islam di sepanjang sejarah Islam, terutama dua abad terakhir,

(e) Islam Syi'ah, tradisi dan budaya Syi'ah, Imamah, kepemimpinan Ulama dan Syuhada.

Revolusi Islam mendapatkan keabsahannya dalam Revolusi dinamis yang berkesinambungan dari semua agama Tauhid dan dalam Risalah-risalah Revolusioner para nabi yang benar sebelum Muhammad. Ia menegaskan kesinambungan revolusi Ibrahimiah. (al-Qur'an, 16:36; 57:25; 4:163-5).

Sumber-sumber Politik Islam

Tidak bisa dimungkiri bagi kaum Muslimin dewasa ini, bahwa Islam merupakan jalan hidup yang meliputi aspek-aspek fisik, politik dan spiritual. Sebagaimana diketahui, Syari'ah atau jalan hidup Islam meliputi perundang-undangan hukum, politik, upacara agama dan moral. Hukum Islam atau Fiqih tidak terbatas hanya kepada masalah-masalah sipil dan kriminal. Ia pun mengatur berbagai urusan politik, ekonomi, sosial, nasional dan internasional. *Fiqh* didefinisikan dengan berbagai cara oleh ahli-ahli hukum Muslim klasik. Tetapi mereka semua sependapat terhadap pokok bahwa ia adalah ilmu, disiplin dan ilmu pengetahuan mengenai hak-hak dan kewajiban manusia serta mengenai apa yang baik dan buruk bagi manusia secara individu dan secara kolektif dengan menggunakan petunjuk-petunjuk yang terinci dan melalui sumber-sumber serta penalaran mereka yang pantas. Sekilas mengenai isi dan definisi yang mencakup semua disiplin *(fiqh)* ini akan menyatakan bahwa ia meliputi segala aspek kehidupan manusia; politik, ekonomi dan sosial, maupun spiritual.[1] Mengingat definisi-definisi dan kandungan fiqih dan karya-karya yang terhimpun padanya, tidak ada keraguan bahwa bentuk hukum-hukum politik, konstitusi, nasional dan internasional, merupakan bagian Fiqih. Prinsip-prinsip politik, sosial dan konstitusi serta peraturan dibicarakan dalam Fiqih dan kitab-kitab serta karya-karyanya. Seorang faqih adalah juga seorang konstitusionalis. Tetapi ini bukan berarti bahwa tidak ada spesialisasi dalam bidang politik dan konstitusi dalam fiqih. Banyak *(Fuqaha')* yang

sudah menjadi spesialis dalam bidang politik dan konstitusi seperti, Al-Mawardi, Al-Baghdadi, Al-Ghazali, Ibnu Jama'ah, Ibnu Taymiyyah, Khajah Nasir al-Din Thusi, Allamah Hilli, Muhaqiq Hilli, Syeikh Mufid, Mirzaye Nainy dan Ayatullah Imam Khomeini. Jadi, persoalan pemisahan agama dan politik yang sekarang dianggap lumrah di dunia Barat dan Kristen tidak punya landasan hukum dalam Islam. Disamping itu, kaum Muslimin mengakui Allah sebagai satu-satunya pemberi hukum dan kedaulatan yang sesungguhnya yang memberikan undang-undang mengenai pengaturan negara dan menetapkan ketentuan-ketentuan untuk dirinci selanjutnya dalam urusan-urusan politik, ekonomi serta sosial maupun pribadi, upacara keagamaan dan hukum. Wewenang dan jangkauan hukum (fiqih) dari pemberi hukum (Allah) dan ruang untuk pertanggungjawaban hukum dari individu-individu dan masyarakat Islam adalah jauh lebih luas dari sistem agama dan hukum lainnya. Hukum (fiqih) dalam Islam didefenisikan sebagai sistem yang dirancang oleh perintah-perintah Ilahi untuk menjelaskan undang-undang mengenai peri laku dan jalan hidup individu-individu Muslim dan masyarakat di dalam atau di luar negara Islam dalam segala bidang. Dalam Islam, agama tidak terbatas pada keimanan dan ritual-ritual pribadi. Pokok-pokok mengenai politik Muslim dan hukum konstitusi serta berbagai urusan juga merupakan bagian dari *(Syari'ah)* Islam dan termasuk dalam seluruh sistem hukum Islam *(Fiqh)* dan juga politik serta hukum konstitusi, undang-undang dan prinsip-prinsip Islam memiliki banyak kesucian, ketuhanan dan kekudusan seperti hukum warisan dan hukum pribadi.

Sumber dan politik dan hukum konstitusi dalam Islam juga sama seperti sumber-sumber hukum sipil dan hukum-hukum pribadi, (Al-Qur'an, Sunnah, Konsensus pendapat *(Ijma')* dan analogi atau prinsip-prinsip rasional *(Qiyas* atau *'Aql)*.

Perlakuan yang dicurahkan para Khalifah Muslim dan para Imam, para penguasa dan pemberian mereka, arbitrasi, perjanjian, pakta, perintah, dan berbagai pendapat dari hakim-hakim Muslim yang berbobot *(Mujtahid, Fuqaha)*, dan penggunaan adat istiadat masyarakat kaum Muslimin sebagai sumber politik dan hukum konstitusi Islam didukung oleh empat sumber hukum utama dan tentu saja mereka tidak akan bertentangan dengan sumber-sumber klasik).

a. Al-Qur'an sebagai kumpulan wahyu Ilahi yang bertalian secara langsung maupun tidak langsung dengan sasaran-sasaran politik dan konstitusi,yakni ia menyatakan dengan jelas bahwa kedaulatan dan otoritas adalah tetap pada Allah semata.[1] Al-Qur'an secara tegas mengutuk kekacauan dan anarki.[2]

b. Sunnah: Nabi Muhammad sebagai utusan Allah mendirikan negara Muslim yang pertama dan dijelaskan dengan perkataan, perbuatan, serta persetujuan politik dan prinsip-prinsip konstitusi serta perundang-undangannya. Sunni percaya bahwa perlakuan para Khalifah dan Syi'ah percaya bahwa perlakuan para Imam sama sahnya dengan praktek Nabi sendiri dan dipandang sebagai Sunnah. Nabi dan para Imam menekankan perlunya tatanan, organisasi dan otoritas dalam masyarakat Muslim.

c. *Ijma'* atau konsensus masyarakat Muslim dan fuqaha (termasuk para Imam Syi'ah) telah direkomendasi sebagai salah satu hukum utama oleh al- Qur'an dan Sunnah, yakni; umatku takkan pernah bersepakat dalam kesalahan. Ditekankan secara gamblang, bahwa ijma juga dibutuhkan untuk pemerintahan Islam. [3]

d. *Qiyas* (analogi) menurut mazhab Sunni dan 'aql (akal manusia) menurut Syi'ah juga diterima sebagai salah satu dari empat sumber utama hukum Islam *(Fiqh)* yang umumnya meliputi politik dan hukum konstitusi. *'Aql* dan *Qiyas* juga menekankan bahwa tidak ada masyarakat Muslim tanpa pemerintahan Islam.

Sebagaimana yang telah kami sebutkan, sumber-sumber berikut ini diterima sebagai sumber tambahan dan pembantu dari politik dan spekulasi konstitusi.

1. Praktek yang dicurahkan para khalifah dan penguasa Muslim.

2. Karya-karya tentang politik dan konstitusi yang dapat dijadikan sebagai teladan.

3. Pemakaian, praktek dan adat istiadat yang dilakukan masyarakat Muslim.

4. Karya-karya tentang politik, konstitusi, ilmu pengetahuan sosial dan berbagai disiplin lain yang relevan.

5. Karya-karya tentang bidang administratif, fiskal, militer dan subjek-subjek yang tergabung.

6. Karya-karya tentang hukum internasional yang umum dan perseorangan.

7. Literatur mengenai politik dan topik-topik yang relevan.

8. Karya-karya tentang hukum Islam (Fiqh) pada umumnya.

9. Karya-karya tentang ilmu agama Islam, terutama karya-karya mengenai nilai-nilai teopolitik.

10. Karya-karya mengenai sejarah Islam dan filsafat .

Ia harus dilahirkan dalam pikiran bahwa ilmu pengetahuan politik dan konstitusi serta hukum-hukum internasional dalam Islam sebagian besar diperoleh dari theologi Islam dan oleh karenanya iadapat sangat bermanfa'at untuk karya-karya mengenai teologi Islam dan dapat menggunakan sumber-sumber teologi Islam. Teologi dan filsafat Islam serta mazhab-mazhab dan filosofis Islam, bisa menyajikan pikiran dan karya-karya yang besar mengenai politik Islam, konstitusi dan ilmu pengetahuan Internasional. Ternyata ada hubungan yang sangat kuat antara politik Islam dan hukum konstitusi serta ilmu pengetahuan pada satu sisi dan teologi Islam pada sisi lain. Jadi kami dapat merekomender bahwa theologi dan filsafat Islam sebagai salah satu sumber utama dari ilmu pengetahuan politik Islam. Oleh karena itu, pada kesimpulannya, tidak dapat diingkari bahwa disiplin politik Islam sebagai bagian dari keseluruhan hukum Islam *(Fiqh)* yang diperoleh dari sumber-sumber Syari'ah yang sama.

Teologi Islam dan para teolog Muslim mendefenisikan Islam sebagai suatu sistem yang meliputi iman, pelaksanaan dan deklarasi iman *(Al-Islam Huwa al-Itiqad, wa al-Iqrar wa al-Amal)* kesemuanya pada sa'at yang bersamaan. Jadi semua peraturan mengenai perilaku negara dan masyarakat serta berbagai hubungannya harus didasarkan pada perintah-perintah Allah dan harus dimasukkan dalam seluruh jangkauan Syari'ah dan disetujui oleh Allah. Urusan-urusan politik dan konstitusi pada akhirnya harus ditetapkan oleh Allah dan hak pemberian sanksi terakhir yang baik dan yang buruk dalam bidang ini, seperti dalam bidang-bidang lainnya, secara eksklusif milik Allah semata. Konsep kedaulatan Islam terletak dalam syari'ah dan teori-teori politik Islam dibahas dalam hukum Islam yang pantas, fiqh. Dengan perkataan lain, mereka menggambarkan keabsahannya dari prinsip-prinsip Islam yang abadi, yang keasliannya dari ilahi dan membentuk prinsip-prinsip hukum yang diterima oleh kaum Muslimin sebagai garis pedoman untuk aktifitas sosial, politik dan agama dari manusia dan masyarakat Muslimin. Dengan menjelaskan sifat keilahian dari politik Islam, Imam Khomeini mengusulkan: "Apabila kita percaya bahwa peraturan dan hukum-hukum ini yang diletakkan Islam memiliki suatu keabsahan permanen dan bahwa Syari'ah tidak menyetujui anarki dan pelanggaran hukum, maka selanjutnya jelaslah bahwa untuk mendirikan suatu pemerintahan Islam adalah wajib bagi kita...' [4] Islam memandang agama sebagai jalan untuk memimpin kehidupan dalam totalitasnya di muka bumi. Agama tidak memiliki urusan lain selain dari pada tujuan ini. Ia merupakan suatu dimensi kehidupan duniawi, dilaksanakan sepenuhnya ketika kehidupan tersebut berlangsung menurut kehendak Allah, yakni bertanggung jawab kepada alam, kepada diri sendiri, kepada masyarakat dan kepada Allah. Tidak seperti agama-agama lainnya yang ditegakkan bagi kepentingan mereka sendiri, yang merupakan suatu kerajaan yang utuh, dan lain dari pada dunia di mana mereka memerintah yang "melebihi" kehidupan di bumi, maka Islam mengumumkan dirinya dan kata hatinya sendiri dari kehidupan di bumi ini. [5]

Di sini kami tidak bermaksud untuk menyebutkan satu per satu sumber-sumber politik Islam dan hukum-hukum konstitusi. Juga kami tidak memperpanjang spekulasi mengenai politik Islam dan

ilmu pengetahuan konstitusi serta berbagai topik lainnya. Perhatian kami di sini terutama menjelaskan secara singkat bagaimana politik serta konstitusi dimasukkan secara umum dalam hukum Islam yang umum *(fiqh)* dan bahwa dalam pelaksanaan ilmu pengetahuan politik dan konstitusi memiliki kehormatan yang sama dengan hukum sipil Islam dan bahkan dengan ibadah Islam. Sebenarnya politik Islam dan berbagai topik konstitusi biasanya dibahas oleh Fuqaha dan para Mujtahid yang sama, bersamaan dengan upacara-upacara agama Islam atau dalam buku dan karya yang sama, kecuali dalam buku-buku khusus yang ditulis oleh ahli-ahli hukum yang spesifik. Sasaran dan tujuan hukum-hukum politik dan konstitusi dianggap sama seperti, misalnya, hukum perseorangan dan keluarga, yang menyelamatkan dan membahagiakan serta mensejahterakan manusia secara umum. Sesungguhnya, sejumlah ahli hukum Islam mengunggulkan secara khusus terhadap politik Islam dan ilmu pengetahuan konstitusi, karena mereka melengkapi masyarakat Muslim dengan ketertiban dan disiplin yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung-jawab seseorang. Mereka memperkenalkan kedamaian dan ketertiban sebagai prasyarat untuk memenuhi tanggung-jawab seseorang terhadap Tuhannya, masyarakatnya, sahabatnya sesama manusia, kerabat seagamanya, keluarganya dan dirinya sendiri.[6] Imam Khomeini menyatakan bahwa alasan *(reason)* dan akal sehat *('aql)* mencatat bahwa ketidakhadirannya suatu pemerintahan Islam, berarti Islam itu sendiri akan hilang. Ini untuk mengatakan bahwa berdirinya pemerintahan Islam adalah suatu prasyarat bagi pelaksanaan Islam itu sendiri.[7]

Jadi dapat disimpulkan, bahwa politik Islam dan disiplin konstitusi memberikan sebagian kepada hukum umum *(fiqh)* sumber-sumber yang sama, tujuan yang sama, penghormatan yang sama dan bahkan sanksi terakhir yang sama.

Untuk membandingkan Islam dengan Kristen, kami ingin jelaskan secara singkat, bahwa tidak seperti Kristen, yang didasarkan pada "Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa pun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." (Matius 5: 39) atau "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang apa yang wajib kamu berikan kepada

Allah" (Matius 22: 21) atau "Masukkan pedangmu itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barangsiapa menggunakan pedang, akan binasa oleh pedang" (Matius 26: 52); "Kerajaanku bukan dari dunia ini." (Yohanes 18: 36) dan banyak perkataan yang serupa, telah memisahkan iman dan politik, Islam sangat mempercayai kesatuan dan keharmonisan antara agama dan politik. Suatu tinjauan mengenai sumber hukum Islam jelas membenarkan pandangan ini. Al-Qur'an sering kali mengajak manusia dan kaum Muslimin untuk menjalankan berbagai urusan politik mereka dan mengajak orang-orang untuk merubah keadaan urusan negara mereka sendiri. Ini merupakan dasar legalisasi dan penjelasan teologis bagi revolusi dan aktivitas Muslimin revolusioner sepanjang sejarah dan ini merupakan sebab dan sasaran dari banyak gerakan Islam yang meliputi waktu dan ruang.

Kesimpulan rasional dari apa yang telah dikatakan mengenai penghormatan dan kesucian dari berbagai aktivitas politik yakni bahwa politik bukan hanya suatu permainan kotor tetapi ia merupakan suatu tugas keagamaan yang harus ditemui dan dilaksanakan serta harus memuaskan sasaran-sasaran Ilahi, dan tidak dapat, serta bukan menggiring kepada tirani, kecurangan, ketidaksamaan atau segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan politik ilahiah, yang menjadikannya suatu tanggung jawab setiap kaum Muslim berperang demi karena Ilahi dan menentang penindasan serta tirani yang merupakan fitrah Islam yang revolusioner. Ia harus jelas mengenai asal, sumber dan sasaran serta aktivitas politik sehingga ia harus digunakan secara serius dan Islam melekatkan kepentingan yang besar kepadanya dan bahwa ia merupakan pertanggungan jawab keagamaan dari setiap Muslim untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas sosial dan politik. Oleh karena itu, tidak dapat diingkari bahwa dalam Islam, aktivitas politik dan usaha ekonomi terdiri bukan hanya bagian utama dari Islam secara menyeluruh tetapi jalin-menjalin dengan bagian-bagian lain dari Islam sebagai keseluruhan. Islam adalah benar-benar suatu ideologi dalam pengertian bahwa Syari'ah dan fiqh, hukumnya telah memberikan kami suatu pola pertanggungan jawab politik dan prinsip yang dengannya kami letakkan dalam tatanan masyarakat dan kehidupan sosio-ekonomi dan politik. Islam adalah jalan hidup yang konsisten secara

keseluruhan dan berorientasi pada tujuan, di mana semua aspek-aspek kehidupan manusia yang meliputi aspek-aspek sosial sosial, ekonomi dan politik ikut dipertimbangkan. Jalan hidup secara Islam yang berorientasi pada tujuan tidak dapat dipahami tanpa suatu masyarakat yang diperintah diorganiser sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.[8] (Sistem politik dan pemerintahan Islam).

Sekalipun demikian, walaupun seluruh politik dan hukum konstitusi dalam beberapa hal adalah bagian dari keseluruhan sistem hukum Islam, ia dibicarakan oleh sebagian besar para faqih Muslim karena keunggulannya yang mereka peroleh. Tetapi meskipun status kebebasan politik dan disiplin konstitusi itu kemudian, selama perkembangan studi Islam, namun mereka telah memelihara agama, spiritual dan nilai-nilai etiknya serta mereka tetap mempertahankannya sehingga tercapai keharmonian antara agama dan politik Islam sepenuhnya. Teori-teori politik dan konstitusi serta berbagai aktivitas masih harus didukung oleh sumber-sumber yang asli Islam dan mereka masih harus memperoleh persetujuan agama sepenuhnya. Ilmu pengetahuan politik dan konstitusi masih harus tetap tunduk kepada *Syari'ah* dan *fiqh* serta berbagai aktivitas politik dan konstitusi harus memenuhi sasaran-sasaran ilahiah, agama, etika dan spiritual serta sepenuhnya selaras dengan ajaran dan prinsip Islam untuk menambah kesejahteraan manusia, masyarakat kaum Muslimin dan untuk memperoleh persetujuan Islam. Berbagai aktivitas politik, konstitusi dan revolusioner selalu harus memelihara dasar etika, spiritual dan Islam mereka dan harus terus dibimbing oleh prinsip-prinsip, ajaran-ajaran dan standar-standard Islam serta harus cocok di dalam kerangka Islam. Jika mereka tidak memberikan prinsip-prinsip dasar keadilan, persamaan, martabat manusia, emansipasi kemanusiaan dari segala ikatan dan kesetiaan kecuali kepada Allah, maka mereka harus terhindar dari segala cara dan segala tindakan termasuk cara-cara dan tindakan revolusioner.

ASAS-ASAS POLITIK ISLAM, KONSTITUSI ISLAM

Sudah waktunya dunia non-Muslim memahami Islam yang sesungguhnya dan Muslimin yang taat serta berhenti memperke-

nalkan stempel Islam sosialis buatan mereka sendiri — terutan diperkenalkan oleh orang komunis dan para simpatisan merel serta orang-orang yang berusaha keras untuk memperkenalk Babrak Karmal sebagai Muslim yang benar, seperti Halliday d para orientalis kiri — atau kapitalisme Islam — yang terutan diperkenalkan oleh Barat dan simpatisan serta pengikutnya d orientalisme,[9] yang memperkenalkan Islam sebagai agama ya fanatik dan berusaha keras untuk menonjolkan Syah yang terg ing sebagai Muslim yang benar. Sudah waktunya pula no Muslimin, atau kaum Muslimin yang dijejali oleh non-Muslim atau oleh media anti-Islam, untuk mengambil sikap tidak memih dalam memahami Islam dan Revolusi Islam Iran serta berhe memperkenalkannya hanya dalam istilah-istilah sosio-ekono atau sebagai suatu revolusi fanatik atau sektarian.

Pemikiran-pemikiran revolusi, prinsip-prinsip dan aktivit berakar politik Islam, konstitusi dan didasarkan, pertama, dala Syari'ah secara umum termasuk aqidah dan teologi Islam sert kedua, pada sistem hukum Islam, Fiqih, dan oleh karena i memberikannya suatu karakter serta watak hukum yang kuat da terakhir, pada sistem etika serta spiritual Islam.

Prinsip terpenting dan paling mendasar dalam Islam adal ajaran tauhid, monoteisme dalam pengertiannya yang palir tegas. Dalam Islam, Tauhid bukan sekedar suatu prinsip teolo tetapi merupakan landasan utama dari epistemologi Islam d prinsip yang paling mendasar dari metodologi Islam serta semu studi mengenai Islam. Sesuai dengan prinsip otoritas ini, kedaul tan, keputusan dan kekuasaan serta hak memberi perintah adal semata-mata milik Allah.[10]

Bahkan para Nabi tidak memiliki wewenang sendiri teta adalah utusan dan pesuruh Allah.[11] Wewenang Allah tidak te batas hanya pada hal-hal yang ghaib tetapi menyeluruh da meliputi aspek-aspek politik. Ajaran ini memerdekakan da membebaskan seluruh manusia dari segala bentuk kerendaha ketergantungan dan ketundukan serta memberikan kepada kau Muslimin semangat revolusioner dan rasa kemerdekaan yan kuat. Ajaran ini memberikan kepada kaum Muslimin pembenara hukum, politik, spiritual, sosial, teologi dan etika untuk berusah mendirikan suatu tatanan ilahi, suatu pemerintahan dan siste
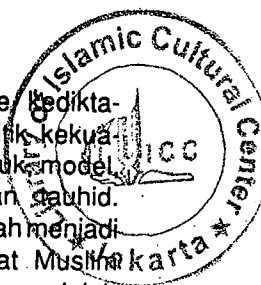
politik yang adil serta berjuang melawan imperialisme, kediktatoran, kolonialisme, keaiban, penindasan, tirani, politik kekuasaan, otoritarianisme, totalitarianisme dan segala bentuk, model, jenis peraturan yang bertentangan dengan ajaran tauhid. Sesungguhnya menjadi seorang Muslim yang baik adalah menjadi penganut tauhid *(Muwahid)* yang benar. Masyarakat Muslim *muwahid* yang baik dengan sistem sosio-politik Islam, adalah masyarakat dengan sistem tauhid yang benar.[12] Ajaran tauhid dan dampaknya pada seluruh sistem Islam, menjadikan Islam bukan hanya suatu agama rasional yang revolusioner dengan kemantapan, tetapi dengan sistem keyakinan yang revolusioner dan berdasar hukum tetapi juga merupakan sistem politik dan pemerintahan yang merdeka, karena sistem politik Islam tidak hanya sistem yang didasarkan atas tauhid dan berasal darinya, tetapi ia harus secara terus-menerus monoteis sepenuhnya. Sesungguhnya ini bukan penafsiran revolusioner dari Tauhid dan Islam, tetapi adalah Tauhid dan Islam itu sendiri. Jadi, dapat disimpulkan, bahwa tidak cukup bagi sistem politik Islam berdiri dengan tindakan-tindakan revolusioner, tetapi juga harus terus revolusioner. Dapat juga disimpulkan bahwa legalisasi dan konstitusionalisasi sistem politik Islam tidak bertentangan dengan revolusionalisasinya. Keduanya dalam Islam adalah selaras dan keduanya menarik pembenarannya dari sumber yang sama (Tauhid, wahyu dalam bentuk langsung (Qur'an) dan tidak langsung (Sunnah, Ijmak dan sumber-sumber lainnya).

Aspek negatif dari Tauhid (penolakan nilai-nilai dan wewenang apa pun selain dari Allah) walaupun menunjukkan suatu proses, karena ia harus mendahului ekspresi yang sepenuh-penuhnya dari kandungan positip itu, sesungguhnya tidak kurang pentingnya dari aspek positip. Ali Syariati, seorang pemimpin revolusioner intelektual Iran, sangat dipengaruhi oleh aspek negatif tauhid yang bermakna istimewa dalam ideologi revolusioner melawan sistem diktator dan despotik. Sebagian ulama bahkan percaya bahwa 'apa yang jelas Islami — dan karena itu baru — dalam Tauhid sebagai prinsip metafisik, adalah aspek negatif dari pernyataannya'. Aspek positif Tauhid, yakni mempercayai Allah yang universal, sebagai ganti Tuhan kesukuan, nasional, regional atau bahkan Tuhan rasial, juga mempunyai suatu kedudukan dan makna

khusus dalam mempersatukan aktivitas-aktivitas revolusioner dan dalam mendirikan suatu pemerintahan rakyat yang universal dan suatu sistem menyeluruh yang adil. Ajaran Tauhid atau monoteisme yang memberikan hak wewenang, kekuasaan, loyalitas, kedaulatan dan hak memerintah semata-mata kepada Allah, yang tidak meninggalkan wewenang dan kekuasaan bagi manusia, tetapi hanya menyerahkan tanggung jawab kepada manusia untuk melaksanakan perintah-perintah Allah yang diamanatkan kepada manusia secara individual *(fardhul 'ain*, tanggung jawab individual) dan secara kolektif *(fardhul kifayah*, tanggung jawab kolektif) dalam bentuk menjadikan manusia sebagai khalifah Allah

Pemerintahan Ilahi, menurut Islam, bukanlah kerajaan Allah di surga tetapi ia adalah pelaksanaan kehendak-kehendak Allah di dunia ini juga.[13]

Jadi, dapat kita simpulkan bahwa:

1. Kedaulatan semata-mata milik Allah. Status yang sebenarnya dari suatu negara Islam bukanlah kedaulatan tetapi tanggung jawab dalam bentuk kekhalifahan.

2. Tanggung jawab dan kekhalifahan melekat pada negara, individu, ummat dan tidak saling bertentangan.

Sekarang, marilah kita uraikan bagaimana dua prinsip ini bekerja sama dan bagaimana kesesuaiannya dengan sistem politik modern.

Mengatakan bahwa suatu negara Islam memiliki wewenang, kekuasaan dan kedaulatan mutlak sehubungan dengan Allah tidaklah Islami. Tetapi, tidak diragukan, negara Islam adalah berdaulat dalam kaitannya dengan negara-negara non-Islami, dalam pengertian istilah itu yang sebenarnya, karena kedaulatannya pada kenyataan sebenarnya kedaulatan (Allah) yang riil dalam bentuk kekhalifahan negara Muslim itu. Karena kedaulatan Allah itu terus-menerus dan abadi, kekhalifahan dan tanggung jawab manusia juga berkesinambungan.

Sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya, karakteristik Islam yang paling menonjol adalah tauhid yang tegas sempurna, yang telah memperkenalkan Islam sebagai suatu sistem Tauhid *(al-Nizam al-tauhidi)*. Di sini kita tidak dalam kedudukan menjelaskan bagaimana monoteisme Islam merupakan suatu ciri khas

Islam.[14] Bukan saja tauhid menyumbangkan secara langsung dinamisme Islam dan penolakan yang terus menerus serta penolakan dan pemberontakan terhadap segala rezim *thaghuuti* (pemerintahan tiranis, penindas, yang syitani), tetapi ia juga secara tidak langsung telah menyumbang kepadanya, dengan sumbangan secara langsung kepada tradisi-tradisi dan prinsip-prinsip revolusioner Islam lainnya, seperti persaudaraan Islam, universalisme, egalitarianisme, keduniaan Islam dan etika peri laku, dan dengan demikian ia menyelesaikan; yakni, mengakui Allah sebagai satu-satunya Pencipta Alam Semesta, menyamakan semua manusia sebagai makhluk-makhluk Allah, dengan satu Tuhan, satu agama dan satu entitas yang dianugerahi dengan sifat-sifat hakiki makhluk manusia yang sama, dengan status kosmik yang sama.[15] Tauhid memasukkan manusia pada suatu etika tindakan; suatu etika di mana yang pantas dan tak pantas diukur dengan tingkat keberhasilan moral dalam memperbaiki arus ruang-waktu, dalam dirinya maupun di sekelilingnya.[16] Dengan demikian, ditanamkan tanggung jawab pribadi pada setiap individu Muslim, maupun dalam masyarakat dan Ummat Islam. Ide pertanggungan jawab individu atas setiap perbuatan dan kepercayaannya; suatu prinsip yang amat penting bagi gerakan revolusioner untuk melepaskan manusia dari kebiasaan mematuhi dan menghormati otoritas yang mapan, sistim tradisional dan adat istiadat.[17] Karenanya merupakan kewajiban moral kaum Muslimin untuk melibatkan diri dalam gejolak dan perubahan penciptaan di mana dan kapan pun. Dia harus melibatkan diri dalam gelombang dan gejolak sejarah dan dari sana mengadakan perubahan yang diinginkan.[18]

Pada gilirannya ini mengarah kepada aktivisme Islam. Apa maksudnya bahwa Islam dan kaum Muslimin adalah aktivis? Artinya, individu-individu dan masyarakat kaum Muslimin bertanggung jawab bagi kebahagiaan *(Falah)*, keselamatan *(Sa'adat)* dan bagi kehidupan mereka sendiri dan urusan-urusan duniawi. 'Allah tidak merubah keadaan suatu kaum kecuali apabila mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.'[19]

Manusia membuat sejarah mereka sendiri dan secara pribadi dan sosial bertanggung jawab terhadap urusan mereka sendiri. Adalah kewajiban agama dari setiap Muslim untuk berjuang

menciptakan dan memelihara masyarakat Islam yang adil dan *Ijtihad* atau *Jihad* yang sempurna atau keduanya (inisiatif pribadi atau perjuangan kolektif).

Konsep individu yang menyeluruh dan pertanggunganjawaban kolektif, meliputi pertanggunganjawaban politik, karena kaum Muslim memiliki penjelasan hukum sebagaimana penjelasan teologis. Islam berprinsip *amr bi'l-ma'ruuf wa'n-nahy 'ani'l-munkar* (kewajiban menganjurkan, mengembangkan dan memerintahkan kebaikan dan melarang kejahatan); adalah suatu ajaran agama, moral, hukum dan politik. Dengan kata lain, karena tidak dimungkinkannya pelaksanaan Syariah sepenuhnya, terkecuali dilengkapi dengan hak politik dan berbagai kondisi sosial, maka penting sekali untuk mendirikan sistem politik Islam. Doktrin ini merupakan bagian pusat teori pemerintahan Syi'ah dan konsep politik Syi'ah, berkedudukan lebih besar daripada mazhab Sunni. Prinsip ini membenarkan, mengakui atau bahkan mewajibkan untuk memprotes dan menolak pemerintahan yang tak Islami atau anti-Islam dan rezim-rezim politik, serta menggantikannya dengan pemerintahan Islam. Nabi diriwayatkan telah bersabda: "tidak ada ketaatan (kewajiban) dalam dosa"; "Jangan mematuhi seorang makhluk yang menentang Penciptanya", oleh karena, memberikan landasan bagi ajaran Islam tentang kewajiban untuk menentang dan memberontak terhadap pemerintahan yang kotor, zalim, korup, menindas dan para penguasa yang dalam masa-masa awal mengandung makna sejarah yang amat penting (B. Lewis, *Islamic Concept of Revolution*). Prinsip ini adalah penyebab banyaknya gerakan Islam, pemberontakan dan revolusi serta merupakan dasar bagi *Syahadah*). Prinsip *amr bi'l-ma'ruuf* juga memberi tanggung jawab atas masyarakat komunitas Muslimin *(Ummah)* untuk memerangi penindasan, tirani, eksploitasi dan imperialisme pada tingkat internasional, dan dengan demikian menjadikan Islam agama orang-orang yang tertindas di seluruh dunia dan agama internasional, revolusioner yang universal. Perintah-perintah dalam al-Qur'an [20] bahwa masyarakat Muslim adalah masyarakat yang adil, yang harus memerintahkan dan mengembangkan kebaikan serta menghentikan keburukan dan kejelekan serta penindasan sebagai ciri utama dan karakteristik Islam. Al-Qur'an mengatakan: 'Hendaklah ada yang bangkit di

antara kamu suatu masyarakat yang menyeru kepada segala yang baik, memerintahkan yang hak, dan melarang yang batil, itulah masyarakat yang mencapai kebahagiaan dan keselamatan.'[21] Ayat lain berbunyi: 'Kamu adalah masyarakat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang baik dan melarang yang batil.[22] Ayat lain yang lebih relevan berbunyi: 'Mengapa kamu tidak berperang untuk Allah dan bagi orang-orang yang tertindas, laki-laki, perempuan dan anak-anak.'[24] Sebenarnya prinsip Jihad didasarkan pada prinsip *amr bi'l-ma'ruuf wa'n-nahy 'ani'l-munkar.* Dapat kita simpulkan bahwa prinsip-prinsip Islam tentang tanggung jawab sosial (barangsiapa yang bangun di pagi hari tanpa memperhatikan urusan Ummat Islam bukanlah seorang Muslim yang benar), tentang *amr bi'l-ma'ruuf,* dan tentng Jihad, semuanya telah memberikan sumbangan bagi aktivisme politik Islam dan semangat revolusioner. Umumnya kaum Muslimin tidak memisahkan urusan sekuler dan agama. Bagi mereka, persoalan politik dan pemerintahan tak dapat dihindari. Memerangi korupsi, penindasan, tirani dan eksploitasi serta kekuasaan politik didukung oleh hukum Islam, teologi dan dengan tradisi-tradisi Islam serta ayat-ayat Al-Qur'an. Pemerintahan yang curang dan kecurangan di muka bumi harus diperangi. Prinsip *amr bi'l-ma'ruuf* menduduki posisi yang sangat penting dalam Syi'ah. Seorang aktivis, politikus dan intelektual Islam Iran yang terkemuka, Mehdi Bazargan, percaya bahwa bagi Syi'ah, persoalan politik dan pemerintahan tidak dapat dihindari. Beliau percaya bahwa adalah kewajiban relijius untuk berjuang melawan kecurangan pemrintah melalui tindakan-tindakan keji, kekuasaan sekular. Lebih dari itu, tidaklah cukup memerangi kecurangan ini atas dasar individu. Yang diperlukan adalah perjuangan dan perlawanan, komunikasi, organisasi dan disiplin serta kerja sama dan persatuan.[24] Bazargan menyebutkan dan mengutip ayat-ayat al-Qur'an yang sama mengenai *amr bi'l-ma'ruuf* untuk mendukung tesisnya tentang aktivisme politik Islam. Ia mengutip ayat 'Kamu adalah masyarakat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh yang benar dan melarang yang batil.'[25] Syi'ah harus ingat bahwa dari delapan cabang praktis *(Furu')* Islam, empat yang bertalian dengan pemerintahan dan politik: *Khums* (Pajak Islam: seperlima dari pendapatan), *Jihad, amr bi'l-ma'ruuf dan terakhir adalah nahy 'ani'l-munkar.*[26] Sebenarnya salah satu di antara

saluran-saluran yang dapat menggabungkan persoalan-persoalan sosial, ekonomi dan politik ke dalam persoalan relijius adalah prinsip *amr bi'l-ma'ruuf.* Karena prinsip ini telah diperlakukan dalam banyak subjek yang beraneka ragam ilmu pengetahuan relijius *(Fiqh, Ushul Fiqh dan Akhlaq)* oleh banyak penulis terkemuka dan pengarang klasik serta ulama terkenal seperti Nasir al-Din Tusi, Allamah Hilli dan Muhaqqiq al-Hilli, tidak diragukan lagi bahwa prinsip tersebut dimaksudkan sebagai 'landasan bagi perbaikan masyarakat.'[27] Para ulama Iran kontemporer mengeluh bahwa prinsip amr bi'l-ma'ruuf telah menjadi sebuah kata klise dan sebuah konsep yang terbatas untuk orang-orang yang tidak menaruh perhatian kepada aspeknya yang berkenaan dengan perbaikan urusan sosial, politik dan ekonomi serta aspek-aspek kehidupan mereka.[28] Prinsip *amr bi'l-ma'ruuf* adalah benar-benar suatu prinsip yang menyeluruh yang di dalamnya dirumuskan tanggung jawab relijius, sosial, politik dan ekonomi. Ada prinsip Islam lainnya, di samping *amr bi'l-ma'ruuf. Syahadah, Tauhid, Khalifatullah,* dan *Riayati Ijtima'*(tanggung jawab kolektif) yang telah memberikan sumbangan kepada aktivisme Islam, revolusi dan gerakan serta dinamisme Islam. Beberapa di antaranya adalah prinsip-prinsip perjuangan demi keadilan *('Idalat)*, universalisme, persaudaraan dan egalitarianisme Islam serta aktivisme hukum (atau Ijtihad), konsep kepemimpinan Islam *(Imamat), Jihad,* nilai-nilai etika Islam seperti sikap tidak berlebih-lebihan, penghematan, pengutukan terhadap penindasan, agresi, ketamakan, kerakusan, mubazir, kemewahan, pemborosan, perjudian, riba, alkoholisme dan sebagainya, prinsip musyawarah *(Syura)*, pandangan dunia dan sejarah Islam sebagai suatu proses yang hidup, dan prinsip serta ajaran Islam lainnya yang mengandung kepentingan yang khusus. Sebagian di antaranya yang bermakna khusus bagi Syi'ah adalah prinsip *Imamah, Ijtihad, Syahadah, Walayat al-Fuqaha* atau Perwalian Ulama dan Mahdisme.

PRINSIP-PRINSIP POLITIK ISLAM

a. Kedaulatan dan hak memerintah (berkuasa dan mengatur) semata-mata milik Allah. Allah sendiri yang menguasai langit dan bumi.[29] Kebijaksanaan (*Hukum*, kekuasaan untuk memerintah

atau wewenang untuk membuat keputusan) adalah hak Allah semata.[30] *(Tauhid).*

b. Nabi dan umat Islam bertanggung jawab melaksanakan perintah-perintah Allah. Beliau memutuskan dan menjadi saksi di antara manusia sesuai dengan perintah Allah. [31] *(Risalat).*

c. Manusia adalah khalifah dan wakil Allah dengan tanggung jawab untuk mendirikan kerajaan Allah di muka bumi (Khalifah) dan manusia telah diamanati mengemban misi ini.

d. Sebagai khalifah Allah, manusia telah ditunjuk sebagai wakil untuk memelihara dan memulihkan hal-hal yang dipercayakan kepadanya (peraturan, pemerintahan) sebagai kepercayaan Allah (Amanat), kepada pemiliknya yang berhak.[32]

e. Allah mengulurkan *(Sirayat)*, Dia tidak menyerahkan *(Intiqal)* sesuatu wewenang yang terbatas kepada Nabi, para Imam dan orang-orang yang membimbing umat untuk melaksanakan perintah-perintah-Nya.[33]

f. Umat Islam dan jalan hidup Islam tak dapat dipahami tanpa hukum dan tatanan. Islam dan al-Qur'an mengutuk kekacauan dan anarki.[34]

g. Tanggung jawab menegakkan tatanan dan mengatur urusan umat Islam terletak secara langsung pada umat sebagai kewajiban relijius kolektif (Wajib Kifayah; umat bersama Imam menurut Syi'ah) dan melalui umat kepada para wakil atau wakil umat.

h. Sistem politik dan pemerintahan Islam berorientasi tujuan — kebahagiaan manusia — dan bukan kekuasaan politik, tidak dapat bertujuan untuk politik itu sendiri (politik untuk politik).

i. Islam meletakkan prinsip-prinsip dasar sistem politiknya tetapi menyerahkan bentuk pemerintahan kepada ummat Islam.

j. Politik dan pemerintahan Islam harus bersifat konsultatif (musyawarah) dan representatif[35] tetapi bentuk-bentuk musyawarah itu tidak ditentukan. Hal itu diserahkan kepada Umat Islam.

k. Sistim politik Islam berkaitan erat dengan sistim-sistim Islam lainnya, terutama Fiqih Islam, sebab semuanya berasal dari sumber yang sama serta berakar dan berlandasan dalam Syari'ah.

l. Pemerintahan Islam merupakan suatu sistim konstitusi de-

ngan prinsip-prinsip yang terdefinisi baik dalam Syariah.

Sistim politik dan pemerintahan Islam:

a. tidak mungkin bersifat diktator, sebab bertentangan dengan kedaulatan Allah.

b. bukan kekuasaan politik dan berorientasi kekuasaan, sebab manusia hanya memikul tanggung jawab.

c. bukan sekuler, sebab bertentangan dengan jiwa dan kebenaran Islam.

d. bukan semata-mata spiritual, sebab bertentangan dengan hal-hal yang bersifat ajaran keduniaan Islam.

e. bukan teokrasi, sebab tidak ada sistem kependetaan dan hirarki kependetaan dalam Islam.

f. bukan demokrasi, sebab bertentangan dengan kedaulatan Allah.

g. bukan despotik, totaliter, otokratis, sebab semua itu tidak sesuai dengan sifat musyawarah dalam sistim politik Islam.

h. bukan regional, rasial, nasional, sektorial, sebab kesemuanya bertetntangan dengan sifat universial dan jiwa Islam.

i. bukan imperialis, eksploitatif atau kolonial, sebab bertentangan dengan sifat keagamaan dan jiwa sistim politik Islam.[36]

j. bukan opresif, agresif dan tiranis, sebab Al-Qur'an dengan tegas melarangnya.[37]

BAB 3
PENGABSAHAN GERAKAN ISLAM DALAM KETENTUAN SOSIO-EKONOMI

Bagaimanapun, Islam dan Nabinya Muhammad saw berhasil dengan cara yang sama. Nabi adalah seorang manusia yang dipercayai. Inilah kenapa beliau dikenal sebagai Amin. Islam merupakan tantangan yang sebenarnya terhadap sosio-politik-ekonomi maupun kondisi-kondisi spiritual dunia, dan satu-satunya jawaban terhadap aneka permasalahan pada saat kemunculannya, dan nabi adalah pemimpin yang diharap-harapkan. Serupa halnya dengan empat belas abad kemudian di Iran. Peranan Islam dan Nabinya pada waktu itu adalah peran revolusi yang menentang imperialisme Barat dan Timur di masa itu, serupa halnya dengan peranan Islam dan Khomeini, sebagai seorang Muslim sejati pengikut Nabi, adalah peran revolusioner menentang imperialisme Barat dan Timur kontemporer. Kesamaan dalam pesan, kepemimpinan, suasana dan sebagainya, telah menjadi sumber aspirasi bagi kaum Muslimin di Iran dan di bagian-bagian dunia Muslim lainnya. Islam memberikan jawaban terhadap persoalan politik kekuasaan zaman itu sebagaimana yang telah dilakukannya di Iran dewasa ini. Kaum Muslimin, termasuk orang-orang Iran, telah memiliki warisan budaya ini selama empat belas abad, dan karenanya tidaklah sulit untuk mengenal Revolusi Islam abad kedua puluh mereka dengan model yang telah mereka miliki dalam hati nurani mereka selama empat belas abad. Mungkin terlalu sulit bagi non-Muslim untuk menilai hal ini, dan oleh kare-

nanya susah payah mereka menerangkan Revolusi Islam di Iran dalam istilah sosio-ekonomi semata-mata, namun tidak demikian bagi kaum Muslimin.

Menarik untuk diketahui bahwa media berita dan para analis kapitalis serta media berita Sosialis dan agen-agen lokal mereka menggunakan dalil-dalil yang kurang lebih sama untuk menerangkan Revolusi Islam. Percayalah bahwa itu bukan Revolusi Islam.

Meskipun terdapat perbedaan antara kedua kubu itu, mereka hendak membuat kita percaya bahwa Revolusi itu adalah suatu revolusi sosio-ekonomi. Mereka mencoba membuat kita percaya bahwa itu bukan Revolusi Islam.

Pravda dan *New York Time* membenarkan Revolusi Islam dalam acuan sosio-ekonomi.

Kita tahu bahwa seorang analis akan mendapatkan kesulitan dengan contoh kejadian di mana Time berbeda dengan kebijakan luar negeri pemerintah Amerika atau *Pravda* berbeda dengan kebijakan luar negeri pemerintah Soviet. Kita tahu bahwa *Time* setia kepada Paman Sam sebagaimana *Pravda* setia kepada si Beruang Besar. Yang mengejutkan adalah bahwa dalam berurusan dengan Revolusi Islam, pemerintah Amerika dan Soviet serta *Time* dan *Pravda* memberikan keterangan yang sama. "Jika anda membaca artikel-artikel dan komentar-komentar yang muncul dalam *Pravda,* anda akan melihat bahwa nada dan isinya sangat identik dengan yang ada dalam *New York Time.*[1] Sekarang mari kita lihat bagaimana *Time* menilai Revolusi Islam dan dapat kita simpulkan bahwa itu tepat sebagaimana *Pravda* menilainya. *Time* menyuguhkan kepada kita apa yang dianggap sebagai analisa dari proses yang mengarah kepada jatuhnya Syah. Berbagai kecurangan, Westernisasi dan berbagai kondisi sosio-ekonomi terlihat sebagai penyebab. Inilah yang hendak disajikan kepada kita oleh *Pravda.* Mesin-mesin *Time* maupun *Pravda* tidak pernah istirahat untuk menggambarkan bahwa sebab-sebab ini juga ada di banyak negara lainnya, tetapi mereka tidak mngadakan revolusi. Islam, jiwa revolusioner Islam, kepemimpinan Revolusi, kandungan Islam, cara-cara pendekatannya, ribuan syuhada Muslim, gerakan Islam yang berkesinambungan dan semua faktor

Islam tidak digambarkan, tidak muncul dalam *Time,* juga tidak dalam "Opera Sabun Pravda". Sebagai gantinya, kedua sistem itu, yakni sistem dan empirium media berita masing-masing menerangkan Revolusi itu semata-mata dalam acuan sosio-ekonomi dan mengharapkan kita percaya bahwa Islam absen dalam Revolusi itu.

Jawaban yang kedua terhadap orang-orang yang mencoba menerangkan revolusi hanya dalam istilah sosio-ekonomi terletak pada pemahaman mereka terhadap agama yang didasarkan pada kemerosotannya menjadi keimanan pribadi semata-mata. Islam memperlakukan persoalan sosio-ekonomi sebagai bagian dari risalah aktualnya. Ia tidak meninggalkannya di luar lingkungan agama. Orang-orang yang mencoba menemukan keabsahan revolusi dalam istilah sosio-ekonomi semata-mata adalah para materialis dan harus melihat segala sesuatu dengan warna ini, atau orang-orang yang mengadopsi pendekatan Barat terhadap agama dan memperlakukan Islam dengan cara yang sama seperti, misalnya, memperlakukan Kristen. Suatu revolusi Islam dan pemimpin Muslim revolusioner harus dinilai dari sudut pandangan Islam. Keabsahannya harus dijelaskan dalam istilah prinsip-prinsip yang hakiki dan konsep-konsep risalah Islam. Kesalahan konsep mengenai risalah ini dan prinsip-prinsipnya menyebabkan salah paham meliputi Revolusi Islam di Iran. Pembaca Barat yang tidak mengenal Islam, akan menerangkan gerakan-gerakan Islam dalam istilah yang tidak Islami, jika dia tulus, dan dalam istilah-istilah anti-Islam jika dia berprasangka. Batu penjuru pemahaman Islam adalah pemahaman akan doktrin Tauhid, di mana non-Muslim, khususnya bagi para pembaca Barat, bukan hanya tidak mengenal, tetapi sulit untuk memahaminya. Berdasarkan doktrin ini adalah konsep tentang kesatuan hidup dalam Islam. "Apabila segala sesuatu diisi dalam keesaan Allah — alam dengan keserbaragamannya dan manusia dengan banyak aspeknya — tidak secuil pun, apakah itu berada pada tingkat perorangan atau dalam fungsinya di masyarakat, yang tidak termasuk ke dalamnya. Tidak mungkin spiritual terpisah dari duniawi. Tidak ada pemisahan antara negara dan relijius, suci dan kotor, awam dan ulama, umum dan pribadi, nasional dan internasional; semua bentuk pemecahan tersebut dengan tegas ditolak Islam" [2]

Islam telah didefinisikan sebagai "iman, ikrar keimanan, da amal."

Islam adalah agama iman dan amal, tidak hanya yang sat atau yang lain. Nabinya juga menyampaikan risalah Islam tida dengan kata-kata saja, tetapi melalui tindakan-tindakan dalan kehidupannya. Dalam kehidupan dan misinya, perkataan da perbuatannya, politik dan agamanya, material dan spiritualnya ekonomi dan ritualnya, terlarut dalam suatu kesatuan tungga tinggi, yang momen kesempurnaannya tak terbatas dan mulia Sebuah negara teladan yang mencerminkan kesatuan pemikirar dan tujuan, yang di dalamnya hukum-hukum dan prinsip-prinsip yang sama menguasai segala segi kehidupan didirikan. Keesaar Allah (Tauhid) mencakup semua kesatuan lainnya dan inilah yang merupakan keunikan risalah Islam.[3] Jadi, Islam lahir dengan cir yang unik dari pelarutan dan agamawi serta dengan suatu pendekatan yang jelas terhadap berbagai urusan sosial ekonomi serta dengan sistem dan struktur politik yang terpadu dengan baik. Islam — tidak seperti Kristen — tidak mengakui adanya demarkasi antara yang spiritual dan duniawi. Di jalankannya urusan politik, sosial dan ekonomi sama dengan tanggung jawab relijius sebagaimana menjalankan ibadah. Tujuan keduanya adalah sama, yakni mengenal Allah. Tidak seperti Kristen yang menghasilkan pemisahan yang tak dapat diganggu gugat antara Gereja dan negara, Islam percaya dalam kesatuan hidup yang tak dapat diganggu gugat, dan ide inilah, lebih dari apa pun, yang membedakan pemikiran Islam dari setiap ideologi lainnya.[4] Seorang Muslim melihat kehidupan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi ke dalam segmen-segmen atau kotak-kotak. Prinsip yang sama, yang meliputi kehidupan manusia dan mengatur segala aktivitasnya, tanpa peduli apakah kegiatan itu dapat dinamakan sebagai temporal atau spiritual, umum atau pribadi. Konsep ibadah dalam Islam sangat inklusif. Seluruh kehidupan manusia dapat dipandang sebagai ibadah. Barat tidak dapat menerima ide ini. Dari sini timbul salahpahamnya terhadap Islam dan akibat segala apa saja mengenai Islam, termasuk gerakan-gerakan Islam dan Revolusi Islam di Iran.

Pokok lain yang disebutkan di sini yakni, Imam Khomeini bukanlah pencipta revolusi itu. Dia pemimpin. Pencipta revolusi itu

adalah Islam. Khomeini adalah pengejawantahan Islam dan seorang Muslim yang sejati. Jadi, kami tidak mendiskreditkan Imam Khomeini dengan mengatakan bahwa pemikiran politiknya tidak unik dan juga tidak orisinil,[5] tetapi adalah bagi kreditnya bahwa pemikirannya mencerminkan Islam empat belas abad lalu dan tradisi sosial Islam serta pemikiran politik pada umumnya, khususnya pemikiran politik Syi'ah, dan teristimewa penerapan tradisi intelektual ini kepada analisis permasalahan politik dan sosial Iran. Imam Khomeini sendiri selalu menjelaskan bahwa ia hanyalah seorang siswa Islam yang sederhana dan seorang hamba Allah.[6] "Saya lebih suka disebut hamba Allah daripada pemimpin umat."

Oleh karena itu bukanlah pendekatan ilmiah yang sehat untuk mengatributkan fenomena kompleks seperti revolusi kepada hanya satu dari berbagai faktor — faktor sosio-ekonomi — dan meninggalkan semua faktor lain; sebaliknya, Islam adalah payung yang meliputi semua faktor yang lainnya itu. Jadi, adalah lebih ilmiah untuk mendapatkan keabsahan revolusi dalam Islam sendiri, kemudian mengakui peran dari setiap faktor dalam sorotan pandangan Islam. Kaum materialis modern atau materialis dialektis yang menerangkan segala sesuatunya secara ekslusif dalam istilah sosio-ekonomi tidak jauh berbeda dengan orang-orang zaman dulu yang membagi kehidupan ke dalam dua kotak terpisah — agamawi dan duniawi. Mereka dibenarkan untuk menjelaskan berbagai revolusi di negeri Kristen dengan cara ini, karena Kristen telah memasang baji antara orang-orang yang memilih salah satu di antara keduanya. Inilah mengapa jenis analisa kritik ini telah menjadi suatu mode. Tetapi mereka tidak semestinya memperlakukan suatu revolusi Islam dengan cara yang sama. Revolusi Islam di Iran adalah yang pertama dari jenisnya dan harus didekati atas landasan dan hak-haknya sendiri, dan tidak secara ekslusif membandingkannya dengan revolusi-revolusi oleh orang-orang non-Muslim. Bahkan ia tidak dapat diperlakukan dengan membandingkannya dengan suatu revolusi Kristen hipotetis atau dengan revolusi di negara-negara Kristen. Seorang materialis dialektis modern seperti seorang Kristen, dipaksa oleh dikotomi untuk memilih antara negara dan agama, antara pendekatan sosio-ekonomi dan pendekatan spiritual. Oleh karenanya, mereka hanya

memandang dari satu segi saja dan ekstrimisme serta melihat se gala sesuatunya secara hitam dan putih. Tidak seorang materialis dialektis pun, juga tidak seorang Kristen pun yang memenuh syarat untuk menganalisa revolusi Islam secara ekslusif dari sudu pandang ideologi mereka. Revolusi Islam harus difahami, didekat dan dianalisa sebagaimana kaum Muslimin, orang-orang Muslim Iran yang sudah merasakannya memahami, mendekati dan menganalisanya. Ia harus diperlakukan dengan cara yang Islami, dalam konteks dan kerangka yang sepenuhnya berbeda dari materialis dan Kristen. Islam percaya akan integrasi penuh antara bidang kehidupan spiritual dan temporal, suatu prinsip yang seluruhnya asing bagi orang yang sepenuhnya materialis maupun yang spiritualis. Integrasi ini bahkan lebih terterap dalam Syi'ah di mana prinsip Ijtihad digunakan secara terus-menerus sebagai pendekatan bagi penyelesaian permasalahan dalam urusan sehari-hari di antara individu-individu dan umat, dan karenanya nilai-nilai intelektual teoritis Islam, dan hasil penyelidikan disalurkan secara langsung kepada masyarakat melalui pusat peranan Ulama dan Masjid. Jadi, para Mujtahid terkait erat dengan berbagai masalah dan penderitaan masyarakatnya, menjadikan pemikiran Islam relevan dan hidup seerat mungkin dengan masyarakat.

Atas dasar Ijtihad, kaitan yang erat antara ummat dan Ulama di satu sisi dan hubungan yang rapat antara berbagai urusan duniawi dan spiritual serta berbagai wewenang di lain sisi, maka Syi'ah menjadikannya sebagai tanggung jawab masyarakat untuk membawa persoalan mereka sehari-hari kepada ulama untuk diselesaikan, dan menjadikan tanggung jawab ulama terlibat dalam proses penyelesaian masalah sehari-hari. Sebuah diktum menyatakan, "Bawalah permasalahan sehari-harimu kepada mereka yang mengetahui pendapat kami (Imam)."

Pola dan model hidup yang diletakkan Nabi bagi Ulama dan masyarakat, membenarkan ini. Beliau pada zamannya adalah seorang revolusioner. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Kami membedakan mereka dari para reformator biasa dan para revolusioner sekular dengan kualitas dan tingkat keprihatinan mereka untuk urusan-urusan komunitas mereka dan tingkat perubahan yang mereka timbulkan dalam tatanan sosial, dan sarana moral yang mereka ambil. Telah diketahui dengan baik, bahwa Nabi

ikenal sebagai "orang jujur dan amanah" (Amin), bahkan sebe-
ım kenabiannya. Namun wahyu mendasar yang diucapkannya
ıenghasilakn kekaguman pada pengikut-pengikutnya. Wahyu
ıeliputi hal finansial maupun moral, fisik dan psikologis, material
an spiritual. Umatnya bersedia menjadikan beliau seorang raja
ıereka, jika beliau melepaskan sebagian dari wahyu yang hendak
eliau sampaikan. ●

BAB 4
PENGABSAHAN GERAKAN ISLAM DIPANDANG DARI SEGI MORAL

Revolusi Islam di Iran sebagai satu dari serangkaian mat rantai gerakan Islam sedunia yang berkesinambungan, men dapatkan keabsahannya dalam ideologi Islam yang aktual da dalam Islam itu sendiri sebagai suatu sistem peri laku agama sebagai jalan hidup yang mengkombinasikan tindakan (amal serta niat serta iman. "Tidak seperti Kristen Augustinius dar Luther" yang menjadikan keselamatan suatu fungsi dari iman dar memberikan sedikit atau tiada nilai untuk kerja, Islam memberikar kepada pengakuan iman, nilai suatu kondisi, hanya suatu kondisi Tidak seperti tindakan keimanan dalam Kristen, yang pribadi dar rahasia, kerja adalah umum.[1] Al-Qur'an dengan jelas menyatakar bahwa manusia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali yang telah dia usahakan.[2] Dalam Islam, kerja mendapat pahala dar Allah.[3] Etika Islam mengakui dunia secara menyeluruh, positif, dari dunia dan dikuasai oleh hukum publik.[4] Islam menyatakan dirinya sebagai agama fitrah bagi manusia alamiah. Oleh karena itu ia harus mempertimbangkan totalitas kehidupan manusia secara sempurna dan lengkap. Islam tidak dapat meninggalkan kebutuhan-kebutuhan sosio-politik-ekonomi manusia dan hanya mempertimbangkan sebagian kebutuhan manusia. Islam telah menetapkan kehendak Allah, norma-norma peri laku manusia dan tujuan-tujuan naluri manusia, dipandang dari segi nilai yang kemasyarakatan. Ummah, atau masyarakat Islam, dengan de-

mikian adalah suatu syarat sin qua non penting, dan sangat diperlukan serta tidak boleh tidak apabila kaum Muslimin ingin mencapai keridhaan Ilahi[5] Kebutuhan masyarakat ini berasal sebagian dari peneguhan dunia Islam, sebagian dari penegasannya bahwa etika lebih memperhatikan amal dan niat. Kedua pertimbangan ini menghendaki kaum Muslimin untuk melibatkan dirinya dalam kesesatan jaringan masyarakat itu, dan mengecilkan hati masyarakat — bukan, mengutuk *individualisme dan isolasionisme.*[6] Islam mengutuk monastisisme (paham kebiarawan) sebagai bid'ah yang patut disayangkan dari sebagian kaum Nasrani.[7] Islam menuntut kehidupan Islami berlaku di tengah kehidupan desa, kota, negara dan masyarakat yang kasar dan kacau. Lagi pula, ummah bukanlah suatu badan mistik, melainkan konkrit, nyata dan politis, badan yang tidak dapat dipraktekkan kecuali dalam keterbukaan dan di bawah mata awas hukum serta lembaga masyarakat melalui partisipasi dan kontribusi. Si Muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban relijius dan tanggung-jawabnya secara penuh, kecuali dia hidup dalam komunitas Muslim, yang harus didirikan. Masyarakat Muslim tidak dapat berdiam diri hingga semua orang telah memenangkan kehendak Ilahi sejauh kemampuan pribadi mereka; sampai setiap inci tanah ciptaan telah ditranformasikan melalui usaha mereka ke dalam aktualisasi pola Ilahi selengkap mungkin. Jadi, Muslim sejati adalah manusia aktif dan dengan begitu masyarakat Muslim adalah badan universalis. Jadi, si Muslim adalah misioner, wali dan pekerja dunia. Dia tidak hanya menyeru manusia akan Allah, tetapi membawa mereka ke sana jika mereka kantuk, karena tujuan hidupnya adalah membawa mereka ke sana.[8] Ali, Imam pertama, sangat sewot dan marah pada dirinya ketika mereka mengabarinya bahwa sebuah gelang kaki telah diambil dari seorang wanita non-Muslim dengan paksa di wilayah tanggung-jawabnya. Jadi, kaum Muslimin diperlukan untuk berpartisipasi menegakkan masyarakat Muslim dan urusan-urusannya serta umat Islam diharapkan berpartisipasi dalam masyarakat manusia dan berbagai urusannya.

Islam memasuki dunia politik dan bidang politik melalui gerbang utama. Nabi melihat itu sebagai tanggung-jawabnya bagi penyebaran risalah Allah dan untuk melihat bahwa risalah itu, telah dilaksanakan dengan mendirikan masyarakt Islam dan

meminta kaum Muslimin untuk berpartisipasi dalam berbagai urusan mereka dan urusan ummat. Islam tidak mengkhotbahkan moral abstrak dan tidak menyuruh manusia berfikir dalam kekosongan politik. Nabi menyampaikan risalah tidak dengan kata-kata saja tetapi juga dengan amal. Si Muslim juga harus melaksanakan tanggung-jawabnya melalui iman, penderitaan, pengorbanan, partispasi aktif dan berbagai aktivitas sosio-politik dan dengan perkataan dan perbuatan, pemikiran dan tujuan. Nabi mendirikan sebuah model negara dan masyrakat. Kesatuan kata dan perbuatan, pemikiran dan tujuan, iman dan amal, agama dan politik, dan seterusnya, yang merupakan keunikan risalah Islam.

Agama Kristen memasuki politik melalui pintu belakang. Ia tumbuh ke dalam suatu negara besar dan kuat (atau bukannya menantang mereka, seperti Islam, ia menyesuaikan diri ke dalam negara yang kuat) — Kekaisaran Romawi. Kaum Nasrani awal hidup berdampingan dengan tatanan sosial dan struktur politik mapan yang akhirnya mereka sokong. Gereja "didirikan" dalam suatu emperium di bawah Konstantin pada tahun 312. Ia kemudian menjadi bagian dari emperium itu dan yang dilindunginya, tetapi tidak pernah lebih daripada partner yang tak imbang yang dapat dimanfaatkan dan disalahgunakan ketika dituntut keadaan. Kristen dan para pemimpinnya yang dipaksa untuk mengakui urgensi situasi tersebut, melihat perlunya memaklumatkan manfaatnya hubungan seperti itu, dan karenanya membenarkan bagian yang dimainkan oleh negara dalam program ilahi dan puas dengan peranan yang diberikan kepada mereka oleh negara dan para kaisar. Gereja dan negara adalah dua entitas yang berbeda. Hubungan mereka dapat disimpulkan dengan mengatakan bahwa mereka seolah digambarkan sebagai suatu masyarakat yang saling menolong dan menyenangkan: negara untuk memerintah, menertibkan dan melindungi, gereja untuk mendukungnya. Gereja dilahirkan di dalam kekuasaan, wewenang, dan pemerintahan dan oleh karenanya menerima *"de facto"*, politik, undang-undang peraturan dan kekuasaan. Pembagian peranan negara dan gereja menyeret pada dua batas wilayah pengaruh dan aktivitas. Gereja melayani aspek-aspek spiritual kehidupan manusia, negara akan menangani urusan duniawi. Sesuai dengan spesifikasi tugas ini, gereja tidak menangani urusan politik, sosial atau ekonomi. Gereja

dak pernah dan bukan mengenai Dunia, walaupun mungkin Gereja berada di Dunia. Yurisdiksinya terbatas pada dunianya endiri, yang mana kristen telah dipisahkan secara tegas dari unia Caesar, dunia sekular. Pernyataan Paul "apa saja yang ukan iman adalah Dosa", telah dipahami selama sembilan belas bad sebagai bermakna bahwa segala sesuatu yang lain dari gama, dunia — adalah dosa. Perkembangan gereja dan negara kemudian hari membatasi kembali bidang spiritual secara lebih empit dan menyeret pada pemisahan final keduanya yang tak apat dibatalkan lagi. Pembagian terakhir keduanya telah menimbulkan konsekuensi yang jauh, hal mana kesetiaan manusia rbagi dan terbelah antara dua kewajiban. Penyebaran peradaban, ebudayaan dan pemikiran Barat menumbuhkan tradisi Kristen ini dikotomi antara agama dan politik) di dalam masyarakat dan udaya lainnya. Posisi agama lain menyangkut butir ini diartikan enurut prinsip Kristen Barat ini. Islam dan kaum Muslimin juga ikira berfikir dan bertindak menurut itu. Tetapi Islam lahir untuk enentang kekuatan Romawi dan Persia. Ia menolak peraturan an wewenang "de facto" justru sejak dini. Ia menggantikan asifisme politik dengan militansi politik dan revolusi, dan dengan emikian memperkenalkan sistem politik *"de jure"*.

Ia menekankan kesatuan hidup fundamental dan inilah gagasan, lebih daripada yang lain, yang membedakan Islam dari gama lain serta membedakan pemikiran Islam dari ideologi anapun.[9]

Dalam beberapa hal posisi Islam dan kaum Muslimin sehubungan dengan kekuatan-kekuatan asing, adalah sama dengan saat angkitnya Islam; Islam menentang kekuatan-kekuatan itu dan enjagokan kaum tertindas, dengan perbedaan ini bahwa dewasa ini terdapat berbagai kekuatan tak Islami berada di atas ngin dan kendati negeri-negeri Muslimin berpemerintahan sendiri, amun sama sekali berarti tidak merdeka. Negeri-negeri kaum uslimin tidak dapat menjalankan kemerdekaan penuh karena ereka tidak secara sungguh-sungguh dan penuh sadar akan udaya dan ideologi Islam mereka, serta tidak sanggup menata dup mereka di jalan Islam, disebabkan mereka tidak benarenar dan sungguh-sungguh bebas. Lingkaran keji ini telah diatahkan -untuk pertama kalinya dalam sejarah kolonial dan neo-

kolonialisme oleh Revolusi Islam di Iran pimpinan Ayatullah Imam Khomeini, karenanya Barat kepala batu itu menolak untuk mengakui sifat, sasaran dan watak Islamnya serta kehendak mereka malah menerimanya sebagai sebuah revolusi sosio-ekonomi. Ini juga menjelaskan pendirian teguh dan tegas Khomeini untuk melahirkan hanya sistem politik Islam dengan hanya watak Islam dan sikap pantang menyerahnya melawan segala bentuk tak Islami, apalagi yang anti-Islam. Beliau berkata "Kami juga tahu bahwa dalam sistem republik, semua orang memberikan suara (vote) . Tetapi kita tidak menambahkan kata sifat (adjective) demokratis kepada Republik Islam, karena ia merupakan sebuah penghinaan kepada Islam. Jika kata demokratis diletakkan berdampingan dengan Islam, ia menyatakan secara tidak langsung bahwa Islam tidak demokratis terhadap dirinya, padahal bentuk demokrasi yang tertinggi maujud dalam Islam. Maka rakyat kita menyetujui nama "Republik Islam Iran" (hanya Islam tanpa kata sifat) sebagai nama baru bagi sistem dimaksud."[10]

PRINSIP MORAL GERAKAN ISLAM

Moral Islam, sebagaimana sistem Islam lainnya, diperoleh dari konsep Islam tentang Tauhid. Diajukan bahwa sistem moral Islam, sebagaimana sistem politik Islam, didasarkan pada ajaran kedaulatan Allah yang mutlak. Semua manusia adalah hamba-hamba-Nya dan dengan begitu hanya Dia sendiri yang harus disembah dan ditaati. Dia sendirilah yang mengendalikan manusia. Semua manusia bertanggung jawab hanya kepada-Nya dan akan dihadirkan di hadapan-Nya pada Hari Pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka dalam hidup ini dan bagi segala sesuatu yang telah mereka kerjakan.[11] Jadi Islam, pendek kata, berarti pembebasan dari segala macam perbudakan, penundukan, dan kediktatoran. Ini berarti kebebasan mutlak manusia dari segala bentuk rasa takut dan penindasan. Tidak ada dan tidak seorang pun yang dapat mencabut dari kemuliaan, kebanggaan, kemerdekaan, kehormatannya, dan seterusnya. Dia dibebaskan dari nafsu, kesenangan sensual, prasangka, takhyul, dan kekuasaan serta otoritas duniawi. Dia dilahirkan benar-benar bebas dalam arti kata bebas yang sebenarnya, karena baginya kekuasaan hanya pada Allah sendiri. Ia yang menilai kemerdekaan,

kebebasan, kebanggaan dan kemuliaannya dan tidak seorang pun yang sanggup membatasi, menahan kemerdekaan dan memaksakan kehendaknya kepadanya. Dia benar-benar dibebaskan oleh akidahnya. Oleh karenanya, dia terikat untuk memberontak melawan segala kuasa duniawi, rasa takut, dan apa saja atau siapa pun yang mungkin menggiringnya keperbudakan: Seorang Muslim Muwahid menemukan dirinya di atas segala-segalanya, karena dia hanya di Allah. Dia tahu bahwa semua manusia seperti dirinya dan tak lebih dari itu, serta tak berdaya atau sekuat yang dikiranya dan kena tak kurang dari sasaran kehendak, kekuasaan dan wewenang Allah Yang Mahakuasa. Kemuliaan, kebanggaan dan kemerdekaan adalah hak yang sangat alamiah dan mendasar tiap Muslim yang diberikan Allah dan oleh karenanya sangat mulia. Haknya untuk berperang dan berjuang melawan penindasan, tirani dan kediktatoran adalah bagian dari akidah dan imannya, dan bukan hanya hak tetapi juga kewajiban relijius. Kaum Muslimin tidak hanya wajib membebaskan diri dari segala bentuk kediktatoran, tetapi harus juga merasa komited untuk membebaskan manusia dari segala jenis penindasan. Sistem politik dan negara Islam tidak hanya akan membebaskan warganya dari segala tirani di negeranya sendiri, tetapi akan melindungi kemerdekaan mereka terhadap segala agresi dan kediktatoran dari luar. Lebih dari itu, negara dan masyarakat Islam diperintahkan Islam untuk menolong non-Muslim, dan seluruh manusia untuk membebaskan diri dari penindasan. Mereka diminta untuk berjuang dan memerangi tirani dan penindasan di tingkat dunia.[12] Islam memandang manusia sebagai khalifah Allah dan tidak dapat mentolelir degradasi dan ketundukannya kepada imperialisme dan kapitalisme dalam aneka bentuknya. Islam tidak dapat mentolerir kesengsaraan dan kepasrahan manusia kepada kediktatoran, monarki, kediktatoran terhadap golongan kecil, kediktatoran partai, kediktatoran terhadap golongan mayoritas, kediktatoran kelas atau ras dalam segala bentuknya. "Masih ada kelas lain para diktator yang berkuasa dengan pedang, merampas kebebasan masyarakat dan mengklaim bahwa mereka hanyalah alat dalam melaksanakan kehendak rakyat atau proletar.[13] Islam adalah jalan nyata menuju kemerdekaan dan kebebasan. Ia adalah agama yang menjadikan perjuangan melawan penindasan dan tirani, perang untuk kemerdekaan, kebebasan, kemuliaan

manusia dan bagi hak-hak perang sucinya dan memandangnya sebagai bagian dari prinsip Islam yang paling fundamental (ajaran Tauhid). Aspek negatif dari ajaran Tauhid tak kurang pentingnya dari aspek positifnya. Keduanya yang sesungguhnya sama penyerahannya kepada Allah, menolak juga untuk tunduk kepada segala sesuatu yang lain. Islam adalah jalan ke kemerdekaan yang riil, jalan yang tidak mengizinkan perbudakan, yang menjanjikan kemerdekaan dan kemerdekaan berpikir, ideologi, amal, hak milik dan agama, pada semua manusia, dengan penuh waspada melindungi integritas mereka, seperti kemuliaan dan bahkan menganjurkan berjuang dan berperang melawan segala ancaman kemerdekaan dan kebebasan. Bagi kaum Muslimin, konsep seperti kemerdekaan, kebebasan dan keadilan adalah lebih daripada hanya sekedar prinsip politik, sosial atau moral. Semuanya adalah prinsip spiritual dan ideologis sejati dan oleh karenanya layak untuk berperang dan mati demi itu. Konsep-konsepnya juga memiliki dimensi yang lebih lebar, lebih luas dan lebih dalam daripada konsep-konsep dalam sistem sekuler.

Di samping itu, dengan memberikan konsep yang agung dan mulia tentang manusia sebagai wakil Allah (Khalifah) yanda pada gilirannya menjadikan manusia berontak melawan segala penghinaan, perbudakan dan usaha penindasan. Islam juga membebaskan manusia dari nafsu, termasuk nafsu duniaei, yang justru karena kelemahan inilah manusia dieksploitir oleh kolonialisme baru dan oleh para tiran serta diktator, secara sengaja atau malah dalam memperbudak sesama manusia. Tetapi lantaran itulah, tidak seorang manusia pun bakal diam menerima perbudakan dengan diam terhadap manusia seperti dirinya atau ongkong-ongkong menyaksikan tirani murka dan lancang, tidak berani menantangny. Adalah anugerah besar Islam, bahwa ia mengajarkan manusia lebih baik berperang dan menentang tirani dan penindasan dengan berani daripada merasa ngeri di hadapan mereka bak budak hina. Al-Qur'an mengatakan: "Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu atau kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah huni yang kamu senangi — lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya atau berjihad di jalan-Nya — maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya: dan Allah tidak memberi

petunjuk kepada orang-orang yang fasik".[14] Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Apa saja yang ada di dunia ini adalah untuk manusia dan untuk mengabdi kepada-Nya. Dia harus menjadi tuan. Dia seyogianya tidak membiarkan dirinya dijadikan budak terhadap ini, sebaliknya dia harus menggunakannya sebagai alat bagi tujuan yang mulia. Dia harus tetap dapat menguasai nafsu konsumsi, kemewahan, pemborosan dan cara-cara lainnya yang menghinakannya. Kaum Muslimin harus menentang dan berperang melawan anarki moral dan budaya serta eksploitasi. Berbagai kesenangan sensual tidak harus menggoda dan merusaknya.[15] Korupsi, kesenangan sensual, mabuk, keserbabolehan, judi, klub malam, berbagai aktivitas sosial yang berbaur antara pria dan wanita, film-film buruk, aborsi, perzinahan dan maksiat, kumpul kebo buku cabul, pemborosan, mubazir, sombong, rakus, ideologi asing (kapitalisme, komunisme, nasionalisme, liberalisme, sekularisme, dan sebagainya . atau segala yang diilhami Barat atau Timur) yang kesemuanya telah digunakan pada abad pertengahan dan zaman sekarang sebagai dalih bagi kolonialisme, dominasi, eksploitasi, dan imperialisme. Mereka harus diperangi sebagai anti-Islam, dan sebagai dalih untuk memaksakan dominasi asing. Dengan begitu, revolusi moral-budaya Islam dan berontak terhadap rezim-rezim yang korup moral. ●

BAB 5
KONSEP IBADAH SEBAGAI SUATU PRINSIP GERAKAN ISLAM

Penjelasan lain bagi aktivisme dan semangat revolusioner Islam dalam acuan kesatuan agama dan politik Islam diajukan sebagai berikut. Manusia adalah penyembah naluriah, kendati watak penyembahan dewa atau cara menyembahnya berbeda. Cinta Allah bercokol dalam hati tiap orang. Makhluk-makhluk sebagai wujud yang diciptakan harus tunduk kepada pencipta mereka. Jadi, semua makhluk termasuk Manusia adalah Muslimin (para penyerah diri) dan yang harus mematuhi hukum-hukum ciptaan.[1] Berpendirian bahwa Allah tuhan alamiah yang wajar untuk disembah oleh manusia alamiah, al-Qur'an menjelaskan jalan yang tepat untuk menyembah-Nya. Ia menetapkan keseragaman ibadah sebagaimana ia menekankan keesaan Allah; kesatuan yang disembah dan kesatuan ibadah. Harus ada kesatuan antara ibadah manusia dan sikapnya terhadap hidup. Tuhan yang dituju manusia dalam shalat dan pengabdiannya adalah Tuhan yang sama yang dituju sewaktu belajar, mencari nafkah, memperbaiki keadaan hidup di bumi, makan, minum, bersetubuh, sebagaimana ketika berkomunikasi dengan keluarganya, dengan orang, masyarakat, rakyat dan negara lain, apakah saat damai atau perang. "Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam."[2] Dalam segala yang ia lakukan, pengulangan terus-menerus akan nama Allah di dalam hatinya memiliki efek praktis terhadap

panggilan kepada perintah-perintah-Nya, sehingga dia dapat mematuhi perintah-perintah tersebut. Dalam Islam, perintah-perintah Allah menyangkut segala masalah serupa ini dan memadai yang halal sebagaimana yang haram.

Ketika ini terjadi, sesuatu yang cukup berarti terjadi dalam hidup manusia. Untuk memulainya, manusia akan beribadat kepada Penciptanya. Manusia tidak akan pernah menghayati Allah yang seharusnya bila ia menyembah-Nya dalam shalat hanya sekali dalam sehari dan menganggap ini sebagai akhir dari ibadahnya. Allah berfirman "Aku ciptakan jin dan manusia supaya mereka meyembah-Ku"[3] artinya ibadah memiliki banyak hal yang terdiri dari shalat dan pengabdian, hidup dan mati. Melakukan yang sebaliknya berarti menyembah dua tuhan, satu di tempat suci melalui shalat dan pengabdian, yang lain (atau yang lain-lain), kendati pada akhirnya mencapai puncak yang satu, melalui ketaatan dalam berbagai urusan keseharian. "Allah berfirman: Janganlah memilih dua tuhan; sesungguhnya Dialah Tuhan Yang Mahaesa, maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut'.[4]

Keseragaman ibadah selama hidup manusia dan kesatuan sasaran ibadahnya (yang disembah: Allah) melengkapi manusia dengan semangat revolusionernya. Manusia harus berontak melawan tuhan-tuhan palsu yang merampas hak Tuhan yang benar dan keseragaman ibadah membuatnya berontak melawan segala bentuk pemerintahan sekuler karena dia melihat seluruh hidup sebagai mata rantai ibadah terus-menerus. Kesatuan sasaran dan keseragaman ibadah memberikan pada manusia, pertama-tama, rasa tentram yang mustahil ditemukan di luar kerangka iman.

Ketentraman ini bukan kesenangan bertawwakal pada berbagai masalah. Agaknya ini merupakan pencarian hidup yang baik di mana pun dapat ditemukan, Jihad atas nama Allah untuk menegakkan keadilan Allah di muka bumi; perlawanan terhadap segala bentuk kebencian tidak adil kepada Allah.[5]

Pembrontakan melawan penindasan dan tirani, perjuangan melawan dominasi, permainan kekuasaan, korupsi, kediktatoran dan segala bentuk pemerintahan sekuler, mencari dan berjuang mendirikan Kerajaan Allah di muka bumi. Dalam segala bentuk aktivitas ini kaum Muslimin, mukminin, mereka yang taat akan

mengandalkan Allah dan menganggap dirinya beramal bagi keridhaan Allah, karena segala sesuatu dimulai dan kembali kepada-Nya. Orang beriman, selain itu, yakin bahwa Allah hanya menjanjikan kebaikan kepadanya, dan inilah mengapa tidak ada kegelisahan yang membayangi pencarian nafkah, pencapaian studi, *Jihad, Amri bi al-Ma'ruuf*, dan penegakan keadilan, pemerintahan, peradaban, kebudayaan, tatanan sosio-politik-ekonomi, suatu fakta yang muncul di awal periode Islam. Seorang Muslim, adalah seorang politisi, seorang aktifis yang berpartisipasi dalam aktivitas hidup keseharian secara individu dan kolektif. Islam memandang seluruh kehidupan sebagai ibadah. Jika hidup manusia secara keseluruhan dipandang sebagai ibadah kepada Allah, sebagaimana Al-Qur'an sarankan,[6] maka konsekuensinya semua aktivitas sosial, politik, ekonomi sebagaimana aktivitas-aktivitas ritualnya, harus dipandang sebagai ibadah. Konsep Islam tentang ibadah ini meminta kaum Muslimin mengambil bagian dalam segala aktivitas yang membentuk kehidupan individu dan sosialnya.

Kesatuan tuhan yang pantas untuk disembah menuntut kesatuan hidup manusia, yakni keselarasan antara aktivitas spiritualnya dan fisik keduniawian. Keseragaman ibadah menyatukan ruh dan materi, raga dan jiwa, agama dan politik, ritual dan berbagai aktivitas sosio-politik, moral dan ilmu pengetahuan, alam dan Allah, kesalehan dan perkembangan material, dunia kini dan hari kemudian, kehidupan kini dan kehidupan yang kekal, ringkasnya agama dan kehidupan. Kesatuan hidup menuntut keharmonisan naluri dan moral. Islam tidak pernah menerima dualisme kehidupan, pertentangan antara agama dan politik atau dua lingkungan spiritual dan aktivitas keduniawian.[7] Islam tak pernah mengenal dualisme antara ibadah dan aktivitas sehari-hari. Ia selalu mendukung kesatuan yang disembah dan kesatuan ibadah. Shalat dan ibadah bukan sekadar hymne-hymne, ritual-ritual dan pemikiran. Ia adalah pengingatan *(Tadhakkur)* kepada Allah sebagai sebab dan tujuan hidup keseluruhan.[8] Islam tidak mengakui dua tuhan, tuhan agama dan tuhan politik, kedaulatan relijius dan kedaulatan politik, Tuhan sains dan Tuhan moral, objek shalat dan objek ilmu, Tuhan perasaan dan iman dan Tuhan akal dan amal.[9] Islam tidak mengakui bahwa agama dan ibadah hanyalah aktivitas-aktivitas spiritual dan bahwa urusan kehidupan sehari-hari dan berbagai aktivitas politik bukan relijius dan sekular.

Akibat salah paham dan kesalahan konsep mengenai ibadah, ritual dan agama di Barat, kehidupan dan politik tersingkir dari agama hingga akhirnya mereka mendudukkan sepenuhnya pemisahan antara cita-cita dan ambisi. Kesatuan ibadah menuntut bahwa politik harus diperlakukan dalam cara dan pendekatan ilahiah yang terancang. Ini Jaminan kehormatan politik dan kemurniannya. Islam menghadirkan konsep ibadah yang sesungguhnya. Ibadah adalah iman, ritual, amal dan hukum. Ibadah mencakup seluruh jangkauan aktivitas manusia, kehidupan itu sendiri, baik agama maupun politik. Sejauh segala sesuatunya diperlakukan dan dilaksanakan dengan suatu cara Islam dan dengan niat menyenangkan Allah, baik ritual maupun politik, ia merupakan ibadah kepada Allah. Jadi, politik menjadi politik dan ibadah Islam pada saat bersamaan. Dalam cara ini kebahagiaan, yang kepuasan dan keamanan manusia berkesinambungan dan keterikatan yang tetap antara agama dan kehidupan serta kesatuan hidup dan Akhirat, dan kesinambungan internal *(Tazkiya)* dan revolusi-revolusi internal *(Inqilab)* disempurnakan dalam Islam.[10] Dalam Islam, tidak ada amal tunggal yang terkait secara eksklusif dengan kehidupan duniawi atau Akhirat; tujuannya selalu berlipat dua. Memanjatkan do'a misalnya, yang mana masyarakat dapat berfikir tentang suatu perbuatan yang semata-mata demi Akhirat, juga memiliki tujuannya dalam kehidupan duniawi. Sebagaimana Allah firmankan dalam al-Qur'an: "Shalat menahan diri dari perbuatan keji dan mungkar".[11]

Kami akan membiarkan pembaca menyimpulkan sendiri arti revolusioner dari prinsip dan konsep ini. Islam memperkenalkan seluruh waktu kehidupan antara buaian sampai ke liang kubur sebagai ibadah atau dosa, dan inilah mengapa secara tepat dinyatakan bahwa si penyembah, Muslim, adalah manusia yang dibimbing oleh seluruh hidup pribadi dan kemasyarakatan dari awal hingga akhir, dari buaian hingga ke liang kubur. Sesungguhgnya, agama yang sejati harus mempertimbangkan manusia secara keseluruhannya dengan segala fitrahnya dan berbagai kebutuhan bawaan lahirnya serta mengenakan hukuman atau ganjaran kepada mereka karena mengerjakan atau tidak mengerjakannya (ibadah atau dosa, ketaatan atau ketidaktaatan), dan tidak hanya separuh dari manusia atau separuh dari berbagai kebutuhannya. Segala yang dilakukan atau tidak dilakukan berke-

naan dengan maksud Allah dan dalam kerangka petunjuk-petunjuk-Nya (Islam, Ketaatan kepada Allah) adalah amal ibadah. Jadi, Islam mengajarkan kita bahwa kehidupan manusia harus berkembang secara konstan, ilmiah, politis, ekonomis dan sosial - tetapi bahwa dalam perkembangannya yang terus-menerus ia tidak harus menolak nilai-nilai tetap yang ditarik dari fakta-fakta permanen dan tak berubah menyangkut Allah, dalam Alam semesta ciptaan-Nya, kehidupan dan manusia. Kehidupan yang didasarkan pada konsep ini akan menjadi ibadah dan ketaatan kepada Allah yang terus menerus.[12] Dengan melengkapi tiga kesatuan dan konsep: kesatuan ilahiah, kedaulatan, kesatuan ibadah, kehidupan dan kesatuan petunjuk, Islam menjadikannya wajib bagi setiap Muslim untuk membangun landasan bagi berdirinya kedaulatan Allah di muka bumi, sistem politik dan pemerintahan Islam.

ESKATOLOGI ISLAM SEBAGAI SEBUAH PRINSIP GERAKAN ISLAM

Doktrin hari kebangkitan dalam Islam dan prinsip Islam tentang tanggung-jawab manusia untuk keselamatan atau kehancuran, yakni amal baik atau buruk, kecil atau besar, tak ada masalah betapa pun pada akhirnya harus diberi pahala atau azab, karena tidak ada sesuatu pun yang lolos;[13] "Maka barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat atom pun, niscaya akan dilihat-Nya, dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat atom pun, niscaya akan dilihat-Nya pula",[14] dipandang sebagai prinsip revolusioner Islam. Hal ini bertanggung jawab langsung terhadap prinsip revolusioner syahadah, karena tidak ada seorang pun, pria atau wanita, yang dapat dibujuk untuk mengurbankan hidupanya maupun hidup orang terdekat dan tersayangnya, demi tujuan-tujuan materialistis. Bahkan orang yang paling materialis-ateis, yang dipersiapkan untuk mengurbankan nyawanya bagi kebahagiaan orang lain, harus menimbang berbagai tujuan materilnya dalam acuan ganjaran spritual agar sanggup mempersembahkan kehidupan fisiknya demi syahadah.

Islami, dipandang Syi'ah bukan hal sederhana sebagai suatu fakta sejarah, ia dilihat sebagai suatu fakta yang amat dalam dan meneruskan makna spiritual yang telah memberikan Syi'ah ketajaman ekstra yang tak dimiliki oleh perangai politik Sunni.[3] Perjuangan antara Imam Husain dan Yazid demi keadilan dan menentang kekuasaan tirani yang berlebih-lebihan serta kediktatoran yang dirasakan baik Muslim Syi'ah maupun Sunni. Tetapi kedudukan penting atas peristiwa Karbala dan konsep syahadah dalam Syi'ah serta melalui faham Syi'ah dalam Revolusi Islam di Iran, tak diragukan lagi.[4] Dalam perjalanan revolusi di Iran dan juga dalam perjuangan revolusi melawan musuh-musuh dari dalam dan luar serta peperangannya melawan agresi Ba'athis, rezim rasial Aflaqui Irak dan dalam semua demonstrasi massa rakyat Iran di seluruh negeri, salah satu slogan yang paling menarik yang terus dikumandangkan dan yang menunjukkan secara jelas pentingnya syahdah, Imam Husain dan peristiwa Karbala, tidak hanya demi kesadaran relijius tetapi juga bagi kesadaran politik Syi'ah adalah: "Setiap hari adalah Asyura (hari sa'at Imam Husain syahid) dan setiap tempat adalah Karbala" (tempat beliau syahid). Sebenarnya revolusi telah memperoleh momentum menentukan yang tak terkalahkan setelah prosesi Muharram dan demonstrasi pada hari kesembilan dan kesepuluh (Asyura) Muharram 1398 (1978). Kemudian Syah dan pendukung intern dan eskternalnya menyadari bahwa mereka tidak dapat mengadakan perlawanan lagi. Slogan "Setiap hari adalah Asyura dan setiap tempat adalah Karbala" menjelaskan bahwa di manapun Muslim berada, di situlah daerah perjuangan dimana kekuatan keadilan dan keabsahan ditentang oleh kekuatan tirani. Setiap hari dari kehidupannya adalah hari peperangan di mana dia harus mencari kemenangan ataupun kesyahidan. Dia harus mengikuti teladan yang diletakkan oleh Imamnya (pemimpin) dan menjadi seorang Muslim Syi'ah yang baik (pengikut). Dengan begitu dia memiliki andil penting, dengan konsep syahadah, sebagimana dicontohkan Imam Husain dalam suatu peristiwa tragis dan penting yang khas untuk menghidupkan imannya, benar terhadap keadilan, untuk umatnya dan untuk pembasmian tirani, agresi dan kediktatoran. Profesor H. Algar memandang penolakan atas otoritas de facto dan kepercayaan dalam kebajikan-kebajikan syahadah sebagai ciri-ciri kembar faham Syi'ah yang telah memberikan

Syiaisme ciri pada butir-butir tertentu dalam sejarahnya, sikap militansi, yang ia sesalkan tidak terdapat dalam sejumlah besar kelompok Sunni di antara Ummah Muslim.[5] Tetapi, sebagaimana yang telah diutarakan, tidak satu pun di antara kedua ini merupakan monopoli Syi'ah. Muslimin Sunni baik di masa lampau maupun sekarang telah sering dengan kuat mempropagandakan sistem de jure dan konsep syahadah dan telah sering menggunakannya. Sejarah pergerakan Islam pada seluruh sejarah Islam dan banyak pemberontakan terbuka serta berbagai revolusi dalam hampir semua bagian negeri Muslim menggambarkan pokok ini. Orang-orang Palestina, Eritria, Pattani, Moro, Kasmir dan gerakan-gerakan Islam lainnya menjelaskan hal ini. Gerakan Mahdi di Sudan, pergerakan Islam di Afrika, semuanya memberikan kesaksian terhadap semua ini. Gerakan Ikhwanul Muslimin (Persaudaraan Muslimin) di banyak negeri Muslim dan gerakan-gerakan revolusioner Islam lainnya menjelaskan betapa berani dan gagahnya kaum Muslimin untuk mati syahid demi berdirinya negara dan umat Islam universal (de jure) dan betapa semangatnya mereka memerangi berbagai kekuatan jahat (de facto). Sepanjang sejarah Islam, telah ada sepasukan aktivis, para penolak dan para revolusioner yang menolak otoritas *de facto* yang memproklamirkan diri sebagai pelindung ajaran yang sudah mapan. Para Mujahid abad ketujuh, Hasyimiyah abad kedelapan, Carmathians abad kesepuluh, para pengikut Muhammad ibn Abul Wahhab di abad kedelapan belas, Salafiyah abad ke sembilan belas dan banyak lagi sekte-sekte dan kelompok, baik yang silam maupun dalam sejarah Islam kontemporer, yang memberikan kesaksian kepada kegigihan kelompok-kelompok Muslim Sunni yang mengklaim bahwa suara mereka adalah suara Islam revolusioner asli.[6]

Istilah yang digunakan untuk syahadah dalam literatur Islam adalah *Syahadah* yang berarti bersaksi, memberikan kesaksian untuk meletakkan suatu Model dan contoh yang baik. Al-Qur'an mengatakan "'demikianlah Kami telah menjadikan di antara kamu suatu Ummah yang berimbang secara adil, yang harus menjadi saksi *(Syuhada*; tunggal: *Syahid)* dan contoh atas massa sebagimana Rasul memberi kesaksian *(Syahid)* dan model atas kamu".[7] Ini seolah-olah seorang syahid dengan tindakan syahada-

hnya bersaksi dan merasakan kebenaran serta memberikan contoh yang baik bagi massa. Jadi, istilah Syahadah yang digunakan dalam al-Qur'an tidak untuk makna mati syahid, kendati digunakan oleh Nabi untuk makna mati syahid. Ini mungkin karena Al-Qur'an tidak hendak membatasi makna syahadah untuk kematian. Namun, harus dicatat bahwa Islam tidak memandang para syahid sebagai satu-satunya prajurit suci atau orang-orang yang ikut dalam perang suci, karena tidak ada perang suci (berperang demi pemaksaan agama terhadap kaum kafir) dalam Islam, karena Al-Qur'an tidak menyetujui menggunakan paksaan dalam agama.[8] Istilah jihad yang disalahtafsirkan oleh para orientalis sebagai perang suci (dari akar kata j-h-d) yang berarti berusaha keras dan berjuang. Ini merujuk kepada segala usaha, mental, moral dan fisik yang dibuat untuk mengagungkan kalimat Allah. Ia meliputi seluruh rangkaian aktivitas dari mulai perang melawan kejahatannya sendiri sampai perang di jalan Allah, yakni untuk menegakkan keadilan, umat Islam, negara Islam, untuk mempertahankan kemuliaannya, kehidupan, hak milik, untuk memerangi musuh-musuh Ummah dan negara Islam *(Dar al-Islam)*, untuk memerangi para penindas, para perampas hak-hak kaum Muslimin, para pelanggar (semua yang dipandang sebagai yang ikutserta dalam perang bagi tujuan Islam karena kesatuan negara dan agama dalam Islam). Istilah jihad tidak dengan sendirinya berarti perang dan berperang, karena istilah yang digunakan dalam al-Qur'an bagi perang adalah Harb dan istilah yang digunakan untuk berperang adalah Qatl . Pejuang (Mujhaid) di jalan Islam diperkenalkan sebagai syahid. Seorang mujahid adalah seorang Muslim yang komited yang untuk satu tujuan demi hal yang apabila terbunuh, orang tersebut menjadi Syahid. Jadi, seorang Syahid adalah seorang Mujahid yang menggunakan nyaris seluruh hidupnya demi tujuan jihad-nya. Seorang Mujahid adalah syahid yang hidup, dan seorang syahid adalah mujahid yang mati syahid. Tapi tidak satu pun di antara mereka harus melibatkan diri secara fisik dalam suatu peperangan atau dalam suatu perang suci menurut konsep Kristen tentang perang suci, walau keduanya dalam tujuan dan perjuangan yang suci; demi untuk Islam. Jadi, jihad adalah perjuangan Islam untuk tujuan suci, tujuan mana bila dia mati, dia menjadi syahid.

BAB 7
KONSEP UMMAH SEBAGAI PRINSIP GERAKAN ISLAM

.Tradisi dan prinsip revolusioner Islam lain yang selalu menjadi sumber aspirasi revolusioner adalah Ummah yang berkait erat dengan konsep Islam tentang persaudaraah dan universalisme. Ciri Ummah yang paling mencolok bahwa ia adalah prinsip empat dimensi:

a. Tidak dibatasi waktu. Karena itu, meliputi semua kaum Muslimin sejak muncunya Islam hingga akhir zaman.

b. Tidak dibatasi ruang. Jadi, meliputi semua kaum Muslimin di seluruh dunia.

c. Mendalam dan komprehensif. Jadi, ia adalah persaudaraan dan keanggotaan dalam segala aspek kehidupan materil dan spirituil, berdasarkan Kesatuan manusia menurut Tauhid. Oleh karenanya, menolak rasisme, nasionalisme, dan sebagainya sebagai tolok ukur diskriminasi. Konsep Ummah, seperti prinsip Islam lainnya yang berdasar pada pandangan dunia Islam tentang Tauhid seputar kesatuan mutlak dan keselarasan ciptaan dan makhluk.

d. Tawhid ini tidak dapat menerima kontradiksi hukum, fisik, kelas, sosial, politik, rasial, nasional, teritorial, genetik atau bahkan ekonomi. Pandangan dunia Islam tentang Tawhid mengisyaratkan bentuk pandangan yang melihat semua makhluk manusia suatu kesatuan Ummah — dan menghapus

semua kontradiksi antara hitam dan putih, penguasa dan yang dikuasai, majikan dan pegawai, ilmuwan dan massa, kaum politisi dan agamawan, mulia dan hina, rahib dan kaum awam, Timur dan Barat, Yunani dan Barbar, Arab dan Ajam, kapitalis dan proletar, dst. Tauhid *(Monotheisme)* itu kesatuan, dan syirk *(politheisme)* adalah feodalisme. Ali Syariati percaya bahwa semua kontradiksi tidak dapat didamaikan hanya dengan pandangan dunia tentang syirk — dua tuhan *(dualisme)*, tiga tuhan *(trinitarianisme)*, atau banyak tuhan *(politheisme)* melainkan dengan Tauhid — keesaan tuhan *(monotheisme)*. Karena alasan inilah sehingga pandangan dunia tentang syirik selalu membentuk landasan syirik dalam masyarakat dengan membeda-bedakannya di antara kelas-kelas dan ras. Tauhid adalah kesatuan, syirk adalah feodalisme.

Sistem sosialnya didasarkan atas kewajaran, kesamaan, keadilan, dan persaudaraan, suatu masyarakat Tauhid sejati *(monotheistis)* - masyarakat terbuka yang komprehensif tanpa kelas. Ini adalah prinsip mendasar, tetapi bukan tujuan, sebagaimana dalam sosialisme Barat, yang telah memelihara pandangan dunia borjuis Barat - pandangan dunia syirk. Falsafah politik dan bentuk rezim Ummah bukan demokrasi musyawarah para ketua-ketua, bukan juga liberalisme tak bertanggung jawab dan tanpa arah yang merupakan alat permainan kekuatan-kekuatan sosial yang menentang, bukan aristokrasi busuk, bukan kediktatoran bengis, bukan oligarki yang mengangkat diri sendiri. Melainkan ia terdiri dari 'kesucian imamah' (bukan pemimpin, karena itu akan menjadi fasisme) , komited dan kepemimpinan revolusioner Ummah, bertanggung jawab bagi gerakan dan pertumbuhan masyarakat berdasarkan pandangan dunia dan ideologinya serta bagi realisasi nasib manusia beriman dalam rencana penciptaan. Inilah arti Imamah (kepemimpinan) yang sesungguhnya.

Konsep Islam tentang Ummah atas dasar Tauhid adalah salah satu watak Islam. Islam komited sepenuhnya terhadap persaudaraan manusia dengan keadilan sosial dan ekonomi, terhadap distribusi pendapatan yang adil, dan kepada kebebasan individual dalam kaitannya dengan kesejahteraan sosial. Walaupun baik kapitalisme maupun semikapitalisme mengklaim berpegang teguh pada keadilan sosial, konsep keadilan dalam sosialisme atau semikapilaisme tidak berdasarkan persaudaraan manusia yang

didesak oleh kriteria spiritual *inviable* yang tak terhindarkan bagi keadilan sosial dan ekonomi. Sesungguhnya sosialisme Marxis dibawah pengaruh dialektis memaafkan ketidakadilan yang dilakukan oleh satu kelompok kepada kelompok lain dan bahkan menyetujui penghapusan satu kelompok oleh kelompok lain. Dalam kapitalisme *Laissez Faire* dengan slogan 'Jangan turut campur, dunia akan menanganinya' tidak terdapat ideal bawaan tentang keadilan sosial yang harus dicapai melalui usaha sadar, sementara dalam kapitalisme campuran akar-akar keadilan sosial terletak dalam kelompok penekan ketimbang dalam kepercayaan fitrah akan persaudaraan manusia.[1] Yang berkait erat dengan konsep komunitas (Ummah) dalam Islam adalah konsep "Massa" *(al-Nas)* sebagai faktor dan motor perubahan. Ummah dalam Islam dibentuk oleh al-Nas (Massa) tanpa diskriminasi apa pun. *Al-Nas* (massa) ditambah iman saja membentuk Ummah. Tidak diperlukan yang lain lagi, seperti pembagian ras, bahasa, sejarah, dan lain-lain. Tidak ada yang lebih universal daripada *al-Nas* dan karenanya tidak ada konsep sosial yang lebih universal daripada Ummah. Konsep al-Nas dan Ummah dipandang sebagai tradisi revolusioner dalam Islam, karena penegakan Ummah, baik sebagai prinsip Islam itu sendiri maupun sebagai prasyarat bagi berdirinya Negara Islam, adalah salah satu sasaran Islam dan menduduki posisi sangat penting dalam mentalitas Muslimin. Selanjutnya, Ummah adalah suatu faktor Revolusi sebagai motor perubahan.

UNIVERSALISME ISLAM
SIFAT INTERNASIONAL DAN UNIVERSAL
PRINSIP POLITIK DAN PEMERINTAHAN ISLAM

Watak universal dan pemerintahan Islam didasarkan atas banyak tradisi universal Islam, beberapa di antaranya adalah:

(a) Konsep Islam tentang Tuhan universal dalam bentuk monoteisme (Tauhid) terbuka; kesatuan Pencipta dan ciptaan. Bahkan, dalam Islam, Allah, alam dan manusia tidak saling menjauh, tidak juga mereka saling mengasingkan diri dan tentu saja tidak saling bertentangan. Ini bukan "Kesatuan

eksistensi" *(wahdat al-Wujuud)* atau kesatuan maujud *(wahdat al-Wujuud)*, tidak juga keserbaragaman eksistensi *(Kathral al-Wujuud)*, melainkan Tauhid tentang tujuan dan sumber eksistensi dan Tauhid tentang ciptaan serta dunia dalam sorotan hubungan antara Allah, jagat raya dan dunia ini berdasarkan cahaya ayat al-Qur'an (ayat *al-noor*).[2]

(b) Konsep Islam tentang manusia universal dengan lahirnya melalui tindakan dan asal yang sama, (satu Tuhan, satu manusia), nenek moyang yang sama (Adam dan Hawa),[3] dan dengan penolakan diskriminasi sosial, geografis dan biologis. Diriwayatkan, Nabi bersabda: Tuhanmu satu, kamu dari Adam dan Adam dari debu; seorang Arab tidak memiliki superioritas atas non-Arab tidak juga seorang kulit putih terhadap kulit hitam, kecuali dengan keshalehan dan ketaqwaan".[4]

(c) Konsep Islam tentang agama universal dengan memperkenalkan Islam sebagai yang tunduk dan pasrah kepada Allah saja sebagai akibat alamiah tentang kesatuan ciptaan dan Alam semesta dan dengan demikian memperkenalkan Islam sebagai penyerahan alamiah jagat raya, termasuk manusia, kepada Penciptanya[5] Satu Tuhan, satu manusia dan satu agama serta persamaan mutlak atas manusia.

(d) Konsep Islam tentang komunitas (Ummah) didasarkan Persaudaraan Islam. Islam memperkenalkan semua mukminin sebagai anggota satu komunitas (Ummah) yang sama yang disatukan oleh ikatan persaudaraan dan kasih-sayang seperti anggota satu keluarga tunggal yang diciptakan oleh satu Tuhan dari satu pasang yang diciptakan melalui satu tindakan tunggal dan tunduk kepada satu Tuhan. Ia adalah suatu komunitas universal dan persaudaraan dan tidak picik. Tidak dibatasi batas buatan apa pun dan mencakup seluruh umat manusia,[6] dibimbing dan dituntun oleh risalah ilahi serta para nabi yang sama.[7] Manusia adalah keluarga Tuhan *(al-Nasu Ayalu Allah)* dan "yang paling disayangi di antara mereka di hadapan-Nya adalah orang yang terbaik di antara keluarganya'.[8]

(e) Kesatuan dan universalisme sasaran manusia, yakni keselamatan secara keseluruhan *(sa'adat)* dan semua cakupan

kebahagiaan *(Falah)*, kesatuan tanggung-jawab untuk memperbaiki martabat manusia, kesejahteraan ummat manusia secara keseluruhan, menegakkan kedamaian dan keadilan, penegakan mana pada tingkat dunia secara tegas dideklarasikan oleh Al-Qur'an untuk menjadi satu prinsip objektif dari ajaran semua rasul Allah, yang terakhir dari mereka adalah Muhammad. [9]

(f) Memperkenalkan Allah sebagai satu-satunya kedaulatan dan satu-satunya sumber kekuasaan termasuk kekuasaan politik dan otoritas.[10]

Yang paling alamiah tentang kesatuan dan universalisme dari semua konsep ini adalah kerja sama timbal balik, pemerintahan universal dan kesatuan politik dunia, setidak-tidaknya di antara para monoteis, khususnya di antara kaum Muslimin. Sebenarnya sistem politik dan pemerintahan Islam tidak dapat diakui sebagai Islami secara penuh dan sempurna tanpa universalitas yang menyatukan semua masyarakat kaum Muslimin di seluruh dunia. Universalisme adalah salah satu watak utama sistem politik dan pemerintahan Islam. Pemerintahan Islam harus selalu dikelola berdasarkan universalisme, serikat internasional dan berbagai bentuk federal. Sejak Islam mengajukan keesaan Allah, kesatuan kedaulatan dan sumber kekuatan, kesatuan manusia, agamanya, tujuannya dan keluarganya, logis untuk menyimpulkan bahwa ia mengusulkan berbagai prinsip politik dan pemerintahan internasional yang universal, bentuknya dapat berubah-ubah menurut berbagai keadaan, dari satu periode, satu tempat, satu masyarakat kepada yang lain.

Referensi singkat terhadap berbagai sasaran universal sistem politik Islam menjelaskan sifat universal politik Islam. Sasaran-sasaran sistem politik Islam adalah:

1. Berdirinya kedaulatan Allah sebagai satu-satunya sumber kekuasaan termasuk kekuasaan politik.[11]
2. Menempatkan kembali martabat manusia dengan memulangkan kemerdekaan dan kebebasannya lantaran ketergantungannya hanya kepada Allah dan kedaulatan Allah serta kekhalifahan manusia. [12]
3. Mendidik individu-individu dan masyarakat untuk mema-

hami, mengakui dan memenuhi tanggung-jawab mereka; termasuk terhadap Allah, alam, satu sama lain, masyarakat dan diri mereka sendiri.[13]

4. Menegakkan dan mempertahankan pemerintahan, masyarakat, persaudaraan Islam serta prinsip-prinsip duniawi dan menegakkan, standar-standar dan nilai-nilai Islam. Penegakan kesatuan manusia.[17]
5. Menegakkan keadilan, kedamaian, ketenangan dan sosio-politik-ekonomi dan keadilan hukum serta persamaan.[15]
6. Menyiarkan Islam, menganjurkan kebaikan dan melarang kejahatan, melaksanakan Syari'ah dan hukum Islam.[16]
7. Mempersiapkan berbagai kondisi bagi aktualisasi dan realisasi fisik dan mental, material dan spiritual, duniawi dan berbagai potensial relijius manusia.[17]
8. Menyediakan dan memelihara berbagai kebutuhan material dasar bagi kehidupan, yakni makanan, rumah, pakaian, bantuan medis, pendidikan, pekerjaan dan berbagai kebutuhan lainnya, karena "Barang siapa yang tidak memiliki keamanan finansial tidak memiliki agama" *(Ma la Maasy Lahu la Maad Lahu)*[18]
9. Memberikan hak-hak Islami dan manusiawi atas semua penduduk dan tata cara keagamaan golongan minoritas *(Ahl-al-Kitab)*.[19]
10. Menyediakan dan memelihara hak-hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai urusan dan musyawarah mereka serta persetujuan bentuk pemerintahan dan pelaksanaan negara.[20]

KONSEP TENTANG MINORITAS DAN MAYORITAS DALAM ISLAM

Pantaslah untuk pertama-tama membatasi istilah-istilah yang digunakan dalam literatur Islam bagi *minoritas* dan *mayoritas*, kemudian menjelaskan berbagai konsep Islam mengenainya dan akhirnya menerangkan pembenaran dan penjelasan menyangkut konsep itu.

Istilah minoritas *(al-Aqalliat)* sebagai lawan dari istilah mayoritas *(al-Aktsariat)* yang digunakan terhadap golongan agama yang minoritas dan mayoritas diimpor dari Barat ke dalam literatur modern dunia Muslim dan adalah produk dari pengaruh Barat atas dunia Muslim. Istilah yang digunakan dalam Al-Qur'an bagi orang Yahudi, Zoroaster, Kristen dan yang lainnya atau semua agama monoteis yang sesungguhnya, maupun ummat Islam, tanpa menghiraukan apakah mereka minoritas atau mayoritas, adalah istilah "ahlul kitab, orang-orang ber-Kitab Suci.[21]

Pilihan istilah "ahlul kitab" menyatakan secara tidak langsung bahwa: (a) tidak ada diskriminasi dalam penggunaan istilah antara orang-orang Yahudi, Kristen, Zoroaster dan Muslimin; (b) istilah 'ahlul kitab' bukan hanya tidak membawa pengertian sifat yang rendah tetapi ia bahkan membawa suatu pengertian rasa hormat, kehormatan, mulia, nilai dan penghargaan; (c) istilah ini tidak membuat segala perbedaan apa pun antara mayoritas dan minoritas dan karenanya tidak menjelaskan tanggung jawab serta hak-hak mereka dalam istilah angka dan statistik yang dapat berubah; (d) para pengikut agama-agama tersebut dipandang sebagai komunitas-komunitas dan karenanya orang-orang Yahudi, Kristen, Zoroaster dan Muslimin hidup dalam komunitas mereka sendiri yang berbeda-beda yang dipandang sebagai bagian dari komunitas mereka sendiri yang terhormat. (e) penggunaan istilah yang sama bagi para pengikut agama monoteis sangat sesuai dengan prinsip monoteisme karena keesaan Tuhan tentu saja memerlukan keesaan Risalah dan agama-Nya; 'Penyerahan kepada Allah' (Islam) yang merupakan ruh dari iman monoteis, dan memerlukan kesatuan dari mereka yang menerima dan menyiarkan Risalah-Nya yang tunggal;[22] (f) penggunaan istilah tunggal bagi mereka semua menunjukkan kesatuan agama-agama, wahyu yang universal.

Sebagai akibatnya istilah yang digunakan dalam literatur Islam bagi komunitas — non-Muslim dalam negara Muslim adalah 'yang dilindungi' atau 'komunitas yang dilindungi' *(Ahl al-dzimmah)* yang menunjukkan pokok-pokok berikut:

(a) Pilihan atau istilah 'yang dilindungi' menjadikannya suatu kewajiban negara Muslim untuk melindungi para warganegara non-Muslimnya dan dengan demikian istilah *'dzimmi'* memberi-

kannya suatu pengertian keamanan dan perlindungan dan bukan suatu pengertian ketiadaberdayaan atau sifat rendah yang tentu saja terkandung dalam istilah minoritas. (b) Istilah 'yang dilindungi' yang digunakan bagi non-Muslimin yang hidup dalam Negara Muslim, menyatakan secara tidak langsung bahwa negara Muslim adalah pelindung, pengemban kewajiban mandataris yang harus dilaksanakan, dan bukan karena disuap dengan sesuatu cara. (c) Istilah *'dzimmi'*, bukan seperti istilah 'minoritas', tidak menempatkan masyarakat non-Muslim hidup dalam masyarakat Muslim dalam posisi yang berlawanan dengan mayoritas, dan karenanya menjadikan hubungan antara mereka tidak berupa rasa permusuhan, melainkan persahabatan dan kasih sayang.

Pengakuan Allah dalam Al-Qur'an oleh tentang orang-orang Yahudi, Zoroaster, Kristen dan Sabiin sebagai 'ahlul kitab' telah diperluas oleh kaum Muslimin terhadap para pengikut agama-agama lain, seperti orang-orang Hindu, Budha.[23]

Di lain pihak, komunitas Muslim, yang hidup dalam negara non-Muslim tidak dipandang sebagai minoritas juga. Istilah yang digunkan bagi Muslimin di seluruh dunia adalah *'Ummah'* yang adalah suatu konsep multidimensional yang tidak dibatasi oleh waktu, ruang, ras, dan sebagainya. Istilah *'Ummah'* setidak-tidaknya memiliki empat dimensi:

(a) ia meliputi kaum Muslimin di seluruh waktu dan sejarah dari munculnya Islam hingga akhir zaman;

(b) ia meliputi kaum Muslimin di seluruh dunia tanpa menghiraukan batasan-batasan geografis;

(c) ia meliputi segala ras, warna, perbedaan-perbedaan manusia;

(d) ia membentuk ikatan antara seksi-seksi dan anggota-anggota komuniats yang meliputi segala segi aktivitas manusia, fisik, spiritual, finansial, sosial, dan sebagainya."

Jadi, istilah *Ummah* sebagaimana Muslimin memahaminya, terdiri dari masyarakat di negara dan negeri-negeri Muslim maupun

masyarakat Muslim, masyarakat minoritas dan individu-individu yang hidup dalam negara-negara non-Muslim. Mereka semua membentuk *Ummah* yang mencakup persamaan di antara mereka.

Topik ini tidak harus menyimpangkan kita kepada kepercayaan bahwa Islam mengakui pembagian manusia ke dalam bermacam-macam bentuk minoritas dan mayoritas, melainkan mengajukan konsepnya sendiri. Sebagaimana yang telah kami tunjukkan, 'Keesaan Allah' sebagai satu-satunya landasan tunggal dari bangunan Islam dengan sendirinya membimbing kita kepada (1) kesatuan Risalah-Nya (dan karenanya menolak minoritas serta mayoritas agama dan sekte) dan (2) kepada kesatuan manusia (dan karenanya menolak minoritas dan mayoritas) rasial dan (3) kepada kesatuan sumber otoritas, kekuasaan dan kedaulatan (dan karenanya menolak minoritas dan mayoritas politik), maupun kepada kesatuan-kesatuan lainnya (dan karenanya menolak bentuk-bentuk lain dari minoritas-mayoritas). Topik ini telah digunakan secara sederhana untuk memudahkan kita melanjutkan pembahasan.

Namun, sebagaimana diketahui, hampir sepertiga dari satu milyar Muslimin dunia tinggal di negara-negara non-Muslim. Jadi, adalah wajar bagi kaum Muslimin untuk mengajukan suatu konsep logis tentang minoritas-mayoritas sehingga minoritas-minoritas relijius, sosial, politik, apakah Muslim atau non-Muslim, dapat diperlakukan dengan adil, yakni Islam tidak mengakui minoritas dan mayoritas rasial. Jadi, Muslimin tidak mengharapkan untuk diperlakukan atas dasar ini sebagaimana mereka tidak memperlakukan orang lain dengan ketidakadilan atas dasar ini. Islam tidak mengakui mayoritas dan minoritas nasional. Jadi, Muslimin tidak mengharapkan untuk diperlakukan dengan prasangka atas dasar ini sebagaimana mereka tidak memperlakukan orang lain dengan prasangka atas dasar tersebut. Islam tidak mengakui minoritas dan mayoritas kelas. Jadi, kaum Muslimin tidak mengharapkan orang lain untuk memperlakukan mereka atas dasar ini sebagaimana mereka tidak memperlakukan orang lain atas dasar ini. Islam tidak mengakui segala kekuasaan, otoritas dan kedaulatan kecuali dari Tuhan (Allah). Jadi, ia tidak mengenal minoritas dan mayoritas politik. Karena itu Muslimin tidak mengharapkan diperlakukan dengan prasangka atas dasar ini, dan seterusnya.

Karena mayoritas Muslim tidak memandang dirinya sebagai suatu kelompok yang menduduki posisi yang dominan, mengeksploitasi minoritas dengan kekerasan dan kekuatan serta tidak memandang dirinya berupa suatu kelompok istimewa dengan hak untuk berkuasa atas minoritas dengan kekuatan dan kekerasan, tetapi ia memandang dirinya sebagai pelindung minoritas. Minoritas Muslim tentu saja mengharapkan mayoritas non-Muslim, setidak-tidaknya, memperlakukan dengan pertimbangan yang sama.

Konsep Barat tentang minoritas dan mayoritas dalam segala bentuknya didasarkan pada konsep demokrasi, kekuasaan dan politik Barat. Sebenarnya, konsep Barat tentang minoritas dan mayoritas dalam segala bentuknya, termasuk minoritas dan mayoritas relijius, didasarkan pada landasan duniawi, politik dan materialistis (tentunya non-spiritual). Tetapi konsep Islam tentang minoritas dan mayoritas dalam segala bentuknya, termasuk minoritas dan mayoritas politik, sebaliknya, memiliki penjelasan teologis, spiritual dan relijius. Sejak pembagian hidup secara jelas ke dalam ibadah dan duniawi, agama dan politik, sejak disunatnya agama ke dalam ibadah formal semata-mata, sejak diperkenalkannya politik dalam istilah otoriter dan kekuasaan serta otoritas, terutama sejak diperkenalkannya demokrasi yang memandang rakyat sebagai sumber otoritas (dan karenanya menolak kedaulatan Allah) sehingga evaluasi hukum dan berbagai konsep legal secara sekuler, fana, otoritas, politis dan dalam istilah seperti otoritas, kekuasaan, kekuatan dan kedaulatan dan karenanya mencabut hukum dan berbagai konsep legal tentang nilai-nilai moral dan spiritualnya dan, terakhir, definisi demokrasi sebagai 'pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat' dan dengan demikian mengganti Allah dengan tiruan-tiruan seperti rakyat, bangsa, raja, dan sebagainya, sebagai yang berdaulat dan satu-satunya sumber kekuasaan dan otoritas. Konsep minoritas dan mayoritas pun menurut istilah-istialah nasional dan internasional yang dievaluasi dalam acuan sekular dan otoriter. Yakni, katakanlah, karena rakyat *(demo)* diakui sebagai satu-satunya sumber wewenang dan kekuasaan (demokrasi), suatu tolok ukur yang harus diajukan untuk mengukur pendapat populer, karena publik jarang bersepakat atas berbagai masalah penting. Tolok ukur mayoritas (di atas 50%) telah dikemukakan sebagai standar

yang dapat dipercaya dan karenanya prinsip demokrasi mutlak yang terbukti tidak praktis, diganti dengan prinsip 'peranan mayoritas' (di mana pun diklaim) atau mayoritokrasi. Dengan begitu minoritas (kurang dari 50%) kehilangan kekuasaan, otoritas, kedaulatan dan hak memerintah serta partisipasi dalam pemerintahan. Maka sebagaimana kita lihat, mayoritas dan minoritas tidak memperkenalkan apa-apa kecuali kelompok berkuasa partai, otoritas dan pemenang serta minoritas. Islam, sebaliknya, tidak mengakui rakyat sebagai sumber kekuasaan dan wewenang, tidak juga mengevaluasi yang benar dan salah, baik atau buruk dalam istilah seperti kekuasaan, kekuatan, dominasi, dan seterusnya. Ia tidak juga mengakui jumlah dan angka statistik sebagai alat untuk mengevaluasi yang benar dan salah. Kita tahu bahwa seluruh bangunan Islam, prinsip-prinsip legal dan politis, , bersandar pada doktrin 'keesaan Allah' (Tauhid : monotheisme absolut) dari mana bersumber keseluruhan Islam, termasuk pandangan hidup dan segala ajaran serta prinsip Islam. Berbagai konsep dan ajaran Islam mengenai mayoritas, minoritas, massa, penduduk, dan sebagainya tidak keluar dari aturan umum ini.

Jadi semua itu harus diuji dan dievaluasi dari sudut pandang ajaran *'Tauhid'*, dan jika konsep-konsep itu tidak diukur dengan standar unik ini, harus ditolak. Pengenalan konsep mayoritas, minoritas, populasi dan massa dalam istilah otoriter seperti kekuasaan dan kekuatan tentunya tidak sesuai dengan ajaran *Tauhid*.

Dalam Islam, otoritas mengikuti kebenaran *(al-Haqqu)*, dan Allah tok adalah keseluruhan kebenaran dan tidak lain kecuali kebenaran. Islam tidak mengakui prinsip politik modern tentang 'kekuasaan *de facto'* sebaliknya mengemukakan bahwa kebenaran adalah sumber otoritas dan bukan lain. Kedaulatan dan wewenang milik Allah saja. Pemerintahan Islam bukan 'pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat'. Jadi, ia tidak mengukur kebenaran dan wewenang dalam ketentuan-ketentuan jumlah - mayoritas dan minoritas. Pemerintahan Islam adalah 'pemerintahan dari Allah, oleh rakyat, untuk Allah', tujuannya adalah untuk mendirikan kebenaran dan keadilan. Jadi, ia bukan pemerintahan demokrasi, bukan teokratis dalam pengertian biasa dari istilah demokrasi dan teokrasi. Karena pemerintahan Islam tidak mengasalkan otoritas dan *raison d'etre*-nya dari rakyat dan tujuan-

nya adalah bukan untuk menyenangkan rakyat dengan biaya berapa pun. Ia tidak mengakui konsep demokrasi, mayoritokrasi dan mayoritas-minoritas. Bahkan wewenang konsensus dan suara bulat, terlepas dari mayoritas atau minoritas, dalam Islam ini tidak didasarkan persetujuan massa dan suara bulat semata. Konsensus dan suara bulat dalam Islam mengandung otoritas, bila mengandung, membawa dan mengungkapkan kebenaran dan ganjaran Ilahi. Diriwayatkan, Nabi berkata: "Ummatku tidak akan bersepakat mengenai suatu keputusan yang salah." Hubungan antara pemerintahan dan rakyat dalam Islam tidak berasal dari kekuasaan dan kekuatan. Hubungan antara mayoritas dan minoritas tidak juga didasarkan kekuasaan dan kekuatan; kekuasaan dengan sendirinya tidak membawa superioritas. Jadi, mayoritas dengan kekuatan dan kekuasaan tidak merupakan golongan superior masyarakat. Minoritas tidak inferior, tidak juga merupakan golongan masyarakat yang hilang.

Karena kedaulatan dan wewenang secara keseluruhan milik Allah, maka ummat Islam, mayoritas Muslim, minoritas dan individu-individu hanya bertanggung-jawab (tidak kuat) untuk mendirikan kerajaan Allah (begitulah kiranya) di muka bumi dan untuk menyiarkan kebenaran dan mendirikan keadilan. Manusia itu bertanggung-jawab, terlepas dari pembentukan kemufakatan, mayoritas atau minoritas. Komunitas Islam, atau mayoritas, bukan komunitas kekuasaan atau mayoritas berkuasa — karena kekuasaan dan otoritas secara eksklusif milik Allah. Jadi, hubungannya dengan minoritas non-Muslim yang hidup dalam komunitas atau mayoritas Muslim, tidak berdasarkan kekuasaan dan kekuatan. Sama halnya dengan minoritas Muslim yang hidup di negara-negara non-Muslim. Muslimin bertanggung jawab apakah mereka membentuk mayoritas atau minoritas. Muslimin harus menegakkan keadilan dan memerangi penindasan. Dalam melaksanakan keadilan, dalam Islam, haruslah mutlak. Diskriminasi dan penindasan berlandaskan apa saja, apakah rasial, relijius, nasional, warna, politik, atau semata-mata berdasarkan jumlah-minoritas-mayoritas, dikutuk, baik yang dilakukan Muslimin sendiri atau lawan mereka, apakah Muslim membentuk mayoritas atau minoritas, mereka menguasai atau dikuasai. Nabi (saw) memperkenalkan Muslim sebagai "Dia yang ada dalam kedamaian absolut bersama orang lain." Seorang analis sejarah Muslim

menyampaikan bahwa Muslimin mempraktekkan prinsip-prinsip ini dengan minoritas-minoritas yang hidup di antara mereka. Dalam Islam, martabat manusia sebagai Khalifah Allah tidak dapat dirusakkan dengan landasan-landasan mayoritas-minoritas. Ia terlalu esensil untuk dihubungkan dengan sesuatu yang berubah-ubah, seperti angka dan ukuran statistik. Inilah kenapa telah diakui bahwa sejarah tidak mengetahui agama yang menyingkapkan dirinya kepada orang kafir melainkan mengutuknya — kecuali Islam.[1] Dalam kebanyakan peradaban silam, orang yang tidak beriman justru tidak ada. Yudaisme yahudi, di atas mana agama Kristen kaum Nasrani dibangun, membagi manusia ke dalam orang-orang terpilih (kesayangan Allah) dan orang biasa (bahkan ketika mereka membentuk kemufakatan atau mayoritas), dan karenanya memperkenalkan relijius, rasial, politis, dan sebagainya dengan prasangka dan rintangan, dan membenarkan ini dalam acuan ilahiah. Ini juga masalah dengan agama-agama etnis lain seperti Hinduisme dan Zoroastrianisme. Mengenai agama-agama universal seperti Kristen dan Bhudisme, mereka pun mengutuk orang-orang yang tidak beriman berdasarkan agama. Hanya Islam yang memperkenalkan humanisme universal dan kesatuan agama-agama atas dasar 'agama alamiah' (Din al-Fitrah) dan 'manusia alamiah' (al-Insan al-Fitrah). Keesaan Allah membawa pada kesatuan Risalah-Nya (universalisme wahyu) dan kesatuan manusia sebagai penerima Risalah-Nya. Dalam Islam, semua manusia asal mulanya adalah Muslim terkecuali kalau terbukti sebaliknya, karena setiap makhluk dengan fitrah kemakhlukannya tunduk kepada Penciptanya (Islam: tunduk kepada Allah).

Pemerintahan Islam adalah pemerintahan Allah yang didirikan ummat Islam yang meliputi minoritas non-Muslim yang hidup dalam lindungan Negeria-negeri Muslim, karena Allah memerintahkan berdirinya keadilan sebagai tujuan utama pemerintahan Islam. Ia juga meliputi minoritas Muslim yang hidup dalam wilayah-wilayah non-Muslim. Islam memperkenalkan kebebasan dan toleransi dengan mencela kediktatoran sebagai syirik. Karena, satu-satunya sumber wewenang adalah Allah. Tidak ada seorang pun: kelompok, kelas, ras, nasionalisme, mayoritas dan minoritas, yang mengklaim sebagai sumber otoritas, dan karenanya menolak kediktatoran dalam berbagai bentuknya kediktatoran individu,

mayoritas, minoritas, kelas, rasial, kediktatoran partai dengan landasan teologis. Ia memberikan minoritas status sama dengan mayoritas - yakni status tanggung jawab, bukan status otoritas, tanpa menghiraukan apakah mayoritas atau minoritas adalah Muslim atau non-Muslim. Otoritas dan kekuasaan adalah monopoli Allah dan bukan produk manusia, kelas, ras, kelompok, mayoritas atau minoritas. Tidak seperti Yahudi, 'bangsa terpilih atau Suci', yang hanya meliputi anak-anak Israel, yang menyebabkan timbul rasisme Zionis, dan tidak seperti 'masyarakat Zoroaster yang sampai-sampai mengizinkan zinah untuk menjaga kesucian masyarakatnya dari segala ketidaksucian rasial; tidak seperti masyarakat Hindu yang berdasarkan sistem kasta, dan tidak seperti nasionalisme modern yang negatif yang berdasarkan ras, warna, sejarah, geografi, budaya, politik, serta landasan sejenisnya (mayoritas, minoritas dan landasan serupa). Komunitas Islam adalah komunitas terbuka (Ummah), yang meliputi kaum Muslimin sedunia dan non-Muslim, yang hidup dalam negara Muslim, tanpa diskriminasi apa pun termasuk faham mayoritas dan minoritas. Para muallaf secara otomatis menjadi Muslim, memasuki komunitas Islam dan menjadi anggota sepenuhnya tanpa menghiraukan ras, kebangsaan, kebudayaan mereka, dan sebagainya. Sejarah Islam memperlihatkan perlakuan wajar dan adil bahwa non-Muslim dalam negeri-negeri Muslim diterima oleh kaum Muslimin sejak munculnya Islam.[24] Negara Islam yang sesungguhnya tidak pernah mengenal diskriminasi antara warganya. Kaum Muslimin hidup di luar wilayahnya dan non-Muslimin *(dzimmi)* hidup dalam wilayahnya. Pembebanan pajak Jiziyah atas warga non-Muslim yang dapat ambil bagian dalam mempertahankan Negara setelah mereka menjadi Muslim, justru sebagai ganti terhadap perlindungan yang mereka terima dari Negara dan untuk biaya pertahanan. ●

BAB 8
AKTIVISME ISLAM

Sistem moral Islam berbeda dari Yudaisme atau Kristen. Yudaisme mendasarkan nilai-nilai moral pada tindakan dan Halakha, serta masalah tindakan lebih daripada iman, dan di lain pihak, Kristen menempatkan iman di atas segala-galanya. Islam menuntut iman dan tindakan secara bersama. Penekanannya adalah pada tindakan yang disebabkan oleh iman dalam kerangka Syari'ah. Islam suatu keseimbangan antara iman (niyat) dan tindakan (amal), serta tidak mengakui yang satu tanpa yang lain atau dengan mengorbankan yang lain. Prinsip ini memerlukan aktualisasi prinsip-prinsip politik Islam dan menjadikannya kewajiban relijius bagi kaum Muslimin untuk menegakkan masyarakat dan pemerintahan Islam, karena belum memadai hanya mempercayai prinsip-prinsip politik, sebagaimana tidak cukup memiliki suatu sistem politik yang tidak berdasarkan Islam. Kristen Paulus secara eksplisit menolak hukum dan tindakan dan menyukai kemurahan iman, iman kepada Yesus. Dari situlah merosotnya Kristen, dan dari sudut pandang orang-orang Kristen Barat, agama turun ke tingkat urusan keimanan pribadi semata-mata. Orang Kristen, yang hanya memiliki dua hukum (cinta kepada Allah dan cinta kepada tetangga), memberikan penebusan melalui kesalehan batin, bukan kerelaan lahiriah, yang menyusutkan agamanya ke tingkat iman saja. Akibatnya, Kristen tidak memiliki jalan hidup tegas yang ditentukan, dan tentunya tidak punya sistem

politik.[1] Sebaliknya, Islam adalah jalan hidup dengan sistem politiknya sendiri yang harus didirikan; kalau tidak, maka Islam dan hukum Islam tidak terlaksana. Keseimbangan antara Iman dan amal dalam Islam telah menjadikannya suatu agama keseimbangan, dan ummat Islam diseimbangkan secara adil.[2]

Dalam Islam, realisasi hukum adalah sama pentingnya, jika tidak lebih penting dari iman. Islam adalah ketaatan yang diilhami oleh perasaan-perasaan dan tidak hanya yang satu atau lainnya. Realisasi hukum (Fiqih) di mana politik adalah suatu bagian penting, dipandang sebagai kewajiban relijius ummat Islam, dan para individu, karena berjuang bagi berdirinya sistem politik Islam, dipandang sebagai perang suci, serta orang-orang yang terbunuh dalam realisasinya dianggap syuhada.[3]

Tidak seperti orang shaleh Kristen yang biasanya mewujudkan pengabdiannya kepada Allah dengan menarik diri dari berbagai urusan keduniaan, orang shaleh Muslim menunjukkan pengabdiannya dengan hidup rapat dengan hukum di bawah sistem politik Islam. Bertentangan dengan ideal orang Kristen yang menjauhkan diri dari dunia ramai, seorang Muslim melibatkan dirinya dalam berbagai urusan di dunia ini untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. "Untuk menekankan pokok ini, saya menyebut, terutama sekali, seorang Muslim yang shaleh sebagai aktivis Muslim'[4] — aktif secara politik juga. Islam memiliki tatanan sosiopolitiknya sendiri. Realisasi tatanan ini dengan sendirinya mesti berarti bahwa budaya, politik yang tak Islami, anti-Islam atau asing, dan tuan-tuan asing, yang mungkin mencampuri realisasinya, harus dihentikan, dihindarkan dan diperangi. Jadi, seorang aktivis Muslim shaleh selalu berjuang dan berperang untuk menghapus pengaruh dampak, campur tangan dan dominasi asing. Jadi, dia juga berusaha keras bagi legalisme pelaksanaan sepenuhnya hukum Islam atau tegaknya sistem politik Islam.

Aktivisme Islam, atas dasar nilai-nilai moral Islam, sebagai prinsip revolusioner juga dijelaskan dalam istilah-istilah positivisme Islam dibandingkan dengan, misalnya, pasifisme Kristen. Kristen tampil dengan penghapusan perang sepenuhnya menurut perkataan Yesus: "Tetapi saya katakan padamu, bahwa ja-nganlah kamu menentang kejahatan; melainkan siapa pun yang memukulmu di pipi kananmu, beri dia pipi yang lain juga...Dan

siapa pun yang akan memaksamu untuk pergi satu mil, pergilah dengannya dua kali lipat".[5] Seorang Kristen, secara ideologis, tidak menentang penindasan dan tirani terhadap dirinya, apa lagi terhadap orang lain. Sebaliknya, Islam secara tegas menyetujui perang dan perjuangan melawan penindasan.[6]

Islam menyatakan perang terhadap penindas, dan membantu orang-orang yang tertindas tanpa menghiraukan apakah si penindas atau yang tertindas itu Muslim atau non-Muslim, sebagai suatu kewajiban relijius dan jihad atau perang suci. Qur'an mengatakan: "Kenapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan demi orang-orang yang tertindas."[7] Dan jika dua golongan di antara orang-orang yang beriman terlibat perang, maka damaikanlah antara keduanya. Dan jika golongan yang satu di antara mereka berbuat aniaya terhadap yang lain, perangilah yang berbuat aniaya itu sehingga ia kembali kepada perintah Allah. Maka jika ia kembali, damaikanlah antara keduanya secara adil, dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."[8] Al-Qur'an, *Sunnah* dan *Ijma'* setuju mengenai keadilan sebagai tujuan terakhir *Syari'ah.* Pentingnya menegakkan keadilan berarti berperang dan berjuang melawan tirani dan penindasan. Jadi, berperang untuk membela si tertindas, apakah Muslim atau bukan, adalah suatu perintah yang berhak mendapatkan ganjaran. Dalam konteks ini, ketika negara Islam atau ummat Islam bangkit dan menyatakan perang, itu dalam ikatan Syari'ah yang menjelaskan tujuan peperangan dan pemberontakan untuk mendirikan keadilan dan menekan tirani serta penindasan. Nabi menyisipkan, dalam perjanjiannya, tentang persekutuan "tidak mendukung sekutunya apabila mereka beralih menjadi penindas, dan membantu mereka jika mereka menjadi yang tertindas".[9] Pada saat diadakan perjanjian tersebut, sekutu-sekutunya masih politeis (musyrik). Sebenarnya, Nabi bersumpah untuk membantu setiap orang yang tertindas, termasuk musyrikin, dan memerangi para penindas, termasuk Muslim. Ini benar-benar berperang melawan penindasan dan berjuang demi keadilan: prinsip yang paling revolusioner. Bentuk dan sebab dari kezaliman dan tirani adalah: penindasan, pelanggaran, diskriminasi, eksploitasi, keserakahan dan korupsi, kolonialisme dan rasisme; peperangan terhadapnya secara tegas dianjurkan oleh Al-Qur'an,[10] Sunnah dan Islam. Oleh

karena itu, ia tidak melebihi hak hukum dari negara Islam atau ummat Islam untuk menyatakan pemberontakan terbuka dan untuk berJihad atau berperang suci terhadapnya dan terhadap orang-orang serta negara-negara yang mempraktekkan, menyebarkan dan menyebabkannya. Sebenarnya, prinsip *Amr bi al-Ma'ruufi wa al-Nahy 'an al-Munkar* dan kewajiban perjuangan suci atau Jihad atau pemberontakan melawan penindasan, keabsahannya bersumber pada watak nilai-nilai spiritual Islam dan dari tata moral Islam, dari situlah suci dan syahadahnya orang-orang yang turut berperang melawan penindasan dan tirani. Ayatullah Imam Khomeini telah sering menjelaskan pokok ini dalam kuliah-kuliah dan ceramahnya.[11]

Mungkin alasan kenapa Islam mewajibkan perjuangan dan perang melawan penindasan dalam istilah nilai-nilai spiritual dan hukum moral sebab Islam berusaha memperkenalkannya kepada manusia dan Muslimin, sebagai fitrah kepada kebijaksanaan manusiawi, dan dengan demikian memperkenalkannya sebagai suatu prinsip universal, dan karenanya menganjurkan seluruh manusia berjuang dan berontak melawannya, dan inilah universalisme revolusi Islam.

Prinsip yang paling revolusioner berkenaan dengan penindasan ialah Islam bukan saja mewajibkan untuk memeranginya, tetapi adalah suatu dosa besar untuk tinggal secara hina bersamanya dan menerimanya. Dalam Islam, manusia tidak bebas untuk menerima atau memperkenankan penindasan dan tunduk kepada penindasan, karena ini akan mendorong tirani, kezaliman dan penindasan. Seseorang yang rela untuk dibunuh dan ditindas adalah sama berdosanya dengan si pembunuh dan si penindas. Inilah arti sebuah ucapan Nabi: "Pembunuh dan yang dibunuh keduanya dalam neraka" atau "penindas dan yang ditindas keduanya dalam neraka".[12] Dengan memberikan keabsahan spiritual dan moral untuk perjuangan dan pemberontakan melawan penindasan, Islam berusaha untuk memperkenalkan perang sebagai perang atas landasan prinsip, tanpa menghiraukan hasil. Dalam sorotan ini, perjuangan aktual dan pemberontakan adalah baik dan wajib, karena ia dipandang sebagai *Jihad.*

AKTIVISME POLITIK ISLAM

Mengevaluasi dan membahas Islam, teologi dan sejarahnya secara murni dalam istilah-istilah yang sesuai dengan kebudayaan Barat dan dalam istilah-istilah respons kepada Barat, karena sudah menjadi kebiasaan kebanyakan orientalis dan kebijakan media Barat itu, menyesatkan. Dan hasil dari etnosentris dan keangkuhan, dan sama sekali tidak ilmiah. Fakta yang paling penting tentang Islam ialah dalam esensinya, ia adalah suatu wahyu ilahi dari fitrah kebenaran dan realitas, dengan methode dan pendekatannya sendiri adalah setua Islam itu sendiri, dan juga dari asal ilahi bagi berlabuhnya kesadaran akan kebenaran dan realitas dalam setiap bidang kehidupan manusia, termasuk bidang sosio-politik. Atas dasar asal ilahiahnya dan fitrah kebenaran, Islam adalah keras, tidak memihak dan netral. Jadi, keasliannya total, terlepas dari konfirmasi dan penolakan oleh manusia. Jadi, ia adalah suatu sistem "de jure" dengan kepercayaan akan kemenangan kebenaran akhir. Jadi, Islam bukan semata-mata kebenaran yang tidak memihak, tetapi usaha yang aktif dan bertekad untuk mengangkat kebenaran itu setinggi-tingginya dan diakui dunia, atau dalam perkataan Al-Qur'an, untuk "menjadikan kalimat Allah itu tertinggi" (Qur'an, 9:40). Di bawah aspek ini, Islam adalah suatu kekuatan siap tempur, suatu agama revolusioner dengan suatu sistem politik aktif dinamis, dengan suatu misi yang hendak dicapai, dengan suatu kewajiban dan tujuan untuk mendirikan kebenaran dan keadilan serta untuk menolak kebatilan, kezaliman dan penindasan.[13] Bahkan strategi dan taktik untuk menaklukkan dunia bagi kebenaran dan untuk mendirikan keadilan berdasar ilahi. *Jihad* dan *amar makruf nahi mungkar* adalah dua dari taktik otentik ilahiah ini. Al-Qur'an, Sunnah, kehidupan Nabi dan para Imam serta para pengganti mereka yang sejati, menjelaskan pendekatan yang benar untuk memenangkan kebenaran dan meletakkan contoh bagi kaum Muslimin tentang kehidupan Islam yang aktif dan siap tempur, sesuatu yang memungkinkan tegaknya suatu tatanan dunia yang memberikan kesaksian tentang kebenaran, dan dengan demikian lebih merupakan pelengkap ketimbang menentang dimensi pemikiran dan kesungguhan tafakkur dari wataknya yang diberkati yang pada gilirannya merupakan

suatu taktik ilahi yang lain bagi tegaknya kebenaran. Jadi, dalam aspek kebenarannya yang tidak memihak, Islam kebal terhadap segala tantangan dan dalam aspek kebenaran, siaga tempurnya, menghadirkan suatu tantangannya sendiri terhadap segala sistem pemikiran dan kepercayaan dalam berbagai bidang teologi, politik dan dalam bermacam-macam asumsi serta kebiasaan pikiran yang membentuk mentalitas modern. Sebenarnya, tantangan yang diajukan Islam terhadap mentalitas modern adalah bermuka banyak. Yang kepentingan terbesar dan paling radikalnya adalah penegasan utama tentang Daya Cipta dan Kedaulatan Allah,[14] dan dari sini tantangan politik Islam terhadap pemikiran politik dan sistem modern, yang pada gilirannya watak revolusioner Islam yang inheren.

Kebenaran, menurut Islam, berhubungan erat dengan yang absolut (Allah) dan bukan produk dari para individu. Oleh karena itu, ia tidak relatif dan bervariasi menurut kecenderungan pribadi, watak, keadaan dan tingkah serta kesukaan individu-individu. Kebenaran, menurut wataknya, harus tak acuh terhadap keadaan yang berubah-ubah. Islam menjelaskan bahwa kebenaran bukan definisi manusia sendiri tetapi berada di sisi Allah dan berasal ilahi serta dalam suatu pengertian, eksternal bagi manusia yang harus diungkapkan dan diwujudkan dengan jalan pendekatan dan caranya yang ilahi Islami.[15]

Jadi, tantangan, militansi dan revolusi Islam merupakan suatu tantangan terhadap mentalitas modern, terhadap semua "isme-isme" modern, sehingga merampas otoritas kebenaran yang absolut. Professor H. Algar menyimpulkan pembahasannya yang bermutu mengenai pokok ini, sebagai berikut: "Namun kami tidak berhasrat untuk memberikan kesan, bahwa Islam adalah semata-mata sekumpulan perlawanan terhadap mentalitas modern. Malah, merupakan suatu perangkat doktrina dan praktek otonom yang terintegrasi dan koheran bersandar pada suatu pandangan-dunia yang sama sekali terpisah dari pandangan-dunia modern. Islam menawarkan kepada manusia modern, bukan sekumpulan penyelesaian bagi berbagai masalahnya, tetapi suatu pilihan yang berbeda arah secara radikal."[16] Pilihan pengarahan tentu saja ditunjukkan dalam bidang sistem politik Islam sebagai sarana untuk berdirinya umat Islam yang sesungguhnya, yang dengan itu

kebenaran dan keadilannya diwujudkan, diperoleh, dicapai, dilindungi, dijaga dan dipertahankan. Ali Syariati mengatakan: "Kepercayaan dalam Imamah harus berguna di dunia ini agar membawa hasil-hasil di dunia yang akan datang."[17] dan karenanya memperkenalkan aktivisme dan militansi Islam dalam bidang relijius dan politik. Sayyid Hasan Mudarris juga mendasarkan aktivitas politiknya atas Kesatuan Agama dan politik serta aktivisme Islam.

Kami ingin menunjukkan lagi bahwa sifat inklusif Islam dan kesatuan agama dan politik bukan berarti kemakmuran sekuler dan material adalah tujuan Islam, juga bukan merupakan bagian dari komponen Islam. Ia selalu tinggal sebagai sarana untuk memberikan manusia keamanan, memampukannya melaksanakan berbagai kewajiban agamanya, sehingga manusia dapat mengamankan keselamatannya yang kekal. Sekularisme dan materialisme tentu saja menyangkal dan menolak Islam, dan sebaliknya. Kebahagiaan dan kesejahteraan manusia dalam Islam tidak diukur dengan istilah-istilah material dan duniawi. Dalam suatu pengertian, ini membuat sistem politik Islam suatu sistem yang unik dan suatu sistem yang revolusioner. Setiap sistem pemikiran yang tidak memandang Allah dan kesatuan dengan-Nya sebagai tujuan, objektif dan sasaran penciptaan, adalah tak-Islami. Dalam Islam, keprihatinan terakhir malah bukan manusia sebagai suatu entitas yang independen. Islam tidak mengusulkan kesatuan sekularisme, materialisme dengan spiritualisme, karena mereka tidak dapat bersatu. Islam mengusulkan kesatuan agama dan politik, kesatuan umum dan pribadi, kesatuan nasional dan internasional dan keselarasan berbagai kebutuhan fisik, material dan duniawi dengan kebutuhan spiritual dan relijius

Aktivisme Islam telah memberikan kepada Islam ciri revolusionernya dan memperkenalkannya sebagai agama yang militan dan aktif. Sebuah analisa singkat tentang aktivitas politik dan revolusioner Muslimin dalam dua abad terakhir menjelaskan hal ini.

Perang yang terpanjang dan tersengit melawan kekuatan kolonial dan imperialis dunia, Barat dan Timur, telah dilaksanakan oleh kaum Muslimin. Tidak ada yang dapat menyogok atau mer-

intangi mereka dalam perang sucinya. Tanpa politik Islam Militan, kebebasan dan kemerdekaan akan memakan waktu yang lebih lama, yakni jika Islam revolusioner dan perjuangan kebebasan tidak dimenangkan dan seperti yang sebelumnya terjadi di Indonesia, Afganistan, Sudan, Somalia, Libya, Aljazair, Maroko, Afrika Tengah-Barat dan tempat-tempat lainnya, di samping suntikan besar Islam dalam gerakan nasional Iran dan sebagian dalam pembebasan Mesir.[18]

Gerakan Iran bagi nasionalisasi minyak dan kampanye mereka menentang imperialisme Inggris tahun 1950 tidak akan berhasil tanpa aspirasi Islam dan tanpa pertolongan dari kepemimpinan relijius. De lesseps, pembangun Terusan Suez, yang berbicara sekaitan dengan Aljazair, mengungkapkan keterkaitan ini (nasional, sosial, politik dan berbagai aspirasi Islam) dengan sangat ringkas ketika ia berkata: "Betapa omong kosong yang telah ditulis tentang fanatisme keras orang-orang Arab Aljazair... Fanatisme sebagai patriotisme hampir tidak ada hubungannya dengan perlawanan bangsa Arab, agama adalah satu-satunya bendera di mana mereka dapat bersatu."[19]

Seorang pengamat kontemporer tentang Dunia Ketiga dan gerakan gerakan orang Asia-Afrika percaya bahwa "tanpa Islam, gerakan-gerakan Asia-Afrika mungkin telah digagalkan. Dan tanpa gerakan Asia-Afrika, tidak akan ada kelompok bangsa-bangsa 'nonblok', dan tanpa kelompok itu tidak akan ada kelompok ekonomi "tujuh puluh tujuh".[20] Dengan sedia membayar harganya dan bergabung dengan gerakan rakyat, Islam selama 150 tahun menerima tranfusi darah terus-menerus dari perjuangan itu untuk mendorong Eropa keluar dari Asia dan Afrika dan kembali ke Eropa.[21] Perjuangan Asia dan Afrika melawan Neokolonialisme dalam masa yang akan datang hanya dapat berhasil dengan aspirasi Islam.

Jawabannya terhadap pertanyaan, kenapa dalam bermacam-macam negara Muslim, Islam dan gerakan pembebasan begitu saling terpaut sehingga dalam tindakan tampak satu dan sama? Ada tiga jawaban: pertama ada pada dasar Islam itu sendiri yang totalis (mencakup semua). Penolakannya untuk membuat sesuatu perbedaan dan pemisahan antara agama dan politik memerlukan perhatian yang tepat dan adil dari keimanan. Kedua, kekuatan

atau organisasi apa yang ada di sana yang dapat mengawal, mengilhami dan menyalurkan perjuangan? Tidak ada nasionalisme, berstruktur atau tak berstruktur; yang datang kemudian dan hanya merupakan produk, bukan sebab dari gerakan-gerakan nasionalisme atau revolusi menentang kehadiran Barat. Baru dalam tahun 1920-an partai politik nasionalis sekular muncul, dan hanya terdapat pada sebagian kecil negara-negara Afrika dan Asia.

Demikianlah, melakat pada Islam struktur-struktur tradisional, karena ia memiliki sekolah Al-Qur'an, Masjid, Haji, untuk memberikan semacam struktur perjuangan yang terorganisasi. Ketiga, melalui Ulamanya, Islam menyediakan satu-satunya kelompok para pemimpin. Ini karena, dalam kebanyakan negara-negara Asia-Afrika, kelompok-kelompok kepemimpinan umum, para penguasa kerajaan, aristokrat atau kelas tuan tanah (dan baru-baru ini unsur *Wsesternized,* para intelektual dan kelas didikan Barat) biasanya memihak kepada para penguasa asing. Tetapi, syekh-syekh pedesaan yang rapat dengan rakyat, turut mengikuti perasaan nasionalis mereka dan tidak dapat tidak menjadi pemimpin lokal. Keberhasilan masa depan dari gerakan Asia-Afrika, keamanan bagi kebebasan dan kemerdekaan masyarakat Muslim di masa mendatang terletak pada Islam, sebagaimana di masa lampau.

*Keberhasilan gerakan-gerakan pembebasan di dunia Muslim tergantung pada keberhasilan mereka dalam meng-Islamkan gerakan mereka dan dalam keadaan diilhami Islam. Kepemimpinan yang tidak mementingkan diri sendiri dan kekuatan-kekuatan serta ideologi memerlukan keberhasilan gerakan-gerakan ini yang hanya dapat diberikan oleh Islam dan hanya dapat dihasilkan oleh aspirasi Islam. Pemberhentian pertama pasang imperialisme yang terus meluas adalah oleh kaum Muslimin Afghanistan pada tahun 1942, tahun terakhir dari Perang Afganistan Pertama, ketika barisan tentara Inggris yang mundur dari Kabul disapu bersih. Ini terjadi ketika imperialisme Inggris berada pada puncak kekuasaannya.[22] Hampir semua gerakan kemerdekaan dan pembebasan di dunia Muslim diilhami Islam dan dipimpin oleh Ulama. Contoh yang paling terkenal dari hal ini, yakni Aljazair, yang banyak memiliki aspirasi Islam. Kedua kekejangan besar nasion-

alisme Aljazair, yang pertama perjuangan di bawah Abdul Qadir dari tahun 1832 dan kedua pada perang kemerdekaan, memiliki kandungan Islam yang kuat. Bendera kemerdekaan hijau-putih Aljazair adalah bendera yang didisain dan digunakan oleh Abdul Qadir.[23] Dengan bangkitnya, rakyat Aljazair jelas menyatakan secara tegas kelanjutan perjuangan mereka dan politik-agama leluhurnya suatu tanda peringatan bagi hubungan yang berpusat antara Islam militan dan perjuangan kebebasan.[24]

Kampanye melawan Rusia oleh kaum Muslimin yang hidup di bawah dominasi Rusia berlangsung lama dan yang mengambil bentuk serangkaian peperangan dan pertempuran, hanya memiliki satu pola dan ciri: Semua itu adalah gerakan berwatak relijius, sesuatu yang merupakan jihad, dipimpin oleh para pemimpin agama.[25]

Kekuatam-kekuatan kolonialis dan imperialis, apakah Barat atau Timur (Rusia), yang selalu mencap gerakan-gerakan antikolonial, antiimperialis kaum Muslimin sebagai fanatik, dan menyebut Muslimin sebagai kaum fanatik, istilah yang tepat sama dengan yang digunakan dalam sejarah Modern oleh Media Berita Imperialis untuk mendiskreditkan gerakan Islam kontemporer, terutama Revolusi Islam Iran.

Gerakan anti-Inggris di India, yang bukan negara mayoritas Muslim, termasuk Pemberontakan India, sebagian dipimpin oleh Ulama dan memiliki kandungan Islam.[26] Gerakan kemerdekaan dan antikolonial Libya serta Gerakan Revolusi kontemporer Libya memiliki kandungan Islam dan sebagian besar didukung aspirasi dan ideologi Islam, termasuk aspirasi Islam Sufi.[27] Lumrahnya, Gerakan-gerakan antikolonial, antiimperialis, perjuangan-perjuangan melawan Barat dan juga melawan Rusia pada asalnya demi Islam, oleh Islam, serta dipimpin oleh para Ulama Muslim. Demikian halnya dengan hampir semua perjuangan di seluruh dunia Muslim pada masa sejarah lalu dan kontemporer. Demikian juga di masa mendatang.

Salah satu alasan mengapa gerakan Pembebasan Rakyat Palestina lambat memperoleh keberhasilannya mungkin karena unsur-unsur sekuler telah meniggalkan dampaknya pada gerakan tersebut, dan merampasnya kandungan dan kepemimpinan Is-

lamnya. Rakyat Muslim dan Kristen Palestina harus melengkapi gerakan Pembebasan mereka dengan kandungan, aspirasi dan ideologi relijius serta tegak bersama melawan musuh bersama mereka, supaya Gerakan mereka berhasil.

Konsep Sejarah Islam

Konsep sejarah Islam juga memberikan sumbangan terhadap tradisi revolusioner dan dinamisme Islam. Bagi Muslim, sejarah merupakan suatu proses yang hidup dengan suatu tujuan untuk dicapai dan dengan tekad mencapai tujuan itu; menegakkan ummat Islam yang adil dan universal. 'Sementara merujuk model masa lalu, Muslimin juga mengharapkan tercapainya ummat Islam yang tertransformasi dan sempurna ke masa depan yang dapat diramalkan. Islam Revolusioner, terutama dalam bentuk Mahdinismenya, mengusulkan suatu konsep sejarah sebagai cakupan suatu konflik yang berkelanjutan antara para penindas *(Thagut)* dan orang-orang yang tertindas *(mustadh'afin)*, membimbing, dengan suatu proses yang dipahami sebagai suatu kebutuhan sejarah, untuk kemenangan terakhir orang-orang yang tertindas.[28] Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan beramal shaleh, bahwa Dia akan sungguh-sungguh menjadikan mereka khalifah-Nya.[29] Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi dan hendak menjadikan mereka para pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi.[30] Sebagaimana kita ketahui, tradisi Islam, Sunnah, sumber kedua dari Syari'ah, bukan tradisi-tradisi mati milik masa lalu, tetapi pola-pola dan model yang membentuk masa depan manusia. 'Ada suri tauladan yang baik bagimu untuk mengikuti Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya'.[31] Sesungguhnya, telah ada pada Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi siapa saja yang mengharapkan Allah dan hari akhir'.[32] Jadi, sejarah bagi kaum Muslimin adalah sains (ilmu pengetahuan), yang menjadikan manusia khalifah Allah dan suatu disiplin yang memandang ke depan dan bukan disiplin yang memandang ke belakang.

Al-Qur'an dan Sunnah menyatakan bahwa ada suatu rencana ilahi dalam sejarah. Jadi, Islam percaya akan determinisme sejarah

ilahi yang berbeda sepenuhnya dari determinisme sejarah materialis Marxis. Al-Qur'an menjelaskan determinisme sejarah dengan istilah-istilah ketaatan atau kedurhakaan kepada Allah dan dalam istilah-istilah realisasi Hukum Ilahi, termasuk hukum-hukum alam universal. Al-Qur'an mengatakan: "Allah telah berjanji kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan beramal shaleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menganugerahi mereka warisan di bumi, sebagaimana Dia menganugerahinya kepada orang-orang sebelum mereka, bahwa Dia akan menegakkan otoritas agama mereka".[33] Pelaksanaan tanggung jawab manusia pasti akan mengantarkan kepada kemenangan ilahiah karena "Allah tidak merubah keadaan suatu kaum tanpa mereka merubah keadaan mereka sendiri",[34] dan "Dia menolak untuk melakukan berbagai hal kecuali dengan cara mereka dan melalui jalur-jalur yang patut". Jadi, itu berarti apabila ummat merubah diri (yakni revolusi), melaksanakan tanggung jawab mereka dan mempersiapkan berbagai kondisi serta menggunakan sarana-sarana itu, maka rencana ilahi bahwa keadaan mereka harus juga berubah, dan karenanya mereka menerima apa yang pantas, yakni kemenangan dan keberhasilan puncak dan pasti. Ini disebabkan Islam percaya akan hukum kausalitas, juga dalam bidang sosio-politik. Ia merupakan rencana ilahi dan hukum sejarah serta ditentukan oleh Allah untuk menjadikan orang-orang shaleh yang tertindas, kendati mereka terus berjuang *(al-Mustadh'afin)*, sebagai pewaris bumi. Al-Qur'an mengatakan: "Sebelum ini, Kami tulis dalam Zabur, bahwa orang-orang shaleh akan mewarisi bumi."[35] 'Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi untuk menjadikan mereka para pemimpin dan menjadikan mereka pewaris".[36] Jadi, Allah telah menjadikan suatu hukum ilahi bahwa orang-orang yang pantas dan yang tertindas pada akhirnya pasti akan menjadi para pemimpin dan pewaris. Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berjuang demi orang-orang yang tertindas dan demi keadilan.[37] Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa jika orang-orang yang tertindas memutuskan untuk merubah keadaan mereka, dan orang-orang yang beriman di seluruh dunia berperang untuk menolong mereka mencapai kemenangan, maka rencana sejarah ilahi ialah mereka pasti akan berhasil. Jadi, kemenangan akhir revolusi dijamin. Ini juga merupakan penjelasan Mahdiisme. Aktivisme Islam,

Mahdiisme, determinisme sejarah dan universalisme dan keserbalengkapan Islam dan seterusnya telah menjadikan Islam suatu agama revolusioner universal menurut wataknya.

Haruslah diingat bahwa sumber-sumber yang membangkitkan determinisme sejarah Islam adalah manusia. Jadi, determinisme Islam tidak didasarkan pada fatalisme. Sesungguhnya, ia lebih didasarkan pada aktivisme ketimbang fatalisme. Ada dua macam determinisme sejarah: yang negatip mengatakan bahwa keselamatan dan pemerintahan yang adil pada akhirnya akan berdiri, sementara korupsi dan kezaliman yang berlaku adalah keharusan alami sejarah. Menentangnya berarti sia-sia. Islam mengutuk sikap ini, dan membela determinisme sejarah yang positif-aktiv. Determinisme sejarah dalam Islam dan tentang akan datangnya Zaman Keemasan yang adil diterima dalam revolusi dan aktivisme. Revolusi dan partisipasi aktif manusia terhadap masa depannya dan masa depan ummatlah yang menyebabkan keselamatan akhir, kedamaian dan keadilan bagi dunia. Ia merupakan ideologi progresif yang berorientasi ke masa depan, bertentangan dengan konservatisme, pasifisme, negativisme, anarkisme, klasikisme, tradisionalisme, dan fatalisme. Al-Qur'an mengatakan: "Allah tidak merubah keadaan suatu kaum tanpa mereka merubah keadaan mereka sendiri".[38] "Orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap diri mereka, ketika mereka ditanya: 'Kenapa keadaan kamu begitu menyedihkan?' Mereka menjawab: 'Kelemahan kami adalah dieksploitasi oleh musuh-musuh kami.' Maka kepada mereka akan dikatakan: 'Apakah bumi Allah tidak cukup luas?' (Bagimu kesempatan untuk berpindah dan menolak penindasan serta berdiri melawan eksploitasi). Maka, mengapa kamu tidak berhijrah dan keluar dari bebanmu?" Orang-orang seperti ini akan berada di neraka yang kekal sebagai tempat kediaman mereka. Seburuk-buruknya tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan, ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya."[39] Banyak ayat Al-Qur'an seperti dikutip ini, meninggalkan kita tanpa keraguan bahwa determisme sejarah Islam adalah determinsme positif yang aktif, bukan fatalisme negatif.

Ini juga berlaku dengan Mahdiisme. Adalah watak keimanan Mahdisme untuk mempercayai "kembalinya Zaman Keemasan"

dalam revolusi yang akan menghasilkan pemerintahan yang damai dan adil masa depan. Ia juga merupakan suatu ideologi yang progresif, berorientasi ke masa depan, bertentangan dengan konservatisme, klasikisme, tradisionalisme dan sistem-sistem de facto.[40] Ali Syariati menjelaskan Mahdiisme dan pengharapan *(Intizhar)* sebagai berikut: "Manusia yang berharap adalah manusia yang siaga, siap untuk berperang jihad terakhir, yang pasti akan terjadi." karena *Intizhar* (mengharapkan kedatangan Juru selamat, Mahdi) adalah determinisme sejarah. Akan ada suatu revolusi. Revolusi ini akan berhasil. Karenanya, manusia harus mengatakan tidak untuk terhadap kenyataan yang ada, memberontak melawan kondisi-kondisi yang ada.[41] ●

BAB 9
MAHDIISME SEBAGAI SEBUAH TRADISI GERAKAN ISLAM[1)]

Ajaran Mahdiisme, meskipun asalnya khusus berkaitan dengan Syi'ah, namun hampir menjadi bagian integral dari Sunnisme populer; karenanya berulang kali secara konstan terjadinya gerakan Mahdi dan Mahdiisme sepanjang dunia Islam pada semua periode sejarah Muslim. Sebagian menjadi tokoh besar dunia yang menegakkan kekuasaan mereka di atas wilayah-wilayah yang luas, seperti Ubaidillah, (pendiri dinasti Fatimiah abad kesepuluh), Ibn Tumart (pendiri dinasti Almuhad abad kedua belas), dan di zaman modern Muhammad Ahmad, Mahdi Sudan, pemberi ilham salah satu dari negara-negara besar Islam Afrika prakolonial terakhir. Gerakan-gerakan Mahdi ini di Afrika mengambil ciri-ciri revolusioner antikolonial dan gerakan-gerakan antiimperialis. Kolonialis dan imperialis Barat biasanya diidentifikasikan sebagai Dajjal, menurut laporan yang mengerikan dan kadang-kadang fantastik dari laporan Tomlinson Lethern suatu faktor yang memperbesar penyebaran propaganda Mahdi adalah: 'Kepercayaan yang meluas bahwa akhir yang akan terjadi pada 1400 H. (1979 M.) akan didahului oleh supremasi nabi palsu (Dajjal atau anti-Yesus), yang diikuti oleh kedatangan kembali Nabi Isa, setelah itu seluruh dunia menjadi Islam. Telah menjadi praktek para penghasut belakangan ini untuk mengidentikkan para penakluk bangsa Eropa atas negara-negara Muslim dengan Dajjal'[2] Prinsip Mahdiisme memainkan peran utama dalam ruh revolusioner Syi'ah, karena

setiap pemerintahan sekular yang tak adil dianggap sebagai tidak sah. Dr. Ali Syariati, seorang pemimpin revolusioner Iran, memberikan suatu peranan yang penting pada prinsip ini dalam Syi'ahisme Revolusioner (Syiahisme Merah).[3] Mahdi Bazargan, pemimpin Iran yang lainnya, juga menyelidiki nilai-nilai positif dari Mahdiisme. Ia menolak pikiran bahwa antisipasi Mahdi, yang kemunculan kembalinya akan berarti penggulingan tatanan yang ada, dan pembukaan Zaman Keemasan yang adil, adalah suatu prinsip yang pasif. Jika Syi'ah menerima nasibnya dan duduk menunggu kedatangan Messiah, ini akan mengundang orang-orang jahat untuk merampas otoritas. Jika Syi'ah mengambil penafsiran yang pasif atas makna kegaiban *(Ghaibat)* Imam, maka ini berarti bahwa mereka tidak melakukan apa-apa, Imam akan melakukan segalanya. Dalam pada itu, tidak ada orang yang akan berdo'a, tidak ada yang akan mengajar dan tidak ada orang yang akan berijtihad.[4]

Dr. Ali Syariati menjelaskan pokok ini sebagai berikut: "Periode di mana kita hidup, periode kegaiban besar adalah periode *ilm* (pengetahuan). Periode ini juga merupakan periode pengharapan besar *(Intizhar)* bagi kembalinya Mahdi juru selamat. Ada dua macam *Intizhar*. Yang negatif mengusulkan bahwa keselamatan dan keadilan akan diperoleh hanya dengan datangnya Imam Ghaib. Katanya, untuk sementara ini korupsi dan kezaliman yang berlaku adalah kebutuhan-kebutuhan sejarah yang lazim. Menentangnya adalah sia-sia.

Sikap ini terkutuk. Aspek positif dari Mahdiisme adalah sikap yang bercita-cita. Adalah watak kepercayaan aktiv dalam keimanan Mahdiisme yang mempercayai kembalinya "Zaman Keemasan yang adil" dan kedamaian dalam revolusi yang akan menghasilkannya. Ia merupakan suatu ideologi progresif yang berorientasi ke masa depan, bertentangan dengan konservatifisme, kelasisme dan tradisionisme. *Intizhar* atau pengharapan adalah futurisme menurut wataknya. Ia adalah Gerak menuju masa depan yang kedatangannya merupakan kemestian. Seseorang yang dalam pengharapan adalah mengharap ke masa depan. Seseorang tidak dapat mengharapkan masa lalu. *Intizhar* adalah harapan, dan harapan berarti kehidupan dan masa depan. Kepercayaan akan kemenangan yang tak-bisa-tidak oleh keadilan atas

tirani, kedamaian atas perang, kebebasan atas penindasan, adalah dimensi dan ciri utama Mahdiisme."

Ibnu Khaldun yakin bahwa semua Muslim percaya akan Mahdiisme. "Telah terkenal dan umumnya diterima oleh semua Muslim pada setiap masa, bahwa pada akhir zaman seseorang dari keluarga Nabi pasti muncul, tidak bisa tidak. Orang yang akan memperkuat agama dan memenangkan keadilan. Muslimin akan mengikutinya dan akan memperoleh dominasi atas dunia Muslim. Ia akan dinamakan Mahdi. Dengan mengikutinya, Dajjal akan muncul bersama-sama dengan segala tanda-tandanya tentang waktu (Hari Pengadilan). Setelah al-Mahdi, (Nabi) Isa akan turun dan membunuh Dajjal. Atau Isa akan turun bersama-sama dengan Mahdi dan membantunya membunuh Dajjal dan menjadikannya sebagai imam dalam shalatnya."[5] Jadi, bukan hanya suatu kepercayaan Syi'ah. Kepercayaan Mahdiisme lebih dulu menjadi bagian yang integral dari aliran Sunni umumnya. Namun, bagaimanapun, ia merupakan bagian yang esensial dari Syi'ahisme. Ia ditimbulkan berulang kali oleh para pemimpin revolusi Iran selama rezim penindasan Syah yang terguling. Ali Syariati dan Mehdi Bazargan adalah dua pemimpin terkemuka yang menggunakan ajaran Mahdiisme untuk mendorong masyarakat dalam perjuangan mereka bagi Revolusi Islam.[6] Khususnya buku Mehdi Bazargan, *"Kemenangan yang Tak Terelakkan" (The Inevitable Victory).* Ia mendasarkan argumennya pada ayat Al-Qur'an yang menyatakan kemenangan yang tak terelakkan dari orang-orang yang shaleh: 'Allah telah berjanji, orang-orang yang percaya, beriman dan beramal shaleh, bahwa Dia akan sungguh-sungguh menganugerahi mereka kemenangan terakhir dan warisan di bumi, sebagaimana Dia menganugerahi orang-orang sebelumnya, dan bahwa Dia akan menegakkan otoritas agama mereka yang telah Dia pilih bagi mereka, dan bahwa Dia akan memberikan mereka keamanan setelah ketakutan".[7] 'Kami tulis dalam Zabur sebelum ini bahwa hamba-hamba-Ku yang beramal shaleh akan mewarisi bumi'.[8] 'Kebenaran telah tiba dan kebatilan telah dimusnahkan; karena kebatilan pasti musnah'.[9]

Ajaran Mahdiisme juga memberikan kepada Muslimin, apakah Syi'ah atau bukan, suatu konsep khusus tentang sejarah sebagai suatu proses yang hidup dan dinamis dengan suatu tujuan,

kemenangan yang tak terelakkan dari orang-orang shaleh, dan melengkapi mereka dengan determinisme sejarah dan universalisme Islam serta persaudaraan. Mahdiisme, determinisme sejarah Islam, universalisme serta persaudaraan juga memberikan kepada syahadah suatu kedudukan khusus dalam Islam sebagai alat menegakkan kerajaan Allah dan keadilan di bumi serta menjadikannya dikenal. Maka di antara orang-orang awam, tema-tema tentang Mahdiisme dan syahadah diresapkan selama Revolusi Islam di Iran, dan setelah keberhasilannya, diberi arti dan makna yang baru. Ini menjadi alat yang kuat untuk memerangi pengaruh asing dan rezim anti-Islam bekas Syah. Selama dua dekade terakhir usaha-usaha telah dibuat di dalam dan di luar lembaga-lembaga relijius tradisional untuk membataskan, memperkenalkan kembali konsep-konsep Islam dan mazhab Syi'ah, yang pada gilirannya memberikan kepada Islam sebuah sisi sosio-politik yang lebih tajam, sebuah seruan yang lebih terarah kepada para generasi muda dan orang-orang beriman yang modern.[10]

Sebagaimana telah kami tunjukkan, konsep Mahdiisme memainkan suatu peranan yang sangat penting dalam ideologi Syi'ah. Namun, ia pun penting dalam ideologi Sunni. Bahkan, bermacam tanda yang dianggap menunjukkan kedatangan al-Mahdi, identik dalam sumber-sumber Syi'ah dan Sunni. Banyak gambaran umum, diskripsi eskatologi tentang hari-hari terakhir yang akan mendahului kedatangannya, adalah jamak dalam sumber-sumber Syi'ah dan Sunni. ●

BAB 10
IMAMAH

Sebagai jalan hidup yang mencakup keseluruhan, Islam tidak mengakui pemisahan antara aspek-aspek sosial, politik dan agama. Jadi, gerakan politik atau sosial tidak pernah dipisahkan dari agama. Oleh karenanya, kita dapat mendeskreditkan pendapat umum non-Muslim yang memperkenalkan Syi'ahisme sebagai hanya suatu gerakan politik yang disebabkan oleh politik penggantian Nabi Muhammad. Sebagaimana terdapat berbagai interpretasi terhadap Islam dalam aliran Sunni, asal aliran-aliran dan mazhab-mazhab Sunni, terdapat juga interpretasi terhadap Islam secara keseluruhan dari mana berkembang golongan Sunni dan Shi'i. Syi'aisme lebih berkait dengan persoalan bagaimana menafsirkan Islam. Mengenai persoalan penggantian terhadap Nabi, perbedaan antara Khilafah dan Imamah, terutama, lebih disebabkan oleh masalah fungsi dan kualifikasi-kualifikasi pengganti Nabi ketimbang siapa yang harus menjabatnya. Imamah bagi Syi'ah adalah suatu lembaga di mana baik aspek-aspek lahir *(zhahir)* maupun batin dari otoritas tradisional dipadukan, dan para Imam adalah mereka yang dalam dirinya fungsi politik maupun keagamaan ditetapkan. Karenanya, mereka harus ditunjuk secara ilahiah dan harus suci (Ma'sum). Para Imam memerintah dan membimbing ummat, mengatur dan menafsirkan Syari'ah pada sa'at yang sama, meskipun mereka dapat mwnyerahkan berbagai fungsi administratif dan tanggung jawab politik kepada orang lain *(Khilafah)*.

Syi'ah, yang secara harfiah berarti partisan atau pengikut dan dalam literatur Islam merujuk kepada orang-orang Muslim yang percaya terhadap Imamah atas penggantian Nabi ketimbang bentuk Khalifah, sesungguhnya merupakan istilah yang memperkenalkan orang-orang Muslim yang memahami dan menafsirkan Islam dari sudut pandang Syi'ahisme, sebagaimana Hanafisme, Malikisme, Syafi'isme dan Hanbalisme menginterpretasikan Islam dari sudut pandang mazhab mereka. Syi'ah percaya menurut banyak ayat Al-Qur'an dan menurut hadits-hadits Nabi yang otentik yang banyak sekali, yang diriwayatkan oleh kaum Sunni dan Syia'h, bahwa penggantian Nabi adalah hak Ali dan keturunannya melalui Fatimah, dan bahwa Syari'ah dapat ditafsirkan dalam sorotan ini oleh Ahlul Bait Nabi. Jadi, Syi'ah percaya bahwa perwalian *(Walayat)* atas Islam dan Ummat Islam serta otoritas relijius *(Marjaiyyat al-ilm)* setelah Nabi, secara eksklusif milik Ali dan keturunannya. Jadi, mereka menolak dan memprotes segala bentuk penggantian dan penafsiran Islam yang lain. Syi'ahisme percaya bahwa Islam dan Syari'ah, sebagaimana dipahami dari Al-qur'an dan diktum-diktum otentik dari para pribadi ma'sum itu berlaku dan tetap berlaku sampai akhir zaman, dan bahwa kewajiban utama dari setiap pemerintahan Islam adalah realisasi Syari'ah dan penegakan keadilan sebagaimana diperintahkan dan dijelaskan oleh otoritas yang berwenang, yakni Nabi dan para anggota Ahlul Bait melalui Fatimah dan Ali.

Syi'ah percaya bahwa Syi'ahisme telah benar-benar ada sejak awal.

Istilah Syi'atu Ali (para pengikut atau partisan Ali) digunakan oleh Nabi sendiri.[1] Segera setelah wafatnya Nabi Suci, kelompok yang menolak Khalifah berdasarkan Imamah Ali, dikepalai oleh Salman, Abu Dzar, Miqdad dan Ammar, dikenal sebagai Syi'ah. Syi'ah, atas dasar Islam, menolak pemisahan otoritas sosio-politik dalam bentuk Khalifah dan otoritas relijius dalam bentuk *Walayat* serta *Marjaiyyat-i Ilmi.* Mereka mengakui kepaduan keduanya dalam bentuk Imamah. Mereka percaya bahwa tidak ada pemisahan dalam Islam antara aspek kehidupan duniawi dan agamawi dan berbagai urusan ummat. Jadi, bagi Syi'ah, Ali adalah Imam pertama, kendati beliau diakui sebagai khalifah keempat. Setelah Ali, putranya Hasan, menjadi Imam kedua. Beliau diracuni oleh

Muawiyyah. Husain adalah Imam ketiga. Beliau syahid dalam peperangan melawan orang-orang Umayyah. Orang-orang Syi'ah percaya bahwa Imam keempat, Ali ibn al-Husain dan Imam kelima, Muhammad ibn Ali, juga dibunuh oleh orang-orang Umayyah. Imam keenam adalah Ja'far Ibn Muhammad al-Shadiq. Akibat perselisihan politik antara Umayyah dan Abbasiyah selama masa hidup Imam kelima dan keenam, mereka berhasil mengembangkan prinsip-prinsip Syi'ahisme. Inilah sebabnya Syi'ah Dua Belas Imam dikenal juga sebagai Syi'ah Ja'fari, menurut nama Imam keenam, Ja'far Shadiq.

Gerakan anti-Umayyah dalam mendukung Ahlul Bait Nabi dipimpin oleh jenderal Abu Muslim Marwazi dari Khurazan yang pada akhirnya dibelokkan dari jalurnya serta disimpangkan demi kesenangan Abbasiyah, dan berakhir dengan berdirinya Khalifah Abbasiyah. Imam ketujuh, Musa al-Kazhim diracun oleh Khilafat Abbasiyah, Haruun al-Rasyid. Ma'mun, Khalifah Abbasiyah yang sedang berusaha keras untuk menyenangkan hati orang-orang Persia, yang mendukung Ahlul Bait Nabi, menjadikan Imam kedelapan, Ali Ibn Musa al-Ridha, sebagai penggantinya. Para ulama Syi'ah mengambil keuntungan penuh atas kebebasan intelektual dari periode ini. Syi'ah percaya bahwa karena Ma'muun merasa takut terhadap pengaruh dari Imam kedelapan, beliau diracuni atas perintah Ma'mun. Datangnya kekuasaan dinasti Syi'ah dari Buya, di Persia, membantu orang-orang Syi'ah tepat untuk menyebarkan dan memperkuat Syi'ahisme, khususnya di Persia. Ahwaz dan pesisir Teluk Persia, Tabaristan dan bagian-bagian Persia lainnya berpenduduk Syi'ah. Keluarga Hasan ibn Zaid al-Alawi dan Nasir Utrusy serta keturunan-keturunan mereka memerintah di Persia Utara, Tabaristan, selama bertahun-tahun. Keluarga Buya, orang-orang Alawi dan Utrusy mendirikan wewenang Syi'ah di Persia. Syi'ah Fatimiah memerintah di Mesir dan Afrika Utara. Syi'ah Ismailiah (enam Imam) juga mendirikan kekuasaan mandiri mereka di Persia Tengah. Juga Sadat-i Marasyi (para keturunan Nabi) berkuasa selama bertahun-tahun di Mazandaran. Sultan Muhammad Khuda Bandah, seorang penguasa Mongol terkenal, menjadi Syi'ah dan para keturunannya berkuasa di Persia selama bertahun-tahun sebagai Sultan-sultan Syi'ah. Dinasti Syi'ah al-Aq Qayunlu dan Qara Qayunlu juga berkuasa di Tabriz, Fars dan Kerman. Akhirnya, Dinasti Syi'ah Alawi Safawi (begitu mereka

mengklaim) berkuasa dan menyebarkan Syi'ahisme di seluruh Iran dan menjadikannya agama resmi Iran dan tinggal demikian sebagai agama sejak itu.[2]

Syi'ah percaya bahwa semua Imam mereka syahid, baik dibunuh atau diracun: mereka mengutip sebuah diktum dari salah seorang Imam yang mengatakan *'Ma minna illaa maqtuulun au masmuum':* Kami semua entah dibunuh atau diracun. Imam ketujuh dipenjarakan selama tujuh tahun sebelum beliau diracun. Syi'ah percaya Imam kesembilan, kesepuluh dan kesebelas, masing-masing Muhammad Ibn Ali, Ali Ibn Muhammad dan Hasan Ibn Ali al-Asykari pun diracuni. Imam keduabelas, Muhammad Ibn Hasan, adalah Imam yang dijanjikan, dikenal sebagai 'Imam al-Zaman', lahir tahun 256 H./868 M. Ayahnya syahid tahun 260/872. Melalui perintah Ilahi, beliau memasuki apa yang dikenal sebagai kegaiban kecil *(Ghaibat shughra)* hingga tahun 329/939, masa mana keempat wakil pribadinya *(Nuwwab-i Khas),* Utsman Ibn Said, putranya Muhammad Ibn Utsman, Husain Ibn Ruh, dan terakhir Ali Ibn Muhammad, secara bergantian mewakili beliau. Beliau memasuki kegaiban besar *(Ghaibat Kubra)* tahun 329/939 dan terus dalam kegaiban sejak itu, sepanjang periode mana para Faqih Mujtahid yang memenuhi syarat diberi kuasa melalui banyak diktum otentik untuk mewakili beliau mendirikan pemerintahan Islam, keadilan, melaksanakan berbagai tanggung jawab atas ummat Islam dan Walayat yang diistilahkan *Walayat al-Faqih* atau Perwalian Faqih. Sebuah Hadits Nabi mengatakan, 'Barangsiapa yang mati tanpa mengenal dan mengakui Imam zamannya, maka ia mati kafir.'[3] Tak pelak lagi Imam dimaksud tidak dapat diidentifikasi sebagai Khalifah yang dipilih, karena yang ini tentu dikenal oleh masyarakat, karena dipilih oleh rakyat. Hadits Nabi lainnya menyatakan: 'Bila ada tersisa dalam kehidupan dunia walaupun sehari, Allah akan memperpanjang hari itu sampai Dia mengutus di dalamnya seseorang dari ummatnya dan Ahlul Baitku. Namanya akan sama seperti namaku. Ia akan mengisi bumi dengan persamaan dan keadilan'.[4]

Jadi, dapat kita simpulkan bahwa mayoritas Syi'ah Dua Belas Imam atau Imamiyah atau Ja'fariyah menyelusuri sejarah Syi'ahisme ke masa kehidupan Nabi dan ke Salman al-Farisi serta para pengikut Ali lainnya yang berbeda dengan ummat yang sisa

mengenai dasar keagamaan, terutama pada persoalan kesatuan antara kepemimpinan duniawi dan spiritual, kualifikasi dan fungsi pengganti Nabi yang mereka percayai menjadi hak ilahi, yang dijelaskan dengan wahyu dan Nabi, sebagai milik Ahlul Bait Nabi melalui Ali dan Fatimah Mulai dengan Ali sebagai Imam pertama sampai kepada Imam kedua belas, Muhammad al-Mahdi, sehingga mereka memprotes bentuk-bentuk lain penggantian dan kekhalifahan. Syi'ah berada dibawah tekanan selama kekuasaan ketiga 'khalifahur rasyidin' (11-35 H.; 632 - 656 M.). Tekanan ini meningkat selama pemerintahan Umayyah (40- 132 H.; 661—750). Selama perselisihan politik antara Ummayyah dan Abbasiyah dan saat setelah tegaknya dinasti Abbasiyah, kaum Syi'ahisme merasa sedikit bebas (dari pertengahan abad kedua sampai abad ketiga Hijriah atau abad kedelapan hingga abad kesembilan Masehi). Orang-orang Syi'ah menghadapi kesukaran lagi sampai akhir abad ketiga Hijriah/abad kesembilan Masehi. Dengan munculnya Buya pada awal abad ke-4 H. (abad ke-10 M.), dan dinasti-dinasti Syi'ah lainnya, terutama di beberapa bagian Persia, yang Syi'ahisme memperoleh kekuatan sampai akhir abad ke-5 H. (abad ke-11 M.). Karena perselisihan politik dan Perang Salib, Syi'ah terbiar bebas. Masuknya beberapa penguasa Mongol menjadi Syi'ah dan berdirinya dinasti-dinasti lokal di berbagai tempat di Persia membantu menyebarkan Syiahisme khususnya di Persia hingga akhir abad ke-9 H. (abad ke-15 M.). Munculnya keluarga Syi'ah Alawi dan dinasti Safawi pada awal abad ke-10 H. (abad ke-16 M.), membantu menampilkan Syi'ahisme sebagai agama resmi Iran yang menerus hingga sekarang. Syi'ah percaya bahwa Ijtihad yang dipraktekkan sejak masa kehidupan Nabi harus dipraktekkan terus, karena tidak ada alasan kenapa dihentikan. Oleh karenanya, mereka memandang para Mujtahid sebagai para pemimpin duniawi dan ummat spritual yang sah dan sebagai para wali Islam yang berwenang. Jelaslah bahwa setiap Muslim harus mendapatkan ilmu tentang berbagai prinsip agama Islam secara langsung dan melalui usaha-usaha, inisiatif dan dengan pertimbangan nalarnya sendiri. Prinsip-prinsip ini, yang disebut *Ushul al-Din*, ada lima, sebagai berikut:

a. Beriman pada eksistensi dan keesaan Allah (Tauhid).

b. Beriman pada nubuah para utusan Allah dan Muhammad

(Risalat, Nubuwwat).

c. Beriman pada Hari Kebangkitan dan bahwa awal-awal baik diberi pahala dan perbuatan-perbuatan jahat akan dihukum *(Ma'ad)*.

d. Beriman pada keadilan Allah. Intelejensi manusia (penalaran akal) dapat menilai keadilan atau kezaliman sesuatu tindakan *('Adl)*. Inilah kenapa hanya Syi'ah yang disebut golongan adil *(Ahlu al-'Adl)* yang berlawanan dengan Sunni yang menekanan Kehendak Allah sebagai ganti keadilan-Nya dan inilah kenapa mereka disebut kaum *Ahlu al-Sunnah wa al-Suunah wa al-Jama'ah.*

e. Beriman pada Imamah sebagai lembaga Islam yang mengurusi berbagai urusan temporal dan spiritual. Dengan demikian, menuntut ilmu pengetahuan merupakan kewajiban relijius dalam Islam. Tetapi, terlepas dari masalah prinsip-prinsip teologis *(ushuluddin)* yang tidak boleh ada peniruan *(Taqlid)*, dituntut ilmu pengetahuan yang terperinci tentang segala peraturan praktis dan bebagai aturan syari'ah (jalan hidup) melalui sumber-sumber hukum Islam, dan dengan jalan menggunakan penalaran hukum secara teknis *(Ijtihad)* bagi tiap Muslim, tidaklah mungkin. Hanya orang yang cakap, para ahli hukum Muslim yang berkemampuan *(Mujtahid, Faqih)* berdasarkan tanggung jawab kolektif terhadap ummat *(wajib kifayah)*, yang harus melaksanakan tanggung jawab ini untuk ummat, dan ummat harus mengikuti mereka *(taqlid)*. Karena tidak dibolehkan mengikuti para Mujtahid yang telah meninggal, maka hukum fiqih Syi'ah tetap hidup dan pintu Ijtihad tetap terbuka.

Otoritas yang sah dari para Mujtahid dan Fuqaha ini, dalam perwalian ummat dan Islam, disebut *Walayat-i Amri Faqih* dan termasuk dalam pasal 5 Konstitusi Republik Islam Iran. Para Mujtahid diakui sebagai wakil Imam bagi masyarakat selama ketidakhadirannya pada masa gaib besar. Oleh karenanya, mereka dikenal sebagai *Nuwwabi 'Ami Imam.*[5]

Golongan Syi'ah percaya bahwa Syari'ah dan Nabi yang telah menjelaskan berbagai peraturan dan regulasi yang mendetil mesti juga menjelaskan tugas penting wali ummat dan Islam dalam ketidakhadiran Nabi dan para Imam. Sebagai konsekuensinya, Syi'ah

mendasarkan ajaran ini pada ayat Al-Qur'an dan atas hadits-hadits yang otentik.[6] Syi'ah percaya bahwa spesis manusia bukan suatu pengecualian dari hukum umum tentang bimbingan umum yang menguasai alam semesta *(walayat Takwini)*. Justru karunia Ilahi mengharuskan pengutusan para Nabi, eksistensi petunjuk ilahi umum yang universal dan eksistensi pribadi-pribadi yang dapat memenuhi tanggung jawab tuntunan (Imamah), harus selalu ada individu-individu yang dapat memikul tanggung jawab ini dalam ketidakhadiran para Imam. Para Nabi menerima wahyu langsung, sedang para Imam memanfaatkan aspek-aspek lahiriah dan batiniah dari wahyu, dan menjelaskan risalah yang diberikan oleh Nabi. Demikian juga para Mujtahid memanfaatkan wahyu, hadits-hadits Nabi dan keputusan-keputusan para Imam. Maka, beriman kepada Allah dan ilmu Allah serta para Imam, tidak dapat dipisahkan, sama halnya ilmu Allah dan ketaatan kepada-Nya adalah saling berkait yang tak mungkin lepas dari ilmu Syari'ah, penggunaan Ijtihad dan pengetahuan pribadi.

Orang Syi'ah mendasarkan keabsahan Imamah atas tiga prinsip:

a. Keilahian Imamah. Yakni, kendati Imamah berbeda dengan nubuwah, namun merupakan suatu kedudukan ilahiah yang diberikan oleh Allah melalui nabi kepada pribadi-pribadi dengan keistimewaan ilahi tertentu seperti kemurnian, kesucian, dan seterusnya, sebagaimana nubuwah hanya diberikan oleh Allah kepada pribadi-pribadi dengan berbagai keistimewaan khusus.

b. Prinsip pertama membimbing kita kepada prinsip kedua, nash atau penunjukan eksplisit. Yakni, karena Imamah adalah suatu hak istimewa yang dianugerahkan Allah kepada orang berdasar keistimewaannya, Allah melalui utusan-Nya yang cakap dan di bawah bimbingan-Nya — menunjuk pribadi itu dengan rancangan eksplisit (nash) sebagai seorang Imam untuk melanjutkan Kerja Ilahi menggantikan Nabi. Karena inilah para Ulama Syi'ah mengatributkan hadits-hadits dan nash Nabi mengenai rancangan eksplisit atas dua belas Imam oleh Allah melalui beliau sebagai para penggati sah beliau.

c. Prinsip mendasar ketiga yang terkandung dalam ajaran Imamah, sebagaimana dirinci oleh para ulama Syi'ah, adalah Ilm. Ini berarti seorang Imam diilhami secara ilahiah, memiliki sejumlah

ilmu khusus yang meliputi ilmu lahiriah dan batiniah mengenai Al-Qur'an dan detail-detail agama. Jadi, Imamah ***tidak*** didasarkan pada:

1. Waris, karena jika berdasarkan waris, maka ia harus selalu diberikan kepada putra tertua dari Imam terdahulu, padahal, kenyataannya, tidak selalu diberikan menurut cara ini. Husain (Imam ketiga) dan Musa al-Kazhim (Imam ketujuh) tidak mengikuti pola waris secara universal.
2. Pemilihan dengan hak suara rakyat. Perbedaan utama antara Imamah dan Khilafat, yakni para Khalifah dipilih, sedang para Imam ditunjuk.
3. Otoritas *de facto,* karena ia tidak dipandang sebagai suatu kedudukan dan kekuasaan sekuler. Jadi, Imamah yang diartikan sebagai suatu gerakan antara Allah dan manusia, dan berdasarkan rancangan jelas dan ilmu, haruslah mutlak jelas bahwa ia adalah lembaga *de jure* dan tidak bergantung pada kekuatan sekuler.
4. Pekuasaan sekuler. Jadi, Imam bukan raja, khalifah, dan sebagainya. Adalah kewajiban orang-orang beriman untuk mengakui Imam di zamannya.
5. Waktu dan tempat. Imam itu bukan imam , dari kaum, waktu, kawasan, ras, bahasa tertentu dan khusus. Ia adalah Imam bagi ummat seluruh zaman dan seanteru dunia. Imamahnya tidak dibatasi oleh waktu, tempat, ras, dan seterusnya.[7] Lembaga Imamah adalah perwalian *(walayat)* Islam, amanat ummat *(washayat),* pemelihara lembaga-lembaga Islam *(niqabat),* pengemban warisan Islam *(waratsat).*●

BAB 11
LANDASAN WILAYAT AL-FAQIH
Perwalian Para Ulama (Ideolog)

Kebanyakan unsur-unsur anti-Islam non-Muslim, dan orang-orang yang tidak kompeten baik menganalisa Revolusi Islam di Iran, mengadakan pendekatan ilmiah terhadap Islam, atau mengambil sikap memihak untuk berbagai alasan terutama untuk menghentikan penyebarannya ke negera lain, berupaya untuk membenarkan Revolusi Islam di Iran hanya sebagai revolusi Syi'ah semata dan karenanya menguraikannya dalam istilah-istilah Syi'ah. Tidak mengenai kepemimpinan revolusi maupun orang-orang yang melaksanakannya, dijelaskan oleh para sarjana kompeten yang mengetahuinya betul, pun mereka tidak senang dengan orang-orang yang mencoba untuk memperkenalkannya sebagai suatu revolusi Syi'ah semata-mata. Untuk memulainya Muslimin Syi'ah dan para ulama Muslim Syi'ah melihat Syi'ahisme hanya sebagai mazhab pemikiran dan hukum menurut titik pandang dan pemahaman Islamnya sebagaimana para pengikut mazhab-mazhab Islam lainnya melihat Islam dari sudut pandang mazhab mereka masing-masing. Tidak ada di antara para pengikut mazhab pemikiran dan hukum Islam, termasuk Syi'ah, menganggap mazhab mereka bertentangan dengan Islam. Islamlah yang mereka semua ikuti, namun dengan pandangan Syi'ahisme, Hanafisme, Syafi'isme, dan seterusnya, dan mereka semua memandang diri mereka sebagai Muslimin. Syi'ahisme bukan suatu agama yang bertentangan dengan Islam sebagaimana,

misalnya, Malikisme atau Hanbalisme bukan agama yang bertentangan dengan Islam. Sebenarnya, semua mazhab Islam mengklaim sebagai Islam sejati dan mendapatkan legitimasinya dalam Islam sendiri dan menjadi perwujudan Islam yang benar. Kedua, para Ulama Muslim Syi'ah menjelaskan legitimasi bagi sistem politik dan negara Islam, dalam ketidakhadiran Imam *(ghaibat),* dalam istilah yang sama sebagai yang dilakukan para Ulama Sunni. Baik Ayatullah Muhammad Husain Naini dan risalatnya *Tanbih al-Ummah wa Tanzil al-Millah* (Peringatan kepada Ummat dan Penjelasan Terperinci mengenai Agama) — Naskah bahasa Arab sebelum 1909, yang diterjemahkan, dilanjutkan dan diterbitkan oleh Ayatullah Taliqani tahun 1953 untuk menjelaskan berbagai pendapat politiknya sendiri dalam bahasa Naini, terutama karena berbagai pembatasan politik di Iran — maupun Ayatullah Ruhullah Imam Khomeini dalam kuliah-kuliahnya yang diterbitkan sebagai buku berjudul *Hukumati Islami* (dan juga Taliqani serta Bazargan) menjelaskan legitimasi politik dan sistem politik Islam dengan istilah-istilah yang mutlak sama dengan istilah-istilah dan penjelasan-penjelasan yang digunakan oleh para Ulama Sunni. Mereka mendasarkan sistem politik Islam atas prinsip-prinsip:

1. Kesatuan agama dan negara dalam Islam.[1]
2. Prinsip tanggung jawab kolektif individu dan umat *(Fardh al-Kifai)* untuk menegakkan kedamaian, tatanan, pemerintahan, keadilan dan untuk melaksanakan sepenuhnya hukum dan Syari'ah Islam.
3. Prinsip *Amri bi al-Ma'ruuf wa al Nah an al-Munkar.*
4. Prinsip Jihad (perjuangan menyeluruh bagi pengalaman Islam).
5. Menegakkan kedamaian, tatanan, negara dan sistem politik Islam adalah penting sekali sebagai prasyarat pelaksanaan penuh atas Syari'ah.[2] Karena, jika ini tidak ditegakkan, Islam tidak dapat dilaksanakan.
6. Penunjukan eksplisit *(Nash).* Ayat-ayat dan berbagai keputusan Qur'an dan Hadits menjelaskan sifat wajib berbagai aktivitas dan keterlibatan politik,[3] yakni "barangsiapa yang memulai harinya dan tidak merasa terlibat dengan berbagai

urusan ummat Muslim, dia bukan seorang Muslim[4] dan ayat yang sangat terkenal "Mengapa kamu tidak berperang karena Allah dan orang-orang yang tertindas".[5]

7. Kedudukan Ulama sebagai pelindung agama, penjaga lembaga-lembaga keagamaan, pengemban amanat ummat dan yang terpenting dari semuanya, sebagai para pewaris Nabi.

Nabi diriwayatkan bersabda, "Ulama adalah pewaris para Nabi" *(al-'Ulama warathat al-Anbiya')*. Orang-orang Syi'ah maupun Sunni percaya bahwa kedaulatan adalah milik Allah semata. Para Nabi semuanya bertanggung jawab untuk menyiarkan risalah Allah dan mengusahakan penerapannya. Otoritas dan hak apa pun yang dimiliki para Nabi (jika mereka memilikinya) bukan milik mereka sendiri, tetapi hanya merupakan suatu perpanjangan *(Sirayat)* kekuasaan Allah. Syi'ah percaya bahwa otoritas dan hak ini disampaikan kepada ummat (termasuk Ulama) dari Allah melalui Nabi, kemudian melalui para Imam. Tetapi Sunni percaya bahwa otoritas dan hak-hak ini diulurkan *(Sirayat)* dan bukan ditransfer (dialihkan, Intiqal) kepada ummat (termasuk Ulama) dari Allah langsung melalui Nabi (tidak perlu melalui para Imam). Tanggung jawab dan otoritas Ulama sebagai para ahli dan ideolog Islam, penjaga agama, pengemban amanat ummat dipandang sebagai *Walayat al-Faqih* atau tanggung jawab Faqih Muslim. Ini sama dalam Syi'ahisme maupun Sunnisme. Perbedaan antara kedua mazhab mengenai pokok ini adalah:

a. Kaum Syi'ah memandang Ulama mereka sebagai para wakil dan pengganti para Imam atau *Nayib al-Imam* karena perluasan otoritas Allah kepada Ulama melalui Nabi kemudian melalui para Imam. Baik dalam Syi'ahisme maupun Sunnisme, Ulama adalah pewaris Nabi.

b. Sunnisme menutup pintu Ijtihad segera setelah keempat mazhab Sunni didirikan. Jadi, kaum Sunni membatasi hak Ijtihad kepada para tokoh keempat mazhab itu dan memandang Ulama mereka tidak sebagai para Mujtahid dan Faqih, tetapi hanya sebagai para pengikut (Muqallid dan Mufti) keempat Mujtahid besar dan para Imam (bernama Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ibn Hanbal). Sebaliknya, bila mereka membuka pintu Ijtihad kembali, sebagaimana yang diinginkan oleh kebanyakan Ulama Sunni kontemporer, halnya akan menjadi lain. Adalah benar bahwa para

Ulama Syi'ah mengutip banyak pernyataan para Imam dalam mendukung gagasan bahwa Fuqaha sebagai wakil para Imam *(Nayib al-Imam)* adalah pelindung agama, tetapi mereka juga mengutip hadits-hadits Nabi untuk menjelaskan bahwa otoritas dan hak perwalian agama telah diulurkan kepada para Imam, dan melalui mereka kepada Ulama, dari Nabi sendiri. Pembahasan Ayatullah Imam Khomeini mengenai pokok ini menggambarkan masalah tersebut.[6]

Menjelaskan pokok ini, *Hukumati Islami,* mengutip sebuah hadits dari Imam Ali, yang dikatakan menyampaikan do'a Nabi kepada Allah untuk merahmati orang-orang yang datang setelah beliau. Nabi Allah (saw) bersabda: "Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang akan datang setelahku (beliau mengulangi ini tiga kali)". Nabi ditanya siapa yang akan menjadi penggantimu? beliau menjawab: "Orang-orang yang datang setelahku (menggantikanku) dan meneruskan hadits-hadits dan sunnahku serta mengajarkannya kepada orang-orang dalam ketidakhadiranku." Imam Khomeini, dalam suatu perdebatan ilmiah, memberikan penjelasan bahwa ada pembenaran hukum dan doktrinal bagi suatu peranan aktif Ulama dalam menghasilkan pemerintahan Islam di bawah prinsip Walayat al-Faqih. Jika ditunjukkan bahwa pemikiran Nabi terhadap para penggantinya tidak hanya menyangkut penerusan ucapan-ucapan dan sunnahnya, tetapi harus juga mengajarkannya kepada ummat, maka jelas ini memberikan suatu peranan dinamis bagi Ulama dan Fuqaha, bukan peranan pasif, tetapi positif[7] dan tanggung jawab relijius Ulama dan Fuqaha untuk mengawasi bahwa pemerintahan dan negara Islam ditegakkan dan bahwa Syari'ah dilaksanakan sepenuhnya. Beliau mengusulkan agar Ulama jangan membatasi diri mereka kepada ritual-ritual rutin. Mereka memiliki kewajiban untuk mengurusi masalah politik. Mereka harus melibatkan diri untuk mengusir rezim-rezim curang, tirani dan tak Islami.[8] Islam dan Syari'ah diturunkan untuk dilaksanakan dan politik, sosial, budaya dan sistem ekonomi Islam didirikan.[9] Beliau percaya bahwa dalam ketiadaan negara Islam, sistem politik Islam akan lenyap. Adalah tugas Ulama dan Fuqaha untuk melihat bahwa Syari'ah dijalankan.

Menarik bahwa pembahasan mengenai peranan Ulama *(Walayati Faqih)* dalam politik adalah sama dengan para Ulama Sunni karena beliau mendasarkan argumennya terutama pada sumber-sumber Islam dan fundasi umum Islam dan bukan pada dasar-dasar Syi'ah. Penalaran hukumnya sama dengan para Ulama Sunni sebagaimana bagi para Ulama Syi'ah. Konsep beliau tentang *Walayat al-Faqih* sama dengan seluruh Ulama Islam tanpa kecuali. Tentang tertutupnya pintu Ijtihad yang nampaknya menjadi satu-satunya perbedaan utama Syi'ah dan Sunni, adalah menarik untuk dicatat bahwa sebuah argumen yang sama terdapat dalam mazhab Syi'ah tiga abad yang lalu (awal abad ke-18) antara orang-orang Syi'ah tradisionis *(Akhbariyun)* dan para pendukung kesinambungan Ijtihad *(Ushuliyin)*. Kaum Akhbari, seperti Sunni, percaya bahwa tidak perlu bagi para Ulama untuk berijtihad. Kaum Ushuli, sebaliknya, mengatakan bahwa satu-satunya jalan untuk menghargai Syari'ah adalah dengan mendapatkan ilmu Syari'ah *(Iftitahi bab al-'Ilm)* yang sesuai, menjalankan keputusan hukum yang independen (Ijtihad) dengan bantuan intelek *(Aql)* bersama-sama dengan sumber-sumber Syari'ah. Orang-orang *Ushuli* menang atas *Akhbari* dalam argumen ini, dan karenanya pintu Ijtihad tetap terbuka dalam Syi'ahisme, sementara ia tertutup pada kebanyakan Sunnisme. Kita percaya bahwa sekarang sudah waktunya para Ulama Sunni mengambil manfaat dari pengalaman para Ulama Syi'ah, yang akan menghasilkan Ijtihad yang segar dan melahirkan para Mujtahid dan Faqih baru, sehingga rintangan terakhir dalam melaksanakan prinsip *Walayat al-Faqih* disingkirkan dalam Sunnisme. Ayatullah Imam Khomeini tampaknya menyadari kebutuhan ini, karenanya beliau mengajak semua Ulama untuk ikut aktif dalam urusan ummat dan mendirikan sistem politik Islam. Beliau mengatakan, "Penalaran akal mendiktekan bahwa dalam ketidakhadiran sistem seperti ini, Islam akan lenyap." Dewasa ini tak terhitung banyaknya Ulama hukum Islam (Fuqaha); masalahnya hanya bagaimana menyatukan mereka "untuk mendirikan suatu pemerintahan universal yang adil di dunia. Pemerintahan seperti itu akan menjadi *Walayat al-Faqih*".[10]

Mempertimbangkan peranan Ijtihad, para Mujtahid dan kemudian dinamisme revolusioner Islam Syi'ah serta mengenai kekalahan konservatisme dan tradisionalisme dalam Islam Syi'ah,

kami ingin menunjukkan bahwa para tradisionis mencoba untuk merubah arah Islam Syi'ah juga, tetapi mereka gagal. Perdebatan antara kaum *Akhbari* (Ulama Syi'ah tradisional) dengan kaum *Ushuli* (Ulama yang percaya pada kesinambungan Ijtihad sebagai suatu masalah teknik) dan kemenangan orang-orang Ushuli adalah konsekuensi politik terbesar yang pada gilirannya membantu berhasilnya Revolusi Islam. Karena, jika para tradisionis *(Akhbari)* berhasil, para Ulama Syi'ah akan merosot hingga hanya sekedar perawi hadits dan mengikuti para Mujtahid klasik, seperti Ulama Sunni, dan hanya akan menjadi para spekulator terhadap pendapat para Mujtahid terdahulu.

Untuk meringkaskannya, kaum Akhbari, sebagaimana namanya (*Akhbar* adalah bentuk jamak dari Khabar yang berarti keputusan dan hadis), percaya bahwa haram bagi para Ulama untuk menggunakan akal (Aql) dan pendapat akal (Ijtihad) untuk membuat keputusan, dan menggunakan prinsip-prinsip Syari'ah bagi masalah-masalah spesifik dan permasalahan hukum sehari-hari. Argumen *Akhbari* mengenai Ijtihad sangat serupa dengan mazhab Sunni. Mereka berpegang bahwa setiap orang Alim hanya patut menjadi Ulama *Khabar* (Hadits) dan bahwa dia tidak mempunyai kompetensi yang absah melebihi itu. Adalah jelas bahwa sekali bidang spekulasi hukum Islam dibatasi, otoritas Ulama dikurangi, yang menjurus akhirnya kepada pengurangan otoritas Islam. Karena *Akhbarisme* akhirnya menuju penghapusan hukum fiqih dan pembatasan total otoritas *Ushuli* (para Mujtahid). Sebaliknya, penganut Ushuli mempercayai otoritas akal *(Aql)* bagi kemungkinan menyimpulkan hukum *(Iftitah bab al-ilm)* dan keberlangsungan Ijtihad. Karenanya, rancangan Imamah diberikan kepada mereka para Ushuli (Mujtahid), para ahli hukum yang berbobot. Para Mujtahid dalam Syi'ah tidak seperti para Mujtahid dalam Sunni yang bukan kepala sekte, mazhab, aliran pemikiran dan teologi. Para Mujtahid sebagai ideolog, para spesialis dalam Islam, mendapatkan otoritas mereka dari Islam sendiri, dan karenanya berbagai pandangan mereka harus dicari dan diikuti *(Taqlid)* oleh orang-orang yang tidak memiliki kecakapan dan kemampuan yang sesuai untuk memahami hukum dan penalaran untuk mencapai Ijtihad. Mereka disebut para Muqallid. Prinsip Ijtihad dan Taqlid serta kesinambungan Ijtihad tidak dipercaya orang luar kecuali para peneliti Revolusi Islam di Iran yang berbobot sebagai

faktor penyumbang terhadap keberhasilan revolusi. Ini karena fakta bahwa Syari'ah dan Islam tidak mengakui segala pembatasan atas lingkupnya dan tidak ada perbedaan antara sekular dan relijius, maka pada gilirannya pendapat para Mujtahid dalam berbagai masalah ekonomi, masyarakat, politik maupun keagamaan harus dicari dan diikuti. Ummah, negara dan para individu harus mengikuti petunjuk mereka. Kalau tidak karena kemenangan kaum *Ushuli* dalam perdebatan mereka dengan kaum *Akhbari*, tidak akan ada Mujtahid dan Muqallid, maka akhirnya Ulama akan tersudut ke posisi sangat sempit untuk hanya menjadi para *Akhbari* dengan tiada kemampuan untuk memberikan petunjuk yang hidup dan menerus bagi urusan-urusan masyarakat dan politik.[11] Orang dapat mengatakan bahwa revolusi di Iran, paling tidak bentuk khusus yang telah diambilnya, bentuk kepemimpinan yang telah dimilikinya dan terus dimilikinya akan juga tak terpikirkan tanpa kesinambungan Ijtihad dan Mujtahid dalam Syi'ah, yang dapat dengan mudah diperkenalkan kembali dalam Sunni. Pentingnya kedudukan Ijtihad dan Mujtahid dalam sikap revolusioner Syi'ah mempunyai belakang sejarah. "Contoh awal tentang perjuangan Ulama atau para Mujtahid menentang kediktatoran, kekuasaan raja, terlihat dalam tahun 1826, ketika Muslimin yang mendiami beragai wilayah yang telah direbut dari Iran dalam perang Rusia-Iran Pertama menjadi sasaran penganiayaan orang Rusia. Ulama pada waktu itu mengeluarkan suatu keputusan (fatwa) tentang tugas Iran untuk memerangi Rusia. Mullah Ahmad Naraqi, ulama yang paling berpengaruh di antara para Mujtahid pada zaman itu, dilaporkan telah memberikan fatwa menentang raja yang enggan, dengan mengatakan: 'Apabila Syah yang sekarang ini tidak melaksanakan maksud dan mematuhi fatwa kami, kami akan menggesernya dan menggantikan anjing yang lain dalam istananya'".[12] Contoh lainnya adalah oposisi Ulama terhadap dominasi asing, yakni oposisi terhadap monopoli tembakau Inggris tahun 1891-2, kemudian peranan aktif Ulama dalam revolusi konstitusi tahun 1906-11. Ini membawa kita kepada persoalan konsep kepemimpinan dalam Islam. ●

BAB 12
IJTIHAD DAN TAQLID

Prinsip Islam lainnya yang khusus pentingnya dalam tradisi-tradisi revolusioner Syi'ah adalah prinsip Ijtihad. Ijtihad, jika diambil hanya pada nilai permukaannya dan dari sudut pandang hukum Islam, merupakan prinsip hukum. Dalam Syi'ah, ia berhubungan dengan konsep Imamah (kepemimpinan sebagai suatu prinsip revolusioner Syi'ah) pada satu pihak, dan pada lain pihak kepada revolusi kebudayaan Islam dan kesinambunangan revolusi. (Lihat Ali Syariati, *Ijtihad* dan *Teori Revolusi Kesinambunangan*). Bukan tugas kita di sini untuk menelusuri berbagai aspek hukum Ijtihad. Yang terutama menarik adalah bahwa Ijtihad diterima sebagai suatu prinsip hukum Islam oleh mazhab Sunni maupun Syi'ah. Tetapi kalangan Sunni menutup pintu Ijtihad segera setelah berdirinya empat mazhab Sunni, sementara golongan Syi'ah telah dan akan terus menjaga pintu Ijtihad agar tetap terbuka dan memanfaatkannya sebagai suatu prinsip revolusioner. Prinsip Ijtihad juga berhubungan erat dengan ajaran *Walayat al-Faqih*[1] (otoritas politik para ideolog dan ahli hukum Islam). yang memainkan peranan besar dalam kepemimpinan Revolusi Islam di Iran, dan menempati kedudukan khusus dalam Konstitusi Republik Islam Iran.[2] Jangan sampai keliru, bahwa prinsip Ijtihad memang asli Islam, meskipun Syi'ah yang melangsungkan hidupnya. Pembukaan kembali pintu Ijtihad dapat membantu seluruh Ummah dan dapat menjadi tradisi revolusioner Islam.

Harus ditunjukkan bahwa Ijtihad adalah suatu prinsip hukum pertama dan terutama, dan karena nilai hukumnya, ia merupakan suatu prinsip konstitusional, politik dan revolusioner. Jadi, pertama-tama perlu dijelaskan makna hukumnya secara singkat. Walaupun prinsip Ijtihad diterima umum oleh semua mazhab Islam, namun mazhab Syi'ah tidak hanya berbeda dari mazhab Sunni mempercayai kelanjutan otoritas Ijtihad, tetapi konsep Syi'ah tentang Ijtihad sampai ukuran tertentu, berbeda dari Sunni. Konsep Ijtihad Syi'ah berhubungan erat dengan ajaran Syi'ah tentang otoritas akal manusia *('Aql)* sebagai sumber keempat hukum Islam yang menggantikan Analogi *(Qiyas)*. Ijtihad, hingga ukuran besar adalah jalan kepada penggunaan hukum akal manusia, atau *Ta'aqqul*. Sebenarnya, ia adalah penalaran hukum manusia.

Ijtihad, infinitif dari akar kata jahada, secara harfiah berarti pengerahan usaha seseorang. Kata ini telah diterjemahkan secara keliru sebagai pendapat akal yang mandiri (Schacht), berfikir bebas (Gibb), keputusan pribadi, pendapat pribadi, keputusan individu atau interpretasi pribadi. Ketidaktelitian berbagai definisi ini adalah jelas, karena Ijtihad bukan *Ra'y* atau pendapat pribadi kecuali kalau mereka bermaksud untuk merujuk pada kemandirian teks-teks dalam ketidakhadiran berbagai teks (nas), dan bukan kepada keputusan pribadi. Namun, Ijtihad sebagai suatu istilah jurisprudensi dan sebagai suatu prinsip hukum yang telah dibatasi oleh sebagian besar ahli hukum Syi'ah pada kompetensi atau kemampuan mental dalam hukum untuk mendapatkan kemungkinan peraturan-peraturan hukum melalui pemikiran juristik dalam ketiadaan nas otentik dan menentukan.[3] Namun, Ijtihad tidak harus dikelirukan dengan *Ra'y* atau *Qiyas* yang ditolak oleh Syi'ah. Perbedaan antara istilah *Ijtihad* dan *Taqlid* (mengikuti seorang Mujtahid, menerima otoritas seorang Mujtahid dalam Syari'ah), Mujtahid dan Muqqalid (pengikut, penganut), menjernihkan konsep Ijtihad. Harus dicatat bahwa Syi'ah mendasarkan otoritas Ijtihad justru pada fondasi di mana mereka mendasarkan otoritas aktual dan konsep *Fiqh* itu sendiri (keperluan mutlak dan kebutuhan akan hukum bagi ummat dan negara), ajaran tanggung jawab hukum individu dan masyarakat *(Taklif)* serta ajaran otoritas akal. Jadi, mempelajari hukum *(Fiqh)* dan penalarannya (Ijtihad) serta mengikuti seorang Mujtahid sebagai ahli Syari'ah, adalah kewajiban agama atas masyarakat (wajib kifayah). Kewajiban

mempelajari *Fiqh,* penalarannya (Ijtihad) dan mengikuti para Mujtahid oleh para Muqqalid, telah diungkapkan juga oleh nas-nas; oleh Al-Qur'an (9:122) melalui hadits (kasus Muadz ibn Jabal, suatu hadis yang terkenal). Malah hadis ini dipercaya mutawatir. Semua mazhab Islam setuju bahwa Ijtihad dipraktekkan oleh para sahabat dan tokoh dari mazhab-mazhab Sunni untuk waktu yang lama, sampai Sunni secara tak resmi menyatakan pintu Ijtihad ditutup. Kita tidak perlu menelusuri segala penjelasan dan pembenaran bahwa Syi'ah memegang ajaran kesinambungan Ijtihad. Tampaknya, dengan suara bulat, diterima oleh semua Syi'ah kecuali bagi minoritas kecil yang disebut *Akhbari* (tradisionis, lawan dari *Ushuli* atau rasionalis karena mengusulkan otoritas Aql; akal). Bagaimanapun, Syi'ah mengutip banyak hadis Nabi dan para Imam dalam mendukung perlunya kesinambungan Ijtihad dan kewajiban bagi para *muqallid* untuk mengikuti para Mujtahid. Sebuah diktum terkenal berbunyi sebagai berikut: 'Setiap ahli hukum *(Faqih)* yang paling mengetahui hukum (Syari'ah) harus diikuti; dia harus diterima sebagai seorang hakim. Kami (para Imam) telah menunjuknya sebagai seorang juru damai. Jika otoritas hukumnya ditolak, maka hukum suci diabaikan. Pengingkaran otoritasnya adalah penolakan kesetiaan kepada kami, dan penolakan otoritas kami berarti keberatan kepada otoritas Allah'.[4]

Namun, otoritas Ijtihad dan para Mujtahid didasarkan pada ilmu mereka yang ahli tentang Syari'ah dan tidak pada kekuasaan spiritual mereka, karena Islam telah menghapus segala bentuk perantara antara Allah dan manusia. Kesinambungan otoritas Ijtihad dan para Mujtahid adalah suatu prinsip Syi'ah yang mendasar, kendati mazhab-mazhab Sunni di bawah pengaruh kebanyakan ulama Sunni lainnya seperti Abu Hanifah,[5] Imam Fakhr al-Din Radhi,[6] al-Zarqani, Ibn Taymyyah, al-Suyuthi, Ibn Hazm, al-Syahristani,[7] Ibn Qayyim al-Jauziyya[8] dan Ibn Khaldun,[9] akhir-akhir ini telah menunjukkan kehendak mereka untuk membuka kembali pintu Ijtihad. Suatu analisa tentang latar belakang sejarah, teologi, sosio-politik tentang jurisprudensi Islam membuat sementara orang menyatakan dengan hati-hati bahwa kemungkinan alasan mengapa pintu Ijtihad ditutup oleh Sunni tetapi tetap terbuka bagi Syi'ah adalah sebagai berikut:

1. Politik, sosial dan khususnya berbagai faktor sejarah, yang

hanya membimbing mazhab-mazhab Sunni pada pemeliharaan aturan yang dilaksanakan sebelumnya yang dibuat olek para ulama terdahulu.

2. Menerima prinsip *de facto* dan otoritas pihak yang berkuasa sebagai *Ulu al Amr* oleh Sunni, dan Syi'ah yang menerima prinsip *de jure* serta hak otoritas para Imam bukannya para khalifah yang adil. Ketaatan 'Ulama pada otoritas sekular sebagai penguasa yang absah.
3. Penolakan otoritas akal sebagai suatu sumber hukum dan membatasi sumber-sumber hukum hanya kepada teks dan berbagai implikasinya, termasuk qiyas oleh orang-orang Sunni.
4. Konservatisme dan tradisionalisme di kalangan Sunni sebagai lawan dari rasionalisme Syi'ah.
5. Dominasi unsur-unsur mistikisme, asketisme (pertapaan) dan *casuitry* (ilmu yang mencampurkan benar dan salah) sebagai akibat dari dominasi yang lama dari kekuasaan monarki Ummayah dan Abbasiyah, serta sebagai akibat dari kekuasaan otoriter Sultan dan Khan atas massa Muslim. *Kasyf* atau aspirasi illuminasi mistik *(Isyraq)* menggantikan akal atau pertimbangan nalar.
6. Formasi lokal yang menghilangkan konsensus dan kelompok di dalam mazhab-mazhab klasik. Kaum Sunni, oleh karenanya, memberikan berbagai fasilitas yang besar bagi formasi Ijma, yang sebaliknya membatasi otoritas dan batasan Ijtihad serta para Mujtahid.
7. Sikap puas terhadap nash dan pemalsuan hadits.
8. Totalitarianisme politik dari para Khalifah, Sultan dan raja-raja serta campur tangan mereka dalam berbagai urusan agama, mendirikan agama, mazhab-mazhab resmi pemerintahan dan memperkenalkan diri mereka sebagai kepala agama, pe-mimpin agama dan bayangan Allah *(Zila al-Allah)* dan penguasa ilahi.

Harus dicatat bahwa walaupun para Mujtahid Syi'ah mendasarkan otoritas pada ilmu mereka, keahlian dalam bidang Syari'ah dan berbagai kualifikasi tenaga ahli, mereka juga memandang diri sebagai para wakil hukum yang sah dari para Imam *(Nayib al-Imam)*, dan dengan demikian sebagai wali agama,

karena mereka diperkenalkan seperti itu oleh banyak hadis para Imam dan dikuasakan sebagai para wali Islam *(Nigahban)* dan dengan demikian memiliki tanggung jawab yang khusus untuk menjalankan Islam *(Walayat al-Faqih)*. Namun, sumber utama otoritas mereka adalah kemampuan jurisdiksi mereka sebagai para ahli hukum *(Mujtahid)* dan sebagai ahli yurisprudensi *(Faqih)*.[10] Karenanya, otoritas mereka tergantung pada tingkatan kemampuan hukum dan keahlian ilmu mereka tentang Syari'ah. Pada sisi lain, para pengikut Mujtahid sesungguhnya tidak memiliki pilihan kecuali mengikuti Mujtahid yang paling cakap *(Marja'i Taqlid)* dan yang paling unggul diantara mereka semua *(A'lam)*. Inilah kenapa para Mujtahid dikelompokkan sebagai berikut:

a. Ahli hukum unggulan mutlak yang diakui *(Mujtahid al-a'lam*)

b. Para Mujtahid kelas dua dibandingkan dengan *Mujtahid al-a'lam*.

c. Ahli hukum tingkat tinggi dalam semua cabang ilmu fiqih *(Mujtahid al-Muthlaq)*.

d. Ahli hukum spesialis yang unggul mutlak absolut tetapi dalam bagian, bidang dan cabang-cabang tertentu dari *Fiqh (Mujtahid al-Mujtayazzi)*.[11]

Mazhab Syi'ah menuntut bahwa baik Imam maupun para wakil Imam, kepemimpinan dan tanggung jawab mereka *(Walayat,* komitmen, mandat) bersandar dan bergantung pada ilmu (*Fiqahat* dan kemudian *Walayat Faqih*), keshalehan dan keadilan (*de jure*) mereka, sebagai lawan dari kekuasaan dan kecakapan (*de facto*) yang diusulkan oleh orang-orang Sunni. Status mandataris mereka akibat hak Ijtihad mereka sebagai hasil dari pengawasan ilmu Syari'ah mereka, hak yang ditolak para ulama Sunni, yang dipandang semata-mata sebagai para pemikir atas berbagai pendapat hukum (Mufti) di antara para tokoh empat mazhab Sunni dan berarti mereka tiada berdaya. Para Mujtahid Syi'ah akibat otoritas Ijtihad mereka, dapat juga mengklaim keabsahan doktrin melalui Imam. Tampak tidak ada konflik antara keduanya: Ijtihad dan perwakilan Imam. Pada waktu bersamaan keduanya adalah Mujtahid dan *Nayib al-Imam* sekaligus. Sebenarnya mereka adalah *Naib al-Imam* melalui kebajikan sebagai Faqih dan Mujtahid. Syi'ah percaya bahwa Mujtahid yang merupakan peringkat tertinggi

(A'lam) dapat membimbing ummat untuk menjalani kehidupan fisik dan spiritual secara individu dan kolektif menurut Syari'ah, Islam yang sesungguhnya, dan ini melalui haknya, superiotitas pengetahuan ilmu yang benar dan tinggi dari Syari'ahnya, dan keshalehan, keadilan dan kemampuannya untuk membimbing ummat menuruti berbagai peraturan yang disimpulkannya secara tepat dari sumber-sumber Syari'ah, disimpulkannya langsung. Harus juga ditunjukkan bahwa usaha dalam seluruh keahlian relijius dan berbagai tela'ah Islam dipandang dalam Syi'ahisme sebagai pelaksanaan tugas relijius *Amr bi al-Ma'ruf*, yang merupakan aktivisme dan peranan Ulama serta Fuqaha.

Sebuah ayat Qur'an biasanya dikutip untuk menjelaskan kewajiban **menelaah** *Fiqh* sehingga prinsip *Amr bi al-Ma'ruf* dapat dilaksanakan. Ayatnya berbunyi sebagai berikut: *Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam ilmu mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya (melawan kejahatan).*[12]

Jadi, kita dapat melihat bagaimana kedudukan dan tanggung jawab Ulama dan Fuqaha dijelaskan dalam istilah-istilah tugas relijius dan *Amr bi al-Ma'ruf*. Sebenarnya, bentuk-bentuk prinsip ini merupakan titik temu teori Syi'ah mengenai teori keulamaan relijius (Fiqh-Ilm) dan tentang pemerintahan Syi'ah. Baik kemahiran ilmu pengetahuan relijius dan keulamaan serta tanggung jawab (Walayat) melaksanakan pemerintahan dijelaskan dalam istilah-istilah *Amr bi al-Ma'ruf*. Jadi, tanggung jawab Ulama dan Fuqaha Syi'ah merupakan landasan Islam otentik yang sehat itu sendiri dan penyebab dari sikap bangkang mereka dan status revolusioner mereka. Sunni memandang prinsip ini sebagai suatu persepsi moral dan tak wajib dan karenanya tidak ada kekuatan Ulama mereka. Kurangnya inisiatif mereka disebabkan tertutupnya gerbang Ijtihad yang menyeret mereka untuk memandangnya hanya sebagai bagian dari administrasi negara. Sebaliknya, Ulama Syi'ah telah menjaga kemerdekaan dan otonomi mereka dari negara. Inilah kenapa banyak pemikir Syi'ah memandang Ijtihad sebagai suatu prinsip revolusioner dalam Syi'ah.[13] Mereka menganjurkan Ijtihad sebagai tulang punggung revolusi kebudayaan dan politik

yang berkesinambungan. Ali Syariati percaya bahwa bila prinsip Ijtihad tidak sepenuhnya digunakan dan gerbang Ijtihad tidak dibuka kembali, tidak ada harapan kemerdekaan budaya dan politik Muslimin. Ia memandang otoritas Ijtihad sebagai ciri yang paling khas Syi'ahisme. Ia mengusulkan agar diambil segala langkah yang perlu untuk membuka kemerdekaan kembali gerbang Ijtihad bagi semua mazhab Islam.[14]

Bahkan prinsip Imamah dan *Walayat al-Faqih* sekarang dapat dijelaskan dari sudut pandang Sunni. Orang-orang Sunni juga terus mempropagandakan *Imamah* sebagai bentuk pemerintahan Islam yang benar. Mereka menerima Imam sebagai penguasa *de jure* dan khalifah sebagai penguasa *de facto* baik Sunni maupun Syi'ah.[15] Ajaran *Walayat al-Faqih* juga mencanangkan pembenarannya terutama dari prinsip *Amr bi al-Ma'ruf*. Kedudukan Ulama dalam Syi'ah juga dijelaskan dalam istilah-istilah prinsip Ijtihad yang dapat dimanfaatkan oleh para ulama Sunni dengan membuka kembali pintu Ijtihad. Membicarakan Imamah dan Ijtihad, al-Mawardy menyatakan: *Imamah* adalah khilafat nubuwah dalam melindungi berbagai urusan relijius dan temporal.[16] Imamah, dituntun oleh Syari'ah dan akal, adalah untuk mengikuti 'jalan yang benar'. Sifat Imam harus sebagai berikut: adil, berilmu pengetahuan untuk tujuan 'Ijtihad', tidak memiliki cacat dalam kemampuan fisik dan pikirannya, bijaksana dalam mengatur ummat dan menjalankan berbagai urusannya, berani untuk melindungi Islam dan memerangi musuh-musuhnya.[17] Pernyataan al-Mawardi sangat erat kaitannya dengan kedudukan kepemimpinan (Imamah) ummat dalam Konstitusi Republik Islam Iran. Artikel lima menyatakan bahwa *Walayat* dan *Imamah* (kepemimpinan *Ummah*) diberikan kepada seorang Faqih (Mujtahid ulung, ahli hukum) yang bersifat sebagai berikut: adil, shaleh, mengikuti zaman, berilmu pengetahuan duniawi, berani, administrator dan organisator yang bijak *(Muddabir)* dalam mengatur ummat dan melaksanakan berbagai urusannya, yang diakui dan diterima oleh mayoritas sebagai pemimpin.[18] •

BAB 13
KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM

Hanya Islamlah agama yang tidak dinamai menurut nama orang, kelompok atau ras. Meskipun singkat, nama agama itu menjelaskan ideologi dan pandangan-dunianya. Agama-agama lain diasosiasikan dengan orang, kelompok atau suatu ras.

Kata 'Islam' bentuk kata benda dari kata kerja infinif salama, yang artinya penyerahan, tanggung jawab; dan berarti taat atau patuh kepada Tuhan.[1] Kata lain yang berasal dari akar kata yang sama adalah 'Muslim' atau 'Muslimin' yang menunjuk kepada "mereka yang tunduk."[2] Apa saja yang ada di langit dan di bumi, tak terkecuali, tunduk menyerahkan dirinya kepada Allah.[3]

Penyerahan seperti itu — menurut istilah Arab, adalah Islam — yang merupakan hakikat risalah yang dibawa oleh Nabi (Risalah Tuhan melalui Nabi). Jadi, kita dapat menolak secara keseluruhan istilah "Muhammadanisme" yang digunakan oleh non-Muslim, Untuk memahami Islam seperti yang dipahami oleh kaum Muslimin, sebaiknya kata 'Muhammadan' dan 'Muhammadanisme' dibersihkan dari kamus kita. Seorang Muslim memandang keyakinannya sebagai agama yang bukan ditetapkan oleh Muhammad, akan tetapi oleh Tuhan Sendiri. Menyatakan Islam sebagai Muhammadanisme adalah hasil analogi yang salah dengan agama Kristen. Kaum Muslimin tidak menyembah Muhammad seperti orang Kristen menyembah Yesus, dan Islam

bukan dibuat oleh Muhammad sebagaimana anggapan Kristen terhadap Yesus. Muhammad bukanlah Tuhan besar, atau Tuhan kecil, atau bahkan pembantu Tuhan atau memiliki sifat Ketuhanan. Jadi, jelas bahwa peranan Muhammad dalam Islam berbeda dengan peranan Yesus menurut orang Kristen. Muhammad tidak pernah mengklaim lebih dari seorang yang menerima wahyu dari Tuhan. Bukan dia yang membuat Islam, dia hanya menerima Risalah Islam. Dia bukanlah Tuhan atau rekan Ilahi atau sesuatu yang serupa dengan-Nya. Dia bukanlah penjelmaan Tuhan, tetapi penjelmaan Islam, sebagai orang pertama yang meyakini misinya sendiri dan mengamalkannya.[4]

Singkatnya, agama yang menggunakan nama "Islam", karena tunduk dan pasrah kepada Allah itu, adalah hakikat dan jiwa agama itu. Allah Sendiri menyatakan dalam Qur'an, *"Sesungguhnya, agama yang diakui di sisi Allah ialah Islam"* (pasrah kepada petunjuk-Nya).[5] Dan orang yang menganut keyakinan itu adalah Muslim (orang yang tunduk). "Dia telah menamai kalian Muslimin."[6]

Ketaatan seorang Muslim kepada Allah sebagai satu-satunya Kepala Masyarakat Islam dan sebagai satu-satunya sumber petunjuk, wahyu dan Islam, dan sebagai pemimpin pertama (Hadi) Ummat serta manusia. Muhammad berfungsi sebagai rambu di jalan yang lurus *(shirath al-mustaqim)* kebahagiaan dan keselamatan atas nama tiap orang memikul tanggung jawab sendiri. Kehidupan Muhammad bukanlah kehidupan seorang Tuhan, melainkan seorang manusia; keseluruhan hidupnya benar-benar manusiawi.[7]

Sistem kependetaan dan kerohanian lembaga-lembaga Kristen berasal dari teologi Kristen dan Kristologi. Tetapi, teologi Islam dan doktrinnya mengenai Tuhan dan Rasul-Nya Muhammad tidak sesuai dengan doktrin perantara (yang semata-mata urusan rohani), dan oleh karena itu Islam menolak doktrin kepemimpinan profesional rohani, perantara dan para rohaniawan. Akibat wajar dari teologi Islam dan persaudaraan Islami adalah persamaan, persamaan di antara kaum Muslimin di hadapan Allah. Ketua masyarakat Islam adalah Allah Sendiri, dan kekuasaan-Nya atas umat-Nya adalah segera dan langsung, tanpa perantara. Muhammad pun bukanlah kepala Ummat seperti itu.

Islam adalah pemerintahan Allah yang langsung, kekuasaan Tuhanlah yang langsung mengawasi hamba-hamba-Nya. Dalam Islam, Tuhan tidak jauh dari hamba-Nya dan tak perlu perantara. Oleh karena itu, Islam tidak memerlukan pendeta, gereja, biarawan, sakramen-sakramen atau simbol-simbol. Apakah gunanya perantara antara manusia dan Penciptanya yang mengetahui manusia sebelum lahirnya dan lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri?[8] Manusia itu sendirian di hadapan Allah, dalam hidup dan mati; dia boleh berbicara langsung kepada-Nya tanpa perkenalan dan upacara. Protestanisme paling kaku dalam agama, Kristen, samahampir dapat disebut agama pendeta bila dibandingkan dengan Tauhid Islam ini, yang tegar dan tidak kompromi terhadap campur tangan apa pun antara manusia dan pencipta-Nya.[9]

Manusia tunduk hanya kepada Allah, pasrah langsung hanya kepada rahmat-Nya, yang menurut formula seorang Muslim, "Dari Allah kepada Allah."[10] Penyerahan manusia yang langsung kepada Tuhan inilah aqidah yang benar. Itulah alasan Islam agama yang benar. Hanya Islamlah yang meletakkan roh agama di hadapan Allah dan tiada selain lagi. Kepasrahan yang semata-mata langsung ini akan membebaskan semua bentuk perantaraan. Dalam Islam, Muhammad dan para pemimpin agama tidak berada dalam posisi menengahi, memonopoli hubungan antara Tuhan dan hamba-Nya, menerima tobat atau mengampuni dosa; hanya Tuhanlah yang melakukan ini. Qur'an mengatakan: Tuhanlah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan.[11]

Kata yang digunakan dalam Islam untuk petunjuk adalah *Hidayah,* sedang untuk pengarah dan kepemimpinan adalah *Imamah.*[12] Dalam Islam, petunjuk selalu berasal dari Tuhan. Dialah pemberi petunjuk *(Hadi)*, dan bimbingan hanya datang dari Dia, karena hanya Dialah Yang Maha Mengetahui, yang paling baik dan Pemimpin yang terbaik. Para Nabi tidak memberi hidayah, mereka hanya membawa bimbingan risalah Ilahi, dan Tuhan Sendirilah yang memberi hidayah. Jadi, petunjuk dan kepemimpinan dalam masyarakat Islami bermula dan berdasar pada milik Allah semata-mata dan Dia mengaruniakan atas siapa yang Dia kehendaki, juga bahwa hanya Dialah yang Maha Menge-

tahui, namun memberikan kepada manusia sebagian dari pengetahuan-Nya.[13] Kita mengetahi bahwa kepemimpinan pada mulanya milik Allah dan Dia telah mengkaruniakannya kepada masyarakat Islam.[14]

Namun, apakah Allah telah mengkaruniakan kepemimpinan ini langsung kepada kaum muminin ataukah melalui utusan-Nya? Kaum Sunni meyakini bahwa Islam adalah suatu sistem demokrasi, karena para khalifah dipilih langsung oleh rakyat. Kaum Syi'ah berpendapat bahwa para Imam adalah khalifah Allah dan kehendak Ilahi, oleh karena itu harus diangkat langsung oleh Allah; Islam bukanlah suatu pemerintahan rakyat, ia merupakan pemerintahan Allah. Allah adalah kepala masyarakat Islam.[15]

Teologi Kristen sangat menekankan ajaran dosa warisan dan penebusan dosa. Ia mengklaim bahwa dengan melanggar peraturan Tuhan untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan, Adam telah melakukan dosa besar. Dosa Adam itu diwarisi oleh keturunan Adam: bahwa semua manusia dilahirkan telah membawa dosa. Kini, hanya dengan penumpahan darah melalui perantara dan penengah Yesuslah dosa asal bani Adam itu dapat dihapus. Seperti kata St. Paul, "Tanpa penumpahan darah, tak mungkin ada ampunan."[16] Begitulah Yesus Anak Tuhan yang turun dari langit, yang memberikan darahnya, menanggung penderitaan yang tak terlukiskan dan meninggal di tiang salib karena dosa-dosa manusia. Bibel mengatakan, "Oleh karena engkau ketahui bahwa engkau bukan menebus dosa dengan sesuatu yang disuap, seperti emas dan perak...namun dengan darah Kristus, bagaikan anak lembu tanpa cacat dan tanpa noda."[17] Tak seorang pun dapat selamat kecuali dia menerima Yesus sebagai penebusnya.

Jadi, peranan Yesus sebagai pemimpin pertama dalam Kristen adalah seorang spiritual murni dan begitu pula peranan mereka yang mengklaim sebagai penggantinya. Keutamaan mereka atau tugas mereka satu-satunya ialah penebus, perantara dan penengah. Inilah sebabnya penyaliban memegang peranan penting dalam makna simbolik, dan kependetaan serta penengah rohani tak dapat dihindari dari ajaran Kristen. Sesungguhnya, Kristen tanpa salib, pendeta, penengah rohani, gereja, perantara, penebusan dosa dan sebagainya, bukan Kristen lagi. Inilah yang

telah membuat konsep kepemimpinan dalam ajaran Kristen menjadi kepemimpinan spiritual murni.

Ajaran-ajaran Islam tidak hanya berisi doktrin Ketuhanan, untuk diimani. Ajaran-ajaran itu mempengaruhi pemikiran kaum Muslimin dalam segala segi dan lapangan. Pemikiran seorang Muslim mengenai Keesaan Tuhan (Tauhid) diharuskan dan dicerminkan dalam perjuangan mereka terhadap suatu koordinasi dan penyatuan manusia dan alam, agama dan politik, iman dan sains, kosmos manusia serta berbagai aspek kehidupan. Posisi Islam dalam hal ini (keserasian dan kerja sama yang sempurna antara jiwa dan raga, manusia dan alam, dan perpaduan berbagai aspek kehidupan manusia) tak dapat diragukan. Ia tercermin dalam cita-cita dan realitasnya. Pertama, ia mengajarkan manusia bahwa ibadah permanen kepada Allah dalam segala jenis kegiatan hidup manusia adalah amat penting dalam kehidupan ini; kedua, bahwa pencapaian tujuan ini tak dapat diraih selama kita membagi kehidupan kita menjadi dua bagian yang terpisah antara spiritual dan material. Keduanya harus disatukan, dalam kesadaran dan tindakan kita, menjadi kesatuan yang serasi. Keesaan Allah dalam Islam telah mempengaruhi seluruh cita-cita dan realias Islam. Peranan dan tanggung jawab Muhammad bukan hanya spiritual dan bukan pula hanya material, tetapi spiritual-material, fisik-psikhologis, peranan politik keagamaan. Apabila tujuan hidup kita secara menyeluruh adalah beribadah kepada Allah, maka perlu kita memandang kehidupan ini, dalam semua aspek secara menyeluruh, sebagai satu pertanggungjawaban moral yang kompleks. Jadi, segala tindakan kita, bahkan sesuatu yang nampaknya sepele pun, haruslah dilaksanakan dengan penuh kesadaran sebagai bagian dari rencana universal Allah. Keadaan semacam itu, bagi manusia yang berkemampuan biasa, merupakan ideal yang jauh; tetapi, bukankah agama bertujuan menghantarkan cita-cita menjadi kenyataan yang riil? Menurut Islam, beribadah kepada Allah dalam pengertian yang luas, merupakan makna kehidupan manusia.

Suatu akibat logis dari sikap ini adalah perbedaan yang jauh antara Islam dan agama-agama yang terkenal lainnya, dan antara konsep kepemimpinan dalam Islam dan kepemimpinan agama dan rohani dalam sistem agama-agama lain itu. Islam, sebagai

ajaran, tidak hanya berusaha mendefinisikan hubungan-hubungan metafisik antara manusia dan Penciptanya, tetapi juga — hampir tidak kurang intensifnya — hubungan keduniaan antara individu dan masyarakatnya. Keesaan Allah tidak hanya dalam hakikat-Nya, tetapi juga dalam tujuan-Nya, dan oleh karena itu karya-Nya merupakan satu kesatuan, mungkin dalam hakikat, namun pasti dalam tujuan.[18]

Akibat wajar dari ini adalah bahwa risalah Islam termasuk suatu risalah yang meliputi urusan-urusan agama dan politik, dan tidak hanya terbatas pada hal-hal spiritual, dan bahwa kepemimpinan dalam Islam itu bukan hanya kepemimpinan agama dan rohani, namun kepemimpinan yang komprehensif dan inklusif. Doktrin kesatuan dunia dan akhirat, agama dan politik dalam Islam, sebagiannya tentulah merupakan penyebab tidak ada kependetaan, gereja, ortodoksi, kepausan, hirarki, dewan gereja, formalisme, simbolisme, upacara keagamaan, menurut pengertian Kristen, di dalam Islam.[19]

Sentral keyakinan Islam adalah Allah. Realitas dan kekuatan-kekuatan yang melampaui pengalaman manusia biasa secara tajam difokuskan dalam ketauhidan. Di mana pun, teologi Islam tak bisa memulai kecuali pada persimpangan antara politeisme dan teisme, di mana bangunan ateisme dihancurkan dan berhala (dalam berbagai bentuk termasuk pendeta perantara dan penengah rohani) diharamkan atas nama ketauhidan murni.

Gagasan Kristen yang menjadikan Yesus pusat keimanan Kristen, misalnya, sudah lebih daripada pemujaan berhala. Kepemimpinan rohani tidak lain dari monopoli jalan kepada Ilahi dan dipergunakan untuk mencabut hak manusia biasa untuk berhubungan dengan Tuhan. Yudaisme mempunyai rasnya dan Musa; Kristen mempunyai Yesus; Buddisme mempunyai Gautama, dan sebagainya. Namun, dalam Islam tidak demikian dan tak satu pun turut mempunyai Ketuhanan dengan Allah. Muhammad hanyalah seorang manusia risalah. Dia bukanlah seorang juru selamat seperti anggapanKristen terhadap Yesus, karena tiap-tiap orang bertanggung jawab atas keselamatannya sendiri-sendiri. Dia adalah utusan Allah, guru risalah dan pemimpin masyarakat. Jadi, jelas bahwa peranan Muhammad sebagai manusia pemimpin yang pertama dari umat Islam, berbeda dengan kepe-

mimpinan Yesus, Budda dan Gautama atau para pendiri agama lain, karena Muhammad bukan pendiri Islam melainkan mendakwahkannya. Allah adalah pendiri Islam. Muhammad, dalam Islam, sebagai pemimpin pertama masyarakat Islam, merupakan teladan utama, agar diteladani dalam kepribadian yang baik dan kebajikan. Inilah sebabnya, kata-katanya, perbuatan-perbuatan dan persetujuannya dijadikan sebagai pola ideal dan dianggap sebagai tradisi Islam, dan diterima sebagai pemimpin kaum Muslimin; namun bukan sebagai perantara, penebus dosa, juru selamat atau Tuhan. Jiwa Islam adalah maklumat Keesaan Allah, sedang jantungnya berserah diri secara mutlak kepada kehendak Allah.[20]

Islam tidak pernah mencampurkan Ketuhanan dengan kemanusiaan, yang membawa kepada kebingungan, kontradiksi dan kerumitan. Islam adalah pertemuan antara Tuhan sebagai Tuhan dan manusia sebagai manusia; bahwa Tuhan dilukiskan, bukan sebagai yang dikenalkan atau dicapai melalui perantara, bukan sebagai Dia memanifestasikan Diri dalam upacara tertentu pada sesuatu saat, namun secara langsung dan terpisah dari sejarah: Dia ada sesuai dengan sifat-Nya, Dia menciptakan dan mewahyukan. Manusia dilukiskan bukan sebagai makhluk yang jatuh yang memerlukan mukjizat perantara untuk menyelamatkan, namun sebagai manusia, sebagai makhluk teomorfik yang dikaruniai kecerdasan akal yang dapat memahami kemutlakan secara langsung, dan dengan kemauan yang mampu berkehendak memilih apa yang mengantarkan kepada yang mutlak. Menurut Islam, tidak ada sesuatu seperti separuh Tuhan, separuh manusia atau putera Tuhan. Menyebutkan Tuhan adalah juga menyebutkan "wujud, penciptaan, wahyu, arahan, bimbingan, keselamatan"; dengan kata lain, realitas, manifestasi, reintegrasi: Manusia adalah teomorfis, transenden, cerdas dan kehendak bebas yang bertanggung jawab.[21]

Doktrin Islam tergantung pada dua prinsip: pertama, "tidak ada tuhan (atau realitas atau kemutlakan) kecuali Allah (atau Realita atau Kumutlakan)" *Laa ilaaha illallah*; dan kedua, 'Muhammad (yang mulia, yang sempurna) adalah utusan-Nya, juru bicara, pembawa pesan (Muhammad Rasul Allah).'

Muhammad diperkenalkan dalam Qur'an sebagai Rasul Allah

(utusan Allah) dan seperti para Nabi lainnya.[22] Kekuasaan mereka didasarkan pada dua prinsip:

(a) menerima wahyu Ilahi dan (b) menyebarkan wahyu itu, dan menyaksikan pelaksanaannya. Maka otoritas para pemimpin agama Islam, juga didasarkan pada dua prinsip:

(a) memahami wahyu yang diturunkan kepada Muhammad dan (b) mengembangkan dan mengawasi pelaksanaannya. Tak satu pun Nabi, tidak juga para pelanjutnya berhak mengubah wahyu itu, menambah atau mengurangi barang sedikit pun. Sebutan yang diberikan kepada Muhammad, selain Rasul Allah (utusan Tuhan), adalah guru, pembersih,[23] pemimpin dan teladan moral.[24]

Konsep kepemimpinan dalam Islam berasal dari doktrin Tauhid dan dimulai oleh Muhammad sendiri. Dia tidak pernah mengklaim lebih dari seorang manusia yang kepadanya di turunkan wahyu kebenaran oleh Allah. Allah adalah otoritas terakhir dan Dia-lah sumber pengetahuan dan hukum dan hanya pengetahuan-Nya itulah kebenaran. Otoritas Muhammad bersifat sementara dan bukan selamanya. Muhammad, tidak seperti Yesus yang diklaim menjadi Alfa dan Omega dan cahaya dunia, dia diklaim tidak lebih daripada seorang manusia yang otoritasnya hanya didasarkan pada pengetahuannya atas maksud dan kehendak Allah. Dalam Islam, Allah adalah Awal, Akhir dan cahaya dunia.[25] Muhammad sendiri berkata: "Saya adalah manusia lengkap dan sempurna." Seseorang datang menghampiri dia seraya mengagumi dan memujinyaa. Serentak dia berkata kepadanya, "Tenanglah. Saya bukanlah seorang raja. Saya hanyalah putra seorang wanita Quraisy, yang memakan daging kering." Jawabnya kepada orang itu seraya menyebut dirinya "Saya pelayan anda."[26] Muhammad tidak disembah, dipuja seperti dewa atau dijadikan simbol dalam Islam. Dia diakui oleh kaum Muslimin sebagai saksi atas apa yang ada, sebagai manusia sempurna yang terbuka, penuh harmonis dengan kehidupan, sehingga dia mengenalnya lahir dan batin. Para da'i juru dakwah) Islam tidak bisa bertindak melebihi apa yang dia buat atau apa yang dia tidak kerjakan.[27] Ketika seorang kepala suku yang telah masuk Islam berkata kepada Muhammad, "Engkau adalah pangeran kami," utusan Allah itu menjawab serentak, "Pangeran hanyalah Allah, saya bukan."[28]

Islam bersifat sosial, karena tujuan Islam adalah keseluruhan

manusia. Dalam Islam, wajah manusia, kemanusiawian manusia dan seluruh manusia termasuk. Islam adalah penyerahan kepada Allah, yang merupakan kebenaran sejati, seluruh kebenaran, keabdian, keseluruhan, kebenaran penuh, hanya kebenaran semata-mata dan tiada lain daripada kebenaran. Kebenaran bukanlah milik seseorang, orang-orang, suatu kelompok, kelompok-kelompok, suatu ras, suatu bangsa dan tidak dapat dimonopoli. Ia milik setiap orang, semua makhluk dan seluruh manusia. Apabila ada alternatif bagi semua untuk dapat mengatur dan memainkan peran penting dalam hubungan-hubungan dalam masyarakat, haruslah idealisme dan kecendekiaan. Pikiran atau jiwa manusia tidak mempunyai visi tentang hubungan antara manusia yang lebih besar atau lebih mulia daripada hubungan intelektual, dan tentu tak ada visi dunia selain daripada di mana seseorang dapat mempengaruhi, menentukan, mengubah atau membentuk kembali anggotanya melalui argumen atau contoh-contoh.[29]

Bagi seorang Muslim, tidak cukup sekedar mengetahui kebenaran, meyakini dan mengamalkannya. Semangat kebenaran (Islam) di dalam hari kaum Muslimin tak pernah dapat berhenti sehingga ia terwujud dalam pemikiran, kata-kata dan perbuatan bagi setiap orang.[30] Mengejar kebahagiaan bagi seorang Muslim tak boleh menjadi pengejaran kebahagiaan orang itu sendiri, karena ini tidak akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang dicarinya. Tugasnya adalah semata-mata membuat orang lain menjadi bahagia; keselamatannya bergantung kepada keberhasilan tindakan yang akan dicapai dalam menjalankan kewajiban ini. Inilah mengapa masyarakat Islam *(ummah)* merupakan komunitas yang membimbing dan mengarahkan manusia yang kewajibannya adalah membawa manusia kepada keselamatan, *"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat yang adil dan pilihan yang kewajiban kamu adalah Membimbing (menjadi saksi, teladan, pola, pemimpin) atas umat manusia."*[31]

Jadi, masyarakat Islam adalah umat yang memimpin, dan kepemimpinan adalah milik masyarakat. Ketimbang hanya sekedar memahami kebenaran itu, seorang Muslim diwajibkan mencarinya, mengamalkannya dan memperkenalkan kebenaran itu kepada orang, mengubah dunia ini ke dalam pola Ilahiah, mengakui dan membentuk materi-materinya, termasuk manusia,

makhluk yang paling sempurna, ke dalam persamaan yang harus disesuaikan dengan konteks perintah dan kehendak Ilahi. Qur'an menyatakan bahwa: *"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang Ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar (amar makruf nahi mungkar."*[32]

Sesungguhnya, mengubah dunia ke dalam pola Ilahiah *(ishlah)* dan mewujudkan kehendak Ilahi *(Falah)* adalah pokok dari kebanyakan ayat Qur'an. Qur'an menyebut para Nabi, reformator, transformator *(Mushlih)*[33] dan dengan demikian para pemimpin, serta teladan *(Syhuhada')* telah menjadikan umat Islam pembawa, pembimbing, pengubah dan umat pembangun masyarakat manusia. Seorang Muslim dan umat Islam berkewajiban untuk membawa manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Doktrin amar makruf nahi mungkar bukan hanya ajaran Islami, tetapi juga adalah semangat dan tujuan tunggal semua agama samawi, dan tentu juga Islam. Umat Islam adalah umat amar makruf dan dengan demikian ia memimpin, dan memang pantas memegang pimpinan. Kewajiban ini adalah pertama-tama kewajiban masyarakat, dan melaluinya ia menjadi kewajiban anggota-anggotanya.

Mereka yang perbuatannya memenuhi tanggung jawab sosial ini *(wajib al-kifayah)* dan mencapai kepemimpinan masyarakat, mengerjakan kewajiban untuk kepentingan masyarakat, dan mewakili *ummah.* Qur'an dalam hal ini menyatakan: *"Dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar."*[34]

Tugas itu adalah kewajiban umat, dan setiap Muslim, pertama, harus mengetahui dengan jelas apa kebenaran itu, dan kedua, berusaha membawa semua manusia kepada pengetahuan tentang kebenaran, dan ketiga, merealisasi kebenaran itu sedapat-dapatnya. Inilah tepatnya mengenai pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam; memimpin manusia kepada yang makruf, kesejahteraan, keselamatan dan kebahagiaan. Tidak adanya kependetaan dan kekuasaan gereja dalam Islam, dengan jelas menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam benar-benar milik umat dan melalui umat kepada para individu. Para individu memimpin atas nama masyarakat. Tak seorang pun berhak

memonopoli kebenaran. Kebenaran adalah suatu amanah Ilahi yang umum, yang realisasinya merupakan tanggung jawab umat. Yang dimiliki oleh setiap orang harus menjadi tanggung jawab setiap orang dan realisasinya harus menjadi tanggung jawab setiap orang. Setiap Muslim adalah pemimpin atas dirinya, dan kemungkinan memimpin, tidak hanya bagi semua kaum Muslimin yang lain, tetapi juga bagi umat manusia. Inilah kepemimpinan dan inilah sebabnya, Ummat Islam bertanggung jawab memimpin manusia[35], dan dimaklumkan sebagai umat pemimpin manusia.

Telah sering dikatakan bahwa tidak ada kependetaan dan kepemimpinan rohani dalam Islam. Tidak adanya kependetaan profesional dan orde rohaniawan dalam Islam antara lain karena tanggung jawab memimpin manusia kepada kebenaran adalah tanggung jawab umum, sosial dan kolektif dan harus dijalankan oleh umat Islam. Pertanggungjawaban, kepemimpinan, aktivitas keagamaan harus menjadi urusan bersama.

Namun, tidak adanya kependetaan dalam Islam terutama disebabkan oleh teologi Islam. Doktrin Keesan Allah mengandung banyak implikasi -intelektual, sosial, politik dan sebagainya. Ia begitu fundamental dan mendasar dalam Islam sehingga bahkan Muhammad, utusan Allah terakhir, hanyalah hamba-Nya, meskipun yang paling mulia karena ketaqwaan dan pengetahuannya. Inilah sebabnya, Islam tidak mengakui sesuatu perantara, kependetaan, tempat, waktu atau apa pun lainnya antara Allah dan hamba-Nya. Muhammad bukanlah seorang perantara antara Allah dan hamba-hamba-Nya. Ia adalah utusan-Nya yang menerima risalah Tuhan dan menyebarkannya, dan otoritas Muhammad terletak pada ketaqwaan dan pengetahuannya tentang risalah itu.

Meskipun nampak asing bagi orang yang terbiasa dengan regim penebusan gereja, kependetaan profesional dan perantara, Islam sama sekali menolak semua ini. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Oleh karena itu ia tak perlu dibaptis oleh orang lain. Setiap orang adalah sama dan secara langsung dekat dengan Allah, dan tak perlu orang lain mengakui dosa-dosanya atau menjadi perantara antara dia dan Tuhan-Nya atau sesuatu yang semacamnya. Tak satu pun yang dapat turut serta dalam Ketuhanan dengan Allah. Pendek kata, tidak ada istilah perantaraan antara Allah dan hamba-Nya. Otoritas para pemimpin agama

dalam Islam termasuk para Rasul Tuhan, kesemuanya didasarkan pada ketaqwaan mereka dan pengetahuan mereka tentang kebenaran (hakikat Syari'ah). Inilah sebabnya para pemimpin agama tidak pernah disebut pemimpin rohani dalam tradisi literatur Islam. Istilah spiritualisme dan pemimpin spiritual adalah asing bagi Islam dan bukan istilah Islam. Para pemimpin selalu diacu dengan istilah-istilah yang menjelaskan bidang keahlian mereka, seperti *fuqaha'* (para ahli hukum yurisprudensi) *hukama'* (para filosof), *mufassirin* (para penafsir Qur'an), *mutakallimin* (ahli teologi), dan sebagainya, dan pada umumnya disebut *Ulama* (kaum terpelajar), dan bukan pendeta, rohaniawan atau istilah yang serupa.[36]

Ini tidak berarti bahwa para pemimpin Islam tidak bertanggung jawab atas urusan spiritual dan keagamaan umat mereka. Karena sesungguhnya, Islam mendirikan tujuan spiritual dan agama, untuk semua kegiatan fisik dan material, dan menjadi kewajiban bagi para pemimpin untuk mengawasi melaksanakannya. Ini berarti bahwa mereka tidak hanya memenuhi tugas-tugas spiritual karena tidak ada garis pemisah antara agama dan politik, keduniaan dan rohani, roh dan materi.

Tidak benar hanya menyebut suatu kelompok tertentu sebagai rohaniawan karena setiap orang dan segala sesuatu bersifat spiritual dalam sesuatu pengertian.[37]

Jadi, dapat kita pahami mengapa tidak ada kepemimpinan agama profesional, kependetaan atau hirarki dalam hal-hal spiritual di dalam Islam. Peranan kepemimpinan religius Islam tidak hanya peranan rohani atau peran orang yang mengaku berhak menjadi perantara (yang semata-mata merupakan urusan spiritual) antara manusia dan Tuhan, namun ia merupakan peran para ahli yang mengetahui Islam karena mereka telah mempelajarinya dan telah menjadi ahli dalam hal itu.

Akibat logis teologi Islam, hadis, ayat-ayat Qur'an dan apa yang telah dibicarakan hingga sekarang, adalah bahwa konsep kepemimpinan Islam mengandung ciri-cirinya sebagai berikut:

1. Konsep kepemimpinan harus sesuai dengan ajaran Tauhid.
2. Allah adalah pemimpin Umat.[38]
3. Kepemimpinan telah dikaruniakan kepada umat Islam dan kepada Nabi sebagai amanah Ilahi.[39]

4. Kepemimpinan bukanlah kekuatan politik, ia merupakan tanggung jawab sosial untuk memberikan keamanan dan kedamaian bagi umat Islam agar mampu mencapai maksud dan tujuan Ilahi.
5. Kepemimpinan terkait sangat erat dan didasarkan pada ajaran amar makruf nahi mungkar (menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran.
6. Kepemimpinan sebagai suatu tanggung jawab sosial (wajib al-kifayah) yang semula milik ummah seluruhnya, dan pemerintah dan para pemimpin hanyalah wakil umat. (Tanggung jawab pemerintah tidak melepaskan umat dari tanggung jawabnya, namun ia menjadi tanggung jawab ganda, umat dan pemerintah).
7. Kepemimpinan sebagai tanggung jawab dalam Islam dimulai oleh Muhammad dan kepemimpinannya, didasarkan pada risalah yang dibawanya (missinya sebagai Rasul Allah) dan otoritasnya bersifat sementara dan bukan asali.
8. Kenabian adalah tanggung jawab menyebarkan firman Allah, memimpin dan membimbing umat dan mengajar serta mendidiknya agar mampu memenuhi tujuan Ilahi.
9. Kenabian dan kepemimpinan bukanlah kekuatan atau kekuasaan politik, melainkan tanggung jawab.
10. Tidaklah benar menambahkan kata sifat "religius" kepada kepemimpinan (kepemimpinan religius) dalam Islam karena ia bukan saja kepemimpinan dalam urusan-urusan agama, tetapi umum, karena tidak ada pemisahan antara agama dan politik dalam Islam. Islam adalah agama yang mencakup semua, dam kepemimpinan dalam Islam juga mencakup keseluruhan.
11. Kepemimpinan dalam Islam bukan hanya kepemimpinan rohani karena tidak ada tempat bagi doktrin dosa asal, penebusan dan perantaraan dalam Islam. Manusia adalah makhluk bebas yang bertanggung jawab dan tak dapat dibebani dosa orang lain dan tak dapat ditebus oleh orang lain atas dosa karena perbuatannya.
12. Kepemimpinan dalam Islam bukanlah suatu profesi.

13. Kepemimpinan dalam Islam tak dapat dimonopoli oleh suatu kelompok, suatu ras, suatu bangsa dan sebagainya.
14. Kepemimpinan dalam Islam dihubungkan dengan keahlian dan tanggung jawab. Garis antara pemimpin dan rakyat biasa adalah karena keahlian, bukan antara pemimpin rohani dan orang awam.
15. Tidak ada yang dapat dijalankan oleh para pemimpin Islam atas rakyat biasa kecuali dalam hal-hal yang memerlukan pengetahuan tentang Syari'ah dan keahlian dalam masalah Islam.
16. Dilarang memungut uang karena menjalankan kewajiban agama. Oleh karena itu, para pemimpin agama tidak dibolehkan meminta imbalan dalam menjalankan kewajibannya. Jadi, kepemimpinan bukanlah posisi komersial dan sekuler.
17. Seseorang yang berpengetahuan dan bertaqwa dapat diterima sebagai pemimpin oleh masyarakat.
18. Kepemimpinan adalah suatu tanggung jawab bukan suatu kedudukan; ini berhubungan dengan kewajiban, bukan dengan hak-hak istimewa.
19. Para pemimpin agama tak dapat membentuk suatu kelas dalam masyarakat Muslim karena Islam mempercayai masyarakat tauhid yang tanpa kelas.
20. Tidak ada hirarki dan orde militer dalam kepemimpinan Islam.
21. Para pemimpin Islam bukanlah orang-orang yang maksum, meskipun mereka dimaafkan karena kesalahan-kesalahan kecil dan memperoleh ganjaran karena usaha-usaha kebajikan mereka.
22. Kepemimpinan dalam Islam bukanlah urusan selektif, tetapi suatu tanggung jawab elektif dan dilaksanakan dengan pemilihan secara alami bagi yang memenuhi syarat.
23. Kepemimpinan bukanlah jabatan turun-temurun.
24. Karena kepemimpinan didasarkan pada pengetahuan tentang Islam, keahlian, rasa tanggung jawab dan ketaqwaan, yang unggul dalam hal inilah yang dihubungkan dengan

keunggulan dalam kepemimpinan. Yang paling unggullah yang paling tinggi.

25. Mesjid dalam Islam berbeda dengan gereja dalam Kristen. Mesjid bukan hanya tempat untuk melaksanakan ibadah, karena konsep ibadah dalam Islam meliputi semua jenis kegiatan demi kesucian dan tujuan Ilahi. Mesjid adalah lembaga sosial-politik-agama. Mesjid tidaklah suci dengan sendirinya. Semakin bermanfaat, semakin suci mesjid itu. Masjid harus mengarah kepada ketaqwaan, dan semakin mendekatkan kepada taqwa semakin baik.[40] Jadi, kepemimpinan dalam Islam tidak didasarkan pada otoritas fisik mesjid.
26. Kepemimpinan dalam Islam bukan suatu lembaga simbol dan tidak bertalian dengan simbolisme dan simbol-simbol.
27. Kepemimpinan dalam Islam bukanlah lembaga upacara formal. Ia tidak berkaitan dengan seragam khusus, pakaian, pentahbisan, penobatan, dan sebagainya.
28. Istilah-istilah kepemimpinan dalam Islam ialah Imamah, Zu'ama, Hidayah dan istilah-istilah yang serupa, bukan kepemimpinan rohani, kepemimpinan agama dan sebagainya.
29. Para ulama dan kepemimpinan agama adalah lembaga-lembaga yang terpisah yang dalam hal ini keduanya tidak terikat dengan pemerintah sekuler (pemerintah yang tidak sah) dan oleh karena itu mereka sanggup melawan kekuatan yang tidak Islami. Kepemimpinan Islam dan kaum terpelajar agama yang benar selalu dihormati karena status mereka yang merdeka dan selalu bersama rakyat untuk menentang kekuasaan yang zalim, intervensi luar negeri dan kolonialisme.

Kajian tentang pergerakan dan revolusi yang dipimpin oleh para ulama melawan penguasa-penguasa zalim dan kolonialisme menjelaskan ini, yakni, revolusi yang dipimpin oleh para ulama seperti misalnya Usman Ibn Fodio, Al-Haj Umar, di Afrika Barat, Al-Mahdi di Sudan, Sayyid Jamaluddin di Timur Tengah dan oleh Ayatullah Rohullah Imam Khomeini di Iran. •

Catatan-Catatan
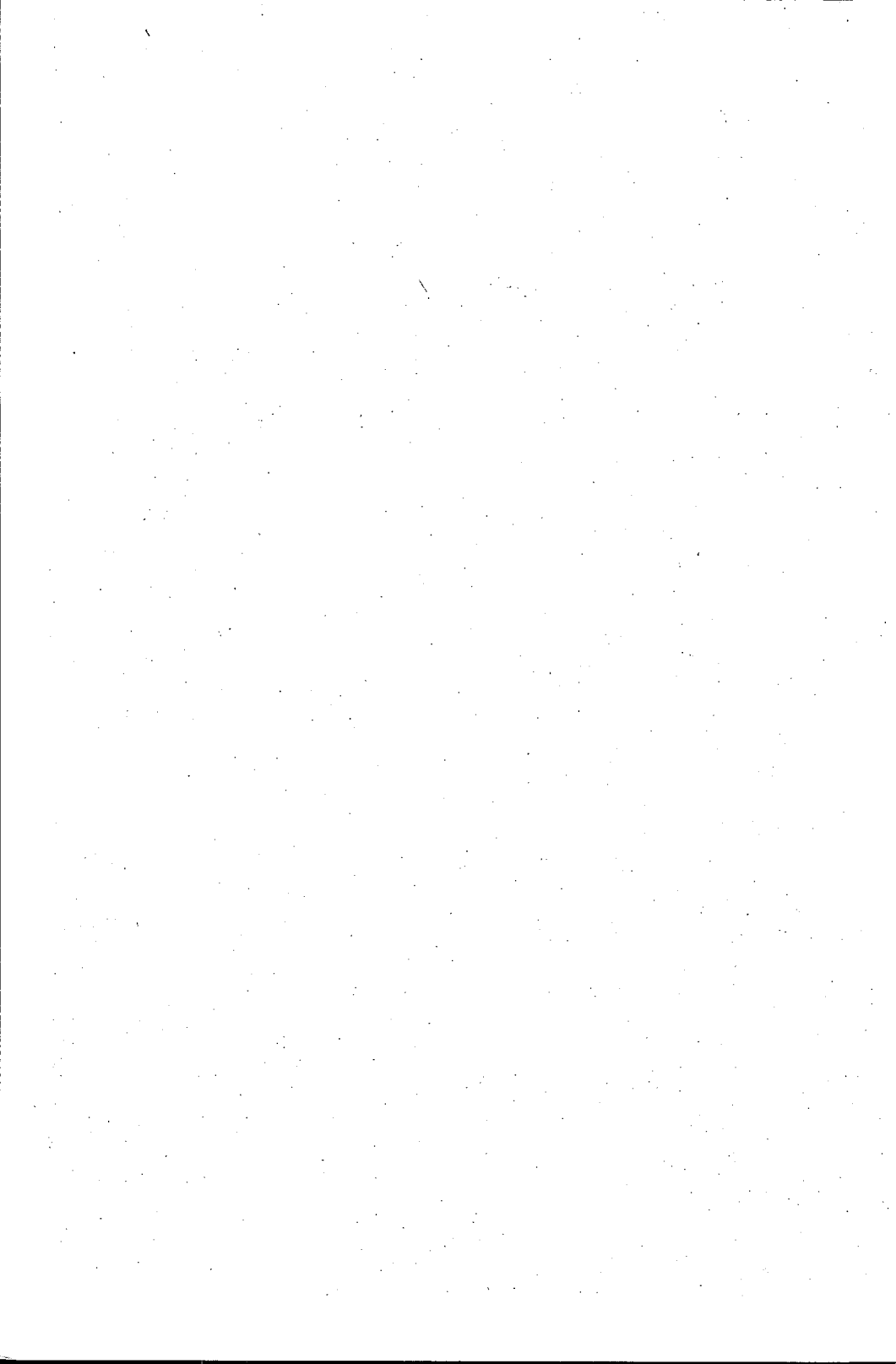
BAB I

1. A. T. Hatto, *The Semantic of Revolution,* hal. 25-27.
2. QS. 13:11 .
3. Lihat tulisan-tulisan mereka.
4. A. T. Hatto, *The Semantic of Revolution,* hal. 25.
5. Bernard Lewis yang buku pertamanya tentang orang-orang Arab terbit sesudah Israel berkuasa dan merupakan pembela yang gigih atas negeri itu hingga ia diajukan ke komite Kongres Amerika Serikat, dan terus-menerus memberikan opini yang bias tentang Islam, menjelaskan konsep Islam tentang Revolusi dan menyatakan bahwa kata *daulat* (negara; dinasti) merupakan istilah Al-Quran untuk Revolusi. Tidakkah sikap politisnya terhadap Islam dan orang Muslim akan mempengaruhi opini kita tentang tujuan-tujuannya dan membuat kita meragukan objektivitasnya, kapan saja dan di mana saja ia memberikan opini tentang Islam dan orang Muslim? (Lihat G. H. Jansen, *Militant Islam,* hal. 85).
6. QS. 8:53; 13:11.
7. *Inqelab:* Perubahan substansi atau konversi dipandang sebagai salah satu cara untuk mengubah keputusan. Yaitu, minum anggur adalah dilarang, tetapi setelah anggur berubah menjadi cuka, ia boleh diminum karena substansinya telah berubah dan ia bukan lagi anggur.
8. QS. 2:34.
9. Ali bin Abi Thalib, *Nahj al-Balaghah,* khutbah No. 16, hal. 162 (Qum, Iran) disampaikan ketika beliau terpilih sebagai khalifah di Madinah.
10. QS. 2:34 .
11. Ibid, 13:11.
12. Ibid, 74:38
13. Kutipan dari karya Ali Syari'ati, *On the Sociology of Islam,* hal. 39-57 (terjemahan H. Algar, Mizan Press).
14. Ibid, hal. 87
15. Umar Chapra, *Islamic Perspectives,* (ed. K. Ahmad), hal. 217.
16. Untuk tulisan-tulisan tentang Islam ini, lihat M. Bazargan, *Militant Islam* dan juga *Young Islam.*

BAB 2

1. QS. 6:57; 12:40; 29:22; 42; 31:28, 70.
2. QS. 2:205.
3. M. Syafi'i, *Al-Risalah,* Kairo, 1940, hal. 154, 149; Abu Ya'la, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah,* Kairo, 1938, hal.3.
4. Kutipan dari *Hukumat-i Islami,* rangkaian kuliah, oleh Imam Khumaini.
5. *Islamic Perspectives,* ed. K. Ahmad, hal. 131.
6. Ibn Khaldun, *Muqaddimah,* Kairo, hal. 191-196; Ibn Taimiyyah, Al-Siyasah, Beirut, 1961, hal. 138-144.
7. Imam Khumaini, *hukumat-i Islami.*
8. *Islamic Perspectives,* ed. K. Ahmad, hal. 195 (U.K., 1979, I.F.).
9. Lihat Edward Said, *Orientalism,* London, 1978.
10. QS. 12:40; 3:26; 7:54; 5:44.
11. QS. 4:64, 80, 105, 165.
12. Tauhid adalah konsep pokok di dalam Islam. Ia menyimpulkan jalan hidup Islam dan menyajikan, secara singkat, esensi dari peradaban Islam. Ia juga merupakan satu istilah yang menjelaskan proses transformasi Islam dari seorang individu atau suatu masyarakat. Esensi pengalaman religius di dalam Islam adalah tauhid.
13. Untuk lebih rinci mengenai aspek positif dan negatif dari konsep tauhid, lihat *Islamic Perspectives,* ed. Khurshid Ahmad, U.K., 1979.
14. Ibid, hal. 186.
15. Lihat *Islamic Perspectives,* ed. Khurshid Ahmad, bab. 13, (U.K., 1979).
16. Ibid, hal. 186-187.
17. *Islam and the Revolutionary Traditions,* hal. 233 (U.K., ISSN 03063965).
18. *Islamic Perspectives,* ed. Khurshid Ahmad, hal. 187 (U.K., 1979).
19. QS. 13:11.
20. QS. 2:143; 3:21, 103, 110, 114.
21. QS. 3:104.
22. Ibid, 110.
23. QS. 4:75.
24. Bazargan, *Marz Miyan-i Din,* hal. 136-137.
25. S. Akhavi, *Religion and Politics,* hal. 120, mengutip dari *Goftar-i Mah.*
26. Ibid, Mehdi Bazargan, penerbit Goftari Mah.
27. Ibid.
28. Ibid.
29. QS. 2:107; 11:47; 4:32.
30. QS. 12:40; 6:57; 12:67.
31. Ibid, 4:58; 5:49.
32. QS. 4:58.
33. QS. 4:59; 5:55; 9:71.
34. Ibid, 2:205.
35. QS. 4:80; 3:159: 42:38.
36. Ibid, 2:256-257; 20:24, 43.
37. QS 16:90; 5:8: 4:135.

BAB 3

1. H. Algar, *The Islamic Revolution in Iran,* (M.I. U.K. 1980), hal. 67.
2. Altaf Gauhar, *The Challenge of Islam,* hal. xxi.
3. Ibid, xxii.
4. Ibid, xxiii.
5. Ismael, *Political Thought of Imam Khomeini: Social Problem,* Vol. 27, No. 5.
6. Pidato umum dan pesan-pesan Imam Khomeini.

BAB 4

1. QS. 2:62.
2. QS. 53:39.
3. QS. 2:177.
4. Ismail al-Faruqi, *Islam and Other Religions in the Challenge of Islam,* (I.C.E., U.K., 1978).
5. QS. 3:104.
6. QS. 4:97-98.
7. QS. 57:27.
8. Ismail al-Faruqi, *Islam and Other Religions in the Challenge of Islam,* I.C.E., U.K., 1978..
9. Altaf Gauhar, *The Challenge of Islam: Introduction,* (I.C.E., U.K., 1978).
10. Imam Khomeini, wawancara pada tanggal 30 Desember 1979.
11. QS. 99:7-8.
12. QS. 4:75.
13. M. Quthb, *Islam* (ed. K. Ahmad, I.C.E., U.K.).
14. QS. 9:24.
15. Lihat M. Quthb, *Islam* (ed. K. Ahmad, I.C.E., U.K.), diterbitkan secara terpisah oleh Islamic Foundation, 1979, U.K., hal. 7-16.

BAB 5

1. QS. 3:83.
2. QS. 6:163.
3. QS. 51:56.
4. QS. 16:51.
5. M. Quthb, *what Islam can give to Humanity: The Challenge of Islam,* ed. A. Gauhar (I.C.E., U.K., 1978), hal. 316-319.
6. QS. 51:56.
7. Lihat amanat umum Imam Khomaini pada kesempatan Idu'l Fitri, 24 Agustus, 1979.
8. Untuk ini, Lihat M. Quthb, *what Islam can give to Humanity, Religion and Pilitics,* (I.C.E., U.K., 1979).

9. QS. 2:164, 31; 45:13; 45:13; 35:28; 4:77.
10. QS. 28:77.
11. QS. 29:45.
12. Untuk pembahasan lebih rinci tentang keesaan dan konsep ibadah, lihat M. Quthb, bab. 17, *The Challenge of Islam,* ed. A. Gauhar (I.C.E., U.K., 1978).
13. QS. 69:18-21; 75:13; 99:1-8.
14. QS. 99:7-8.
15. QS. 3:169.
16. Untuk bagian ini, lihat M. Quthb, *Syubahat Hawl al-Islam,* Bab "Islam and the Crisis of the Modern World", (ed. K. Ahmad, I.C.E., U.K.). Juga lihat M. Muthahhari, *The Martyr,* Great Islam Library, Tehran, Iran, 1980.

BAB 6

1. Misalnya H. Algar, *The Islamic Revolution,* hal. 2; dan K. Siddiqui, *The Islamic Revolution,* hal. 16 (keduanya oleh M.I. U.K., 1980).
2. M. Muthahhari, Islamic *Movement in the 20th century,* hal. 63.
3. Ibid, hal. 2-3; 10.
4. Untuk pembahasan lebih rinci tentang "syahadah", lihat Muthahhari, *The Martyr;* kuliah Ali Syari'ati tentang *syahadah* dan amanat Imam Khomaini, dan Taqi Syari'ati, *Husain* (G.L.I.).
5. H. Algar, *The Islamic Revolution,* hal. 3 (M.I., U.K., 1980). Juga Ayatullah Muthahhari, lihat *Islamic Movement,* bagian terakhir.
6. James P. Prescatorial, *Paper,* British Institute Studies, Desember 1979.
7. QS. 2:143.
8. QS. 2:256.

BAB 7

1. Umar Chapra, *The Islamic Welfare: Islamic Perspectives,* ed. K. Ahmad, hal. 217.
2. QS. 24:35.
3. QS. 49:13.
4. Tabari, *Majma',* Vol. 8, hal. 84.
5. QS. 24:41.
6. QS. 7:158.
7. Syatibi, *Al-Muwafiqat,* Vol. 2, hal. 244.
8. *Misykat,* Vol. 2, hal. 613.
9. QS. 57:25.
10. QS. 5:43; 12:40; 7:54.
11. QS. 12:40.
12 QS. 24:55.
13. QS. 4:58.
14. QS. 12:41.

15. QS. 5:8.
16. QS. 3:21, 113, 114; 16:92.
17. Hadis Nabi.
18. QS. 2:185; 16:97; 22:77.
19. QS. 5:8; 4:58; 2:256; 13:42.
20. QS. 3:159.
21. Quran, lihat ayat-ayat yang berkaitan dengan Ahl al-Kitab 3:23, 24, 64-75, 98-100, 113, 119; 4:44-52, 153-162, 171; 5:5, 12-19, 59-66, 69, dan lain-lainnya.
22. QS. 16:36; 10:47-49; 61:9; 57:25.

BAB 8

1. Lihat Donald Pipes, *8 days*, 28 Juni, 1980 *U.K.).
2. QS. 2:143, *"Dan demikianlah Kami jadikan kalian satu umat yang adil, agar kalian dapat menjadi teladan atas manusia dan agar Rasul menjadi teladan bagi kalian . . . . ."*
3. Lihat pidato Imam Khumaini tentang "Syahadah" dan juga lihat karya Muthahhari *The Martyr* (G.I.L.) Tehran; Ali Syari'ati, Red Syiism.
4. Donald Pipes, *8 days*, 28 Juni 1980 (U.K.).
5. Matt. 5:39, 41.
6. Untuk aktivisme Islam, lihat M. Bazargan, *Islamic Progmatism (' Progmatism Dar Islam).*
7. QS. 4:75.
8. QS. 49:9.
9. Lihat Abd Al-Rahman Azzam, *The Eternal Message of Muhammad*, hal. 152-159, (U.K., 1979).
10. QS. 2:149; 5:45.
11. Lihat *Hukumat-i Islami* (Najaf 1391, Parsi 1971), hal. 32.
12. *"Al-Qatil wa al-Maqtul Kilahuma fi al-Nar, Al-Zhalim wa al-Mazhlum Kilahuma fi al-Nar."*
13. H. Algar, *Islam, the Intellectual Challenge*, ("The Challenge of Islam," ed. A. Gauhar, (I.C.E., U.K., 1978), hal. 291.
14. Ibid, hal. 291.
15. Ibid, hal. 293.
16. Ibid, hal. 295-296.
17. Wawancara, 30 Desember 1979, kepada H. Algar.
18. Lihat pesan dalam "Pesan-pesan Pilihan Imam Khumaini," (M.G. Teh-ran, Iran, 1980).
19. Syari'ati, *Intizar Madhhabi Interaz*, hal. 19 (Tehran), teks Parsi.
20. G.H. Jansen, *Militant Islam*, hal. 95.
21. Dikutip dalam Daniel, Islam, Europe, Empire, hal. 333.
22. G.H. Jansen, *Militant Islam*, hal. 96.
23. Ibid, hal. 103.
24. Ibid, hal. 96.

25. Ibid, hal. 98
26. Ibid, hal. 103.
27. Ibid, hal. 106.
28. Ibid, hal. 100.
29. Ibid, hal. 102
30. Lihat Thomas Hodgkin, *The Revolutionary Tradition in Islam,* hal. 235 (U.K., 1980, ISSN 03063965).
31. QS. 24:55.
32. QS. 28:5.
33. QS. 60:4.
34. QS. 33:21.
35. QS.24:55.
36. QS. 13:11.
37. QS. 21:105.
38. QS. 28:5.
39. QS. 4:75.
40. QS. 13:11.

BAB 9

1. Mahdiisme adalah keyakinan akan datangnya Imam Mahdi atau juru selamat manusia yang akan menegakkan Pemerintahan Tuhan sepenuhnya dan menetapkan keadilan dan persaudaraan serta kesatuan akhir manusia. Harapan besar *(intizhar)* akan datangnya Mahdi merupakan salah satu ciri utama Syi'ah. Ayatullah M. Baqir al-Shadr menulis buku yang berjudul, "The Awaited Savior" (terjemahan Inggris)' Jadi, Dr. Syari'ati, M. Bazargan, S.M.B. Shadr masing-masing telah menulis satu buku tentang Mahdiisme.
2. C.J.F. Tomlinson dan C.J. Lethem, *History of Islamic Propaganda in Nigeria,* hal. 10 (London, 1927), dikutip oleh Thomas Hodgkin, *Islam and the Revolutionary Tradition,* hal. 228.
3. Untuk ini, lihat Ali Syari'ati, *Art of Awaiting Saviour.*
4. Bazargan, *Marz Maryan Din,* dikutip oleh H. Akhavi (Iran, 1980).
5. Ibn Khaldun, *Muqaddimah* (terjemahan F. Rosenthal, London, 1958, Vol. 11, hal. 156.
6. Lihat Ali Syari'ati, *The Art of Awaiting the Saviour,* penerbit The Shariati Foundation, Tehran, 1979 dan Mehdi Bazargan, *The Inevitable Victory.*
7. QS. 24:55.
8. QS. 21:105.
9. QS. 17:81.
10. Lihat khususnya Mehdi Bazargan, *The Inevitable Victory,* terjemahan M. Yusefi, *Islam Maktabi Mobariz (Militant Islam),* dan *Pragmatism Dar Islam (Islamic Pragmatism)* dan buku Ali Syari'ati.

BAB 10

1. S.M.H. Thabathaba'i, *Shiite Islam,* hal. 39.

2. Ibid, hal. 40-66.
3. Al-Kulaini, *Al-Kafi,* hal. 462; Hamidullah, *introduction to Islam,* hal. 65.
4. S.M.H. Thabathaba'i, *Shiite Islam,* hal, 211.
5. Gelar sebenarnya Imam Khumaini adalah *Na'ib al-Imam* (wakil Imam). Ketika ia disebut sebagai Imam Khumain, kata "Imam" itu digunakan dengan makna ini (pemimpin), karena Imam adalah gelar yang hanya diberikan kepada Imam kedua belas di dalam Syi'ah. Inilah sebabnya Syi'ah disebut dua belas Imam.
6. Untuk ini, lihat M. Thabathaba'i, *Shi'te Islam,* terjemahan Inggris.
7. Untuk pembahasan lebih rinci tentang Imamah, S.H.M. Jafri, *The Origins and Early Development of Shiah Islam* (terjemahan Indonesia berjudul "Awal dan Sejarah Perkembangan Islam Syi'ah", Pustaka Hidayah, 1988) dan S.M.H. Thabathaba'i, *Shiite Islam,* diterbitkan oleh kelompok Muslim, Qum, Iran.

BAB 11

1. Imam Khumaini, Pesan Idul Fitri, 24 Agustus 1979; *Nainy, Tanzihol Umma* (semua risalah ini berkenaan dengan kesatuan agama dan negara; Taliqani, *Introduction to Naini's treatise;* M. Bazargan, *Marzi Miyani Din wa Umoori Ijtimai,* seluruh risalah itu.
2. Imam Khumaini, *Hukumat-i Islami,* hal. 63 (1971, Najaf), hal. 53, 32.
3. Bazargan mengutip sebagian darinya dalam risalahnya *"Marzi Miyani Din."*
4. Ucapan Nabi.
5. QS. 4:75.
6. Imam Khumaini, *Hukumat-i Islami,* (Najaf 1971), hal. 74, 96.
7. Imam Khumaini, *Hukumat-i Islami,* (Najaf 1971), hal. 74 (cit. S. Akhavi, *Religion and Politic in Contemporary Iran,* hal. 165. (State University of New York Press, 1980).
8. Ibid, hal. 39.
9. Ibid, hal. 32.
10. Ibid, hal. 63.
11. H. Algar, *The Islamic Revolution,* hal. 5-6 (M.I., U.K., 1980); juga lihat K. Siddiqui, *Islamic Revolution,* (M.I., U.K., 1980) hal. 16-18.
12. H. Algar, *The Islamic Revolution,* hal. 6 (M.I., U.K., 1980).

BAB 12

1. Lihat *Hukumat-i Islami,* oleh Imam Khumaini.
2. Lihat artikel 5, 107 dan juga pengantar ke CLIRI.
3. M.K. Khurasani, *Kifayat al-Ushul;* M. Hosain Bahai Amili, *Zabdat al-Ushul.*
4. Sadr al-Din Sadr, *Khulasat al-Fusus,* Iran, Qum.
5. Fitzgerald, N.S.S.
6. al-Razi, Tafsir. iv, 269.

7. Al-Syahristani. op. cit.
8. Ibn Qayyim, *al-Itisam,* 11, 114.
9. Ibn Khaldun, *Muqaddimah,* hal. 24.
10. Imam Khumaini, *Walayat Faqih,* hal. 103-104.
11. Untuk informasi lebih jauh dan lebih rinci tentang prinsip ijtihad dan otoritas akal dalam hukum Syi'ah, lihat A. Ezzati, *Shii Islamic Law and Jurisprudence* , Lahore, Pakistan, 1976.
12. QS. 9:122.
13. Lihat Ali Syari'ati, *Ijtihad and the Theory of Continuous Revolution (Ijtihad wa Nazariya Inqelab Diny* — Parsi*).*
14. Ibid. (Nadeer Pub., Tehran, Iran).
15. A.M. Subhi, *Nazhariyat al-Imamah,* 1969, hal. 24.
16. Dikutip oleh H. Khan, Sherwani, *Studies in Muslim Political Thought,* 1977, hal. 77-79.
17. Ibid.
18. Artikel CLIRI 5 hukum konstitusi Republik Islam Iran.

BAB 13

1. QS. 3:17, 79; 5:5; 6:125; 39:23; 61:17.
2. QS. 22:77: 33:25; 49:14.
3. QS. 3:83.
4. QS. 12:39; 27:91.
5. QS. 3:19.
6. QS. 22: 78.
7. QS. Lane Poole.
8. QS. 2:16.
9. Arnold, *The Legacy of Islam,* ch. "Law and Society."
10. QS. 2: 156.
11. QS. 42:25; 2:256.
12. "Imamat" secara harfiah berarti "memimpin" dan "Imam" berarti "pemimpin." Dalam terminologi Islam Syi'ah, "Imamat" berarti "Kepemimpinan Mutlak Ilahi" dari suatu komunitas Muslim dalam semua urusan agama dan sekular dari Imam yang, sebagai pengganti Nabi, memimpin masyarakat sebagai khalifah Tuhan, karena manusia adalah khalifah Allah. Tetapi, otoritas Imam adalah tidak langsung dan independen, tetapi ia memperoleh otoritas ini sebagai pengganti Nabi. Muslim Sunni percaya bahwa Abu Bakar dan tiga orang sesudahnya adalah khalifah (pengganti) Nabi dan Syi'ah percaya bahwa Ali bin Abi Thalib dan keturunannya adalah Imam dan khalifah. Tetapi, baik imamat maupun khilafah tidak berkaitan dengan dinasti, kerajaan atau kedudukan lain yang berkaitan dengan kekuasaan dan politik dalam arti yang sekuler atau religius semata-mata.
13. QS. 17:85.
14. QS. 2:107; 120, 257.
15. Pemerintahan Islam adalah pemerintahan Allah oleh rakyat, sebagai khalifah

Allah, dan demi Allah. Ini adalah kasus selama hidup Nabi (dan Imam, menurut doktrin Islam Syi'ah). Namun setelah Rasul dan Imam tiada, baik Sunnah maupun Syi'ah berpendapat bahwa Masyarakat Muslim memiliki hak lahiah untuk memilih pemimpin mereka sendiri. Al-Quran menyatakan, "Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan perintah yang lalu ia penuhi. Allah berfirman, 'Sesungguhnya Aku akan menjadikan kamu sebagai Imam bagi seluruh manusia.' Ibrahim menjawab, 'Dan (saya mohon juga) dari keturunanku.' Allah berfirman, 'Janji-Ku ini tidak mencakup orang-orang yang zalim.' "Dengan demikian, pemimpin harus orang yang memenuhi syarat dan ditunjuk oleh Tuhan.

16. Hebrews, 9:22.
17. St. Peter, 1:18. 19.
18. Muhammad Asad, *Islam,* (ed. K. Ahmad), 1975, hal. 48-50.
19. B. Lewis, *Islam,* Pengantar.
20. Edwin Arnold.
21. Frithcof Schoun, *Understanding Islam,* bab 1.
22. QS. 11:14.
23. QS. 20:129; 3:164; 62:3.
24. QS. 33:21.
25. QS. 24:34-35.
26. *The World of Islam,* (ed. Kritzek), 1960, hal. 51.
27. F. Schoun, Understanding Islam, hal. 21.
28. Arnold, The Legacy of Islam, hal. 286.
29. Ismail al-Furuqi, The Great Asian Religions, hal. 314-317.
30. Missionary Religions, Juli 1874.
31. QS. 2:143.
32. QS. 3:110.
33. QS. 11:88.
34. QS. 3:104.
35. QS. 2:143.
36. QS. 72:38; 44:17.
37. QS. 62:1; 59:24; 64:1; 17:44.
38. QS. 32:4; 45:19; 47:11; 12:40; 40:12; 28:70.
39. QS. 5:55; 9:71.
40. QS. 9:108.